

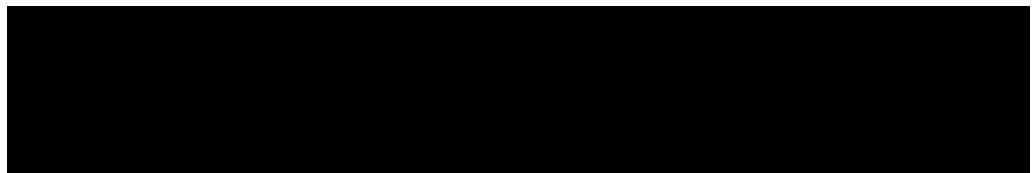


PUTUSAN
NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025

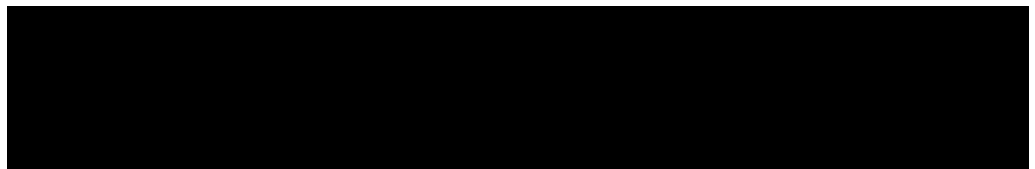
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, diajukan oleh:

1 Nama : **Drs. H. Iyos Somantri, M.Si.**



2 Nama : **Zainul S., S.E., M.Si.**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/SHLawFirm/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024 memberi kuasa kepada Saleh Hidayat, S.H., AA. Brata Soedirdja, S.H., Dr. Padlilah, S.H., M.H., Kukun Kurniansyah, S.H., Ade Nurul Ilham BS, S.H., Deri Irawan, S.H., Ferry Gustaman, S.H., Iyus Yuswandi, S.H., Dede Isnandar, S.H., dan Paizal Reza, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dan berdomisili pada Kantor Hukum Saleh Hidayat Law Firm & Partners, beralamat kantor di Perum Alam Layung Indah Blok F Nomor 36 RT 01 RW 08 Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

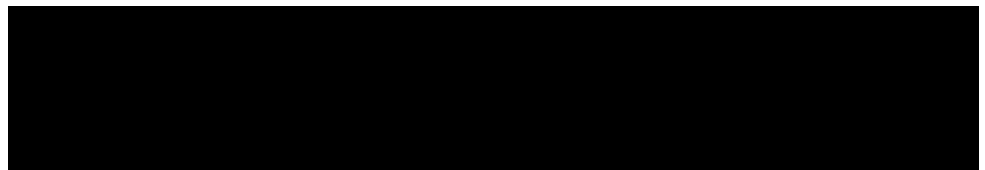
I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi,



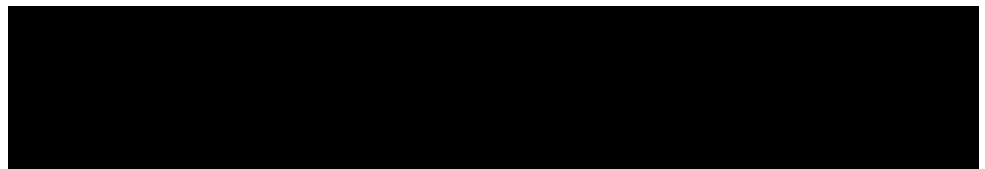
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/3202/2/2025 tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afdalis, S.H., M.H., M. Umar Halimuddin, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Febri Maulana, S.H., Muh. Hasmawi Nur, S.H., La Ode Alkasih, S.H., dan Muh. Alan Saputra D., S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum MARANTA Counsellors at Law, beralamat di Wisma Nugra Santana, 12th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. 1. Nama : Drs. Asep Japar, M.M.



2. Nama : H. Andreas, S.E.



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Muhammad Rafi'i Nasution, S.H., M.H., Andri Yules, S.H., Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.Sos., Iman Budiansyah, S.E., M.H., Irwana Onassis, S.H., M.H., Andrie Budiman, S.H., Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vincensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., Herdika

Sukma Negara, S.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., M.H., Rusdi, S.H., dan Dicky Bastian Putra, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 Drs. H. Asep Japar, M.M. - H. Andreas, S.E., yang beralamat di Jl. Dwikora No. 3 Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 20.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 237/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 17.03 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 1781 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 1782 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Tahun 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB, dan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20:30 WIB, dimana tanggal 7 dan 8 Desember 2024 adalah Hari Sabtu dan Hari Minggu dan bukan merupakan hari kerja;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Iyos Somantri dan H. Zainul S	498.990
2	H. Asep Japar dan H. Andreas	564.862

	Total Suara Sah	1.063.852
	Selisih Suara	65.872

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih suara sebanyak 65.872 suara;

2. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya pelanggaran proses pemilihan yang berakibat serius terhadap perolehan hasil akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang jelas dan nyata dalam 2 (dua) hal, yakni:
 - (1) Terjadinya pelibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2;
 - (2) Dilakukannya praktik politik uang yang masif di beberapa kecamatan yang berdampak pada hilangnya kebebasan memilih bagi rakyat dan memengaruhi hasil akhir pemilihan
3. Bahwa ada sekitar kurang lebih 469 TPS yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Sukabumi yang diduga terjadi penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut 2 (Drs. H. Asep Japar dan Andreas, SE.) sejumlah 102.934 suara, sedangkan perolehan suara No urut 1 atau Pemohon sejumlah 28.818 suara, sehingga terjadi selisih 73.726 suara. Berdasarkan sampling indikasi penggelembungan terjadi di TPS 8 Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, dan TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu, serta indikasi pemalsuan tanda-tangan pemilih yang tidak hadir oleh penyelenggara KPPS pada tanggal 27 November 2024 (Bukti foto terlampir), sehingga kami anggap hal tersebut menggambarkan patut diduga massif di hampir semua TPS, dan mempengaruhi terhadap hasil perolehan suara akhir. Dengan demikian, apabila total suara akhir pasangan no. urut 2 Se-Kabupaten Sukabumi, yakni total 564.862 suara dikurangi dengan jumlah suara di 469 TPS tersebut, yaitu 102.934 suara, maka perolehan suara no urut 2 adalah 461.928. sedangkan perolehan suara akhir No. urut 1 atau Pemohon, yaitu 498.990, jika dikurangi 28.818 dari 469 TPS, berarti 470.172. Apabila suara no urut 1 sejumlah 470.172 disandingkan dengan suara no. urut 2 sejumlah 461.928 suara, itu berarti perolehan suara no urut 1 unggul dengan selisih

8.244 suara. Untuk menggambarkan secara detail kami sampaikan tabel data perolehan suara di 469 TPS sebagai berikut:

No	KEC AMA TAN	DE SA	TPS	SUA RA 1	SU AR A 2	TOTA L DPT	TO TAL PE MIL IH	SUAR A SAH	SUAR A TIDAK SAH	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SELISIH
1	Cisol ok	Car ingi n	TPS 009	20	165	453	227	185	12	197	-145
2			TPS 011	43	171	369	198	214	5	219	-128
3		Cic ada s	TPS 008	16	308	502	269	324	2	326	-292
4			TPS 009	59	230	407	198	289	5	294	-171
5			TPS 010	44	234	391	198	278	8	286	-190
6		Cis olo k	TPS 008	108	243	588	311	351	17	368	-135
7		Gu nun gka ram at	TPS 003	114	161	564	287	275	12	287	-47
8			TPS 004	36	180	431	227	216	3	219	-144
9		Gu nun gta nju ng	TPS 004	76	196	486	248	272	7	279	-120
10		Kar ang pap ak	TPS 002	93	273	579	298	366	13	379	-180
11			TPS 005	94	259	591	290	353	17	370	-165
12			TPS 008	108	222	585	315	330	15	345	-114
13			TPS 009	87	225	550	284	312	15	327	-138
14		Pas ir Bar u	TPS 009	63	176	539	282	239	10	249	-113
15			TPS 010	46	179	585	288	225	8	233	-133
16		Sir nar es mi	TPS 005	56	259	548	289	315	4	319	-203
17			TPS 006	51	192	340	177	243	2	245	-141
18			TPS 007	36	369	586	317	405	7	412	-333
19			TPS 008	45	272	538	287	317	5	322	-227
20		Suk ara me	TPS 005	73	247	568	297	320	9	329	-174
21		Wa naj aya	TPS 003	64	195	471	237	259	5	483	-131

22		Wangu nsari	TPS 001	80	198	561	281	278	7	285	-118
23	Pela buan Ratu	Cib oda s	TPS 008	58	181	412	219	239	6	245	-123
24			TPS 013	72	196	457	254	268	9	277	-124
25		Cik adu	TPS 006	65	213	588	308	278	22	300	-148
26		Cit arik	TPS 006	96	221	566	296	317	9	326	-125
27		Pas irsu ren	TPS 016	15	142	275	152	157	6	163	-127
28		Pel abu han Rat u	TPS 024	59	223	419	206	282	5	287	-164
29			TPS 026	50	249	524	247	299	15	314	-199
30		Ton jon g	TPS 013	28	164	527	274	192	4	196	-136
31	Simp enan	Cid ada p	TPS 012	74	196	459	224	270	16	286	-122
32			TPS 015	53	208	447	226	261	8	269	-155
33			TPS 022	48	179	428	224	227	1	228	-131
34			TPS 024	22	196	373	184	218	8	226	-174
35			TPS 026	26	146	392	206	172	6	178	-120
36		Ker taja ya	TPS 014	57	202	384	198	259	8	267	-145
37		Loji	TPS 001	93	224	526	260	317	0	317	-131
38			TPS 004	81	236	510	269	317	0	317	-155
39			TPS 009	54	284	551	284	338	0	338	-230
40			TPS 010	52	175	422	221	227	0	227	-123
41			TPS 011	32	229	478	243	261	0	261	-197
42			TPS 012	16	235	511	262	251	0	251	-219
43		Me kar Asi h	TPS 003	29	178	382	194	207	14	221	-149
44	Bojo ng Gent eng	Cib oda s	TPS 013	44	200	510	257	244	9	253	-156
45		Cip ane nga h	TPS 001	44	304	539	278	348	39	387	-260
46			TPS 002	26	411	524	262	437	15	452	-385

47			TPS 005	73	216	450	226	289	7	296	-143
48	Cicurug	Benda	TPS 001	34	258	521	265	292	22	482	-224
49			TPS 002	68	256	536	276	324	17	550	-188
50			TPS 003	60	304	576	282	364	14	591	-244
51			TPS 004	98	229	588	286	327	21	603	-131
52			TPS 005	99	239	564	296	338	26	579	-140
53			TPS 006	78	228	557	274	306	20	571	-150
54			TPS 008	68	188	472	244	256	23	484	-120
55			TPS 010	74	197	568	278	271	12	583	-123
56			TPS 011	75	185	566	272	260	13	581	-110
57			TPS 012	82	207	540	273	289	15	528	-125
58			TPS 016	77	255	560	281	332	14	574	-178
59			TPS 017	101	252	563	285	353	23	578	-151
60			TPS 018	67	249	554	283	316	15	568	-182
61			TPS 019	73	226	532	271	299	15	546	-153
62			TPS 024	39	202	460	248	241	9	472	-163
63			TPS 025	33	274	528	271	307	7	542	-241
64	Cicurug	Carangan	TPS 004	53	204	441	230	257	15	453	-151
65			TPS 005	72	192	468	251	264	19	480	-120
66			TPS 006	74	200	432	237	274	9	443	-126
67			TPS 008	53	254	476	251	307	14	488	-201
68			TPS 009	50	271	446	235	321	6	459	-221
69			TPS 010	92	215	446	226	307	8	458	-123
70		Cisaat	TPS 002	97	233	485	251	330	13	496	-136
71			TPS 006	37	192	386	197	229	13	395	-155
72			TPS 014	38	202	461	237	240	4	473	-164
73			TPS 017	107	231	528	269	338	25	542	-124
74	Cicurug	Kutajaya	TPS 003	71	274	547	284	345	16	562	-203
75			TPS 004	109	228	520	271	337	24	532	-119

76			TPS 016	64	184	457	225	248	19	468	-120
77			TPS 017	48	299	472	246	347	18	484	-251
78			TPS 019	56	169	529	283	225	70	543	-113
79			TPS 025	55	182	406	209	237	17	417	-127
80			TPS 027	68	225	466	239	293	15	478	-157
81			TPS 028	62	261	579	295	323	20	594	-199
82		Me	TPS 006	100	228	550	281	328	17	564	-128
83		kar	TPS 007	72	194	469	233	266	18	481	-122
84		sari									
85		Pas	TPS 002	46	221	438	234	267	5	449	-175
86		aw	TPS 004	39	277	470	225	316	15	482	-238
87		aha	TPS 007	58	202	389	195	260	11	399	-144
88		n	TPS 009	86	327	553	259	413	9	567	-241
89			TPS 011	84	217	514	257	301	29	527	-133
90			TPS 012	77	207	478	239	284	18	490	-130
91			TPS 015	47	168	418	220	215	22	429	-121
92		Pur	TPS 001	86	214	569	289	300	12	584	-128
93		wa	TPS 009	67	216	432	225	283	16	443	-149
94		sari	TPS 010	79	204	504	244	283	14	297	-125
95		Ten	TPS 004	42	236	421	216	278	11	432	-194
96		jola	TPS 005	82	193	471	245	275	14	483	-111
97		ya	TPS 011	58	208	515	280	266	22	529	-150
98	Cida	Cid	TPS 002	54	165	386	201	219	8	227	-111
99	hu	ahu	TPS 004	50	252	528	283	302	12	314	-202
100			TPS 005	62	220	522	267	282	11	293	-158
101			TPS 006	71	222	553	273	293	15	308	-151
102			TPS 007	25	238	570	284	263	0	263	-213
103			TPS 008	59	176	487	245	235	21	256	-117
104			TPS 010	40	198	555	285	238	16	254	-158
			TPS 011	73	216	544	293	289	17	306	-143

105		TPS 012	57	182	589	308	239	8	247	-125
106		TPS 014	60	233	497	255	293	10	303	-173
107		TPS 015	49	212	487	246	261	16	277	-163
108		TPS 016	37	165	376	184	202	11	213	-128
109		TPS 017	41	187	389	202	228	7	235	-146
110	Giri jay a	TPS 002	57	226	419	211	283	15	298	-169
111		TPS 004	23	138	232	126	161	5	166	-115
112		TPS 005	39	193	314	173	232	7	239	-154
113		TPS 006	50	219	363	186	269	15	284	-169
114		TPS 007	42	209	407	218	251	13	264	-167
115		TPS 008	90	248	543	284	338	12	350	-158
116		TPS 009	39	164	319	159	203	9	212	-125
117		TPS 012	50	242	535	265	292	23	315	-192
118		TPS 015	83	223	490	242	306	12	318	-140
119	Jay aba kti	TPS 001	75	263	590	304	338	9	347	-188
120		TPS 002	48	275	566	299	323	14	337	-227
121		TPS 004	67	224	513	256	291	10	301	-157
122		TPS 005	105	240	594	305	345	10	355	-135
123		TPS 007	80	216	488	245	296	10	306	-136
124		TPS 008	45	293	570	290	338	15	353	-248
125		TPS 009	74	245	583	313	319	22	341	-171
126		TPS 011	68	220	546	265	288	12	300	-152
127		TPS 014	72	290	530	284	362	17	379	-218
128		TPS 016	69	223	596	310	292	33	325	-154
129		TPS 017	53	243	591	294	296	18	314	-190
130	Pas ir Dot on	TPS 001	57	184	389	197	241	14	255	-127
131		TPS 002	71	207	471	235	278	10	288	-136
132		TPS 003	52	172	449	227	224	15	239	-120
133		TPS 004	38	208	451	225	246	20	266	-170

134			TPS 005	55	171	365	183	226	12	238	-116
135			TPS 006	47	229	477	256	276	21	297	-182
136			TPS 010	16	178	354	182	194	28	222	-162
137		Pondokasotengah	TPS 003	66	247	501	243	313	9	322	-181
138			TPS 004	37	177	380	196	214	12	226	-140
139			TPS 005	55	227	500	261	282	14	296	-172
140			TPS 006	85	235	578	280	320	11	331	-150
141			TPS 007	43	161	314	150	204	8	212	-118
142			TPS 009	88	216	590	284	304	8	312	-128
143			TPS 012	77	211	449	228	288	10	298	-134
144		Pondokasotonggo	TPS 001	62	237	509	254	299	14	313	-175
145			TPS 003	35	219	323	158	254	15	269	-184
146			TPS 004	72	225	589	283	297	20	317	-153
147			TPS 005	77	275	596	286	352	30	382	-198
148			TPS 006	89	213	531	276	302	48	350	-124
149			TPS 007	37	153	361	185	190	20	210	-116
150			TPS 011	95	216	544	268	311	17	328	-121
151		Tangkil	TPS 001	122	381	583	304	503	16	519	-259
152			TPS 003	25	138	228	120	163	17	180	-113
153			TPS 006	41	306	460	230	347	4	351	-265
154			TPS 007	98	252	470	238	350	15	365	-154
155			TPS 008	72	266	532	266	338	15	353	-194
156			TPS 009	88	217	472	242	305	17	322	-129
157			TPS 011	42	260	440	228	302	14	316	-218
158			TPS 012	86	206	485	247	292	9	301	-120
159			TPS 014	55	256	564	271	311	24	335	-201
160	Kabupaten	Cianjaga	TPS 001	32	159	369	190	191	13	204	-127
161			TPS 002	34	213	485	248	247	20	267	-179
162			TPS 003	18	171	446	247	189	20	209	-153

163		Cip eut euy	TPS 011	51	168	445	233	219	11	230	-117
164		Tug uba ndu ng	TPS 006	42	205	472	225	247	10	257	-163
165	Kala pa Nung gal	Pal asa ri Gir ang	TPS 002	52	212	441	226	264	9	273	-160
166			TPS 003	50	194	413	202	244	10	254	-144
167			TPS 006	102	220	591	301	322	12	606	-118
168			TPS 010	80	280	573	305	360	10	370	-200
169		Pul osa ri	TPS 009	60	204	418	208	264	8	429	-144
170			TPS 012	55	280	463	241	335	4	475	-225
171			TPS 013	47	206	454	217	253	10	466	-159
172			TPS 014	90	257	562	271	347	8	355	-167
173		Wal ang Sar i	TPS 002	78	200	494	258	278	12	507	-122
174			TPS 007	56	212	535	273	268	7	549	-156
175			TPS 008	58	168	477	248	226	5	490	-110
176			TPS 010	27	165	356	187	192	8	365	-138
177		Boj ong Asi h	TPS 003	84	233	518	266	317	14	531	-149
178			TPS 004	83	252	533	266	335	17	547	-169
179			TPS 006	107	277	591	295	384	19	606	-170
180			TPS 007	73	299	578	283	372	8	594	-226
181		Boj ong Lon gok	TPS 001	65	182	476	245	247	0	247	-117
182		Leb aks ari	TPS 007	60	236	461	237	296	10	306	-176
183		Par aka n Sal ak	TPS 008	59	228	478	252	287	9	296	-169
184			TPS 010	64	178	442	229	242	14	256	-114
185			TPS 011	28	149	330	172	177	8	185	-121
186		Suk ake rsa	TPS 001	70	302	563	290	372	20	578	-232
187			TPS 002	90	242	449	236	332	8	461	-152
188			TPS 003	53	240	454	244	293	16	467	-187

189			TPS 004	84	284	570	289	368	27	585	-200
190			TPS 005	66	196	457	229	262	4	469	-130
191			TPS 006	50	259	461	245	309	8	473	-209
192			TPS 007	62	238	462	220	300	15	473	-176
193			TPS 008	71	211	461	228	282	9	473	-140
194			TPS 009	70	257	458	239	327	1	470	-187
195			TPS 011	71	269	499	242	340	9	512	-198
196			TPS 012	107	222	513	264	329	13	525	-115
197		Suk ata ni	TPS 001	17	289	426	227	306	10	437	-272
198			TPS 002	80	290	553	280	370	19	567	-210
199			TPS 003	82	258	556	271	340	7	570	-176
200			TPS 004	93	310	587	283	403	16	602	-217
201			TPS 005	31	237	461	227	268	8	473	-206
202			TPS 006	78	221	467	240	299	13	479	-143
203			TPS 007	38	241	477	248	279	17	489	-203
204			TPS 008	68	202	494	260	270	13	507	-134
205			TPS 009	73	263	515	255	336	5	682	-190
206			TPS 010	80	265	522	259	345	13	536	-185
207	Paru ng Kuda	Lan gen Sar i	TPS 001	97	240	516	268	337	11	348	-143
208		Po ndo kka so Lan deu	TPS 002	82	198	453	223	280	9	289	-116
209			TPS 011	71	181	446	224	252	19	271	-110
210	Carin gin	Car ingi n We tan	TPS 004	70	181	437	228	251	0	251	-111
211			TPS 008	37	153	281	155	190	0	190	-116
212		Cije ngk ol	TPS 001	61	237	552	288	298	11	309	-176
213			TPS 002	23	172	407	217	195	28	366	-149
214			TPS 010	52	252	588	316	304	22	326	-200

215		Pasir Dat ar Indah	TPS 001	13	117	206	105	130	4	134	-104
216		Seuseupan	TPS 002	43	330	583	287	373	0	373	-287
217			TPS 003	73	202	448	224	275	0	275	-129
218			TPS 004	47	175	329	167	222	0	222	-128
219			TPS 009	40	225	428	213	265	0	265	-185
220		Sukamulya	TPS 010	82	169	534	263	251	0	251	-87
221		Talaga	TPS 004	70	205	523	271	275	0	275	-135
222			TPS 010	89	209	557	287	298	4	302	-120
223	Cibadak	Cibadak	TPS 013	104	231	584	282	335	11	346	-127
224		Cihulang Tonoggo	TPS 012	57	229	469	234	286	9	295	-172
225			TPS 013	35	249	532	272	284	18	302	-214
226			TPS 014	71	205	550	282	276	16	292	-134
227		Karangtengah	TPS 002	44	243	458	223	287	20	470	-199
228			TPS 003	82	213	491	233	295	13	504	-131
229			TPS 011	116	218	538	262	334	18	552	-102
230			TPS 016	32	243	425	230	275	6	436	-211
231		Sukasirna	TPS 001	56	214	490	254	270	11	503	-158
232			TPS 014	78	198	583	309	276	14	598	-120
233		Tenjoja	TPS 008	54	165	458	250	219	10	470	-111
234			TPS 009	78	191	540	285	269	8	554	-113
235		Warnajati	TPS 004	112	223	518	276	335	17	531	-111
236	Cikeubar	Bojongkeubar	TPS 001	80	263	506	260	343	11	354	-183
237			TPS 015	93	227	536	259	320	19	339	-134
238		Bojongrah arja	TPS 012	58	259	461	231	317	30	347	-201

239		Cibatu	TPS 004	77	234	514	265	311	11	322	-157
240		Cikembar	TPS 012	80	195	446	224	275	13	288	-115
241		Cimanggu	TPS 017	113	239	600	301	352	16	368	-126
242		Kertarahaja	TPS 007	61	204	428	216	265	3	268	-143
243		Parakamlima	TPS 001	92	209	509	249	301	10	311	-117
244			TPS 003	78	220	598	306	298	15	313	-142
245			TPS 006	63	224	528	272	287	17	304	-161
246			TPS 007	37	278	537	268	315	10	325	-241
247			TPS 009	43	156	411	212	199	12	211	-113
248			TPS 012	74	201	460	223	275	16	291	-127
249		Sukamulya	TPS 017	78	241	473	234	319	5	324	-163
250	Nagrak	Babakan Panjang	TPS 006	80	213	455	234	293	21	314	-133
251			TPS 007	24	261	401	205	285	4	289	-237
252		Cihanjarawar	TPS 005	150	264	594	298	414	20	434	-114
253			TPS 006	52	232	401	201	284	13	297	-180
254		Darmareja	TPS 012	78	194	521	271	272	0	272	-116
255		Girijaya	TPS 003	87	197	472	229	284	14	298	-110
256			TPS 005	73	230	587	306	303	20	323	-157
257			TPS 006	57	211	444	224	268	12	280	-154
258			TPS 008	24	347	564	286	371	12	383	-323
259			TPS 009	85	199	495	253	284	26	310	-114
260			TPS 010	57	173	460	239	230	11	241	-116
261			TPS 011	42	206	370	190	248	6	254	-164
262			TPS 012	83	201	492	250	284	15	299	-118

263			TPS 014	67	182	410	213	249	15	264	-115
264			TPS 015	59	218	538	283	277	25	302	-159
265			TPS 017	34	320	580	285	354	12	366	-286
266		Kalapa rea	TPS 002	42	285	490	245	327	30	357	-243
267			TPS 003	49	170	473	239	219	32	251	-121
268			TPS 004	37	169	462	236	206	22	228	-132
269			TPS 005	87	215	552	285	302	18	320	-128
270			TPS 006	129	184	532	267	313	27	340	-55
271			TPS 008	70	200	425	234	270	13	283	-130
272			TPS 010	67	220	407	208	287	12	299	-153
273			TPS 012	60	252	485	256	312	17	329	-192
274		Na gra k Sel ata n	TPS 003	79	221	450	218	300	10	310	-142
275			TPS 009	110	224	533	272	334	14	348	-114
276			TPS 011	95	230	505	262	325	12	337	-135
277		Na gra k Uta ra	TPS 012	82	227	503	246	309	7	316	-145
278			TPS 022	69	255	515	259	324	0	324	-186
279			TPS 023	55	275	509	256	330	5	335	-220
280			TPS 024	26	166	302	154	192	4	196	-140
281			TPS 027	30	293	357	181	323	0	323	-263
282		Pa we nan g	TPS 001	93	228	468	236	321	13	334	-135
283			TPS 002	47	248	447	224	295	10	305	-201
284			TPS 003	57	296	502	263	353	16	369	-239
285			TPS 004	40	280	419	209	320	9	329	-240
286			TPS 005	65	260	500	250	325	34	359	-195
287			TPS 006	48	362	533	276	410	15	425	-314
288			TPS 007	72	264	459	217	336	12	348	-192
289			TPS 008	110	295	555	286	405	21	426	-185
290			TPS 009	93	339	577	303	432	24	456	-246
291	Cisa at	Ba bak an	TPS 006	126	264	572	290	390	17	407	-138

292		Cibatu	TPS 011	130	145	436	210	275	16	291	-15
293		Cibolang Kaler	TPS 001	119	248	507	256	367	15	382	-129
294		Cisaat	TPS 001	92	235	573	281	327	8	335	-143
295			TPS 004	89	228	553	270	317	25	342	-139
296		Gunungjaya	TPS 004	73	188	450	216	261	17	278	-115
297		Kutasirna	TPS 001	84	211	499	264	295	18	313	-127
298		Paadasih	TPS 001	66	237	453	237	303	19	322	-171
299			TPS 002	70	272	449	241	342	10	352	-202
300			TPS 006	112	224	472	253	336	15	351	-112
301			TPS 007	115	241	521	262	356	18	374	-126
302			TPS 015	74	225	416	215	299	12	311	-151
303		Selajambe	TPS 009	58	260	546	265	318	26	344	-202
304		Sukamannah	TPS 016	92	243	495	246	335	0	335	-151
305		Sukaresmi	TPS 010	110	228	506	234	338	22	360	-118
306		Sukasari	TPS 009	125	252	569	281	377	35	412	-127
307			TPS 013	74	201	531	271	275	48	323	-127
308	Gunung Guruh	Cibentang	TPS 006	67	178	556	274	245	33	278	-111
309		Cibolang	TPS 001	17	240	414	211	257	15	272	-223
310		Cikujang	TPS 015	91	251	569	302	342	15	357	-160
311		Gununggruh	TPS 010	89	186	500	241	275	20	295	-97
312			TPS 011	96	199	513	262	295	19	314	-103
313			TPS 015	75	162	553	288	237	19	256	-87

314		Ma ngk ala ya	TPS 004	82	195	415	205	277	17	294	-113
315			TPS 010	38	225	434	216	263	17	280	-187
316			TPS 011	30	187	346	171	217	9	226	-157
317	Kebo n Pede s	Cik aret	TPS 001	90	238	511	251	328	20	348	-148
318			TPS 003	83	201	443	230	284	27	311	-118
319		Ja mb ene ngg ang	TPS 007	59	204	387	186	263	25	288	-145
320			TPS 009	32	218	338	166	250	7	257	-186
321	Suka bumi	Par ung sea h	TPS 001	71	267	494	263	338	9	507	-196
322			TPS 002	39	277	480	233	316	15	492	-238
323			TPS 016	82	214	452	240	296	32	464	-132
324		Per ba wat i	TPS 002	114	252	537	279	366	20	551	-138
325			TPS 004	47	278	446	220	325	17	458	-231
326			TPS 005	59	235	403	201	294	9	414	-176
327			TPS 011	6	200	387	185	206	1	397	-194
328		Su daj aya Gir ang	TPS 007	107	213	581	294	320	19	599	-106
329		Suk aja ya	TPS 001	87	200	427	222	287	13	437	-113
330			TPS 006	76	200	516	259	276	23	529	-124
331		Wa rna sari	TPS 009	110	211	539	276	321	15	551	-101
332			TPS 010	82	185	486	238	267	22	475	-103
333	Suka raja	Lan gen sari	TPS 011	39	164	373	194	203	9	383	-125
334			TPS 012	19	166	304	152	185	13	312	-147
335			TPS 015	71	200	506	252	271	71	519	-129
336		Lim ban gan	TPS 003	86	213	555	268	299	26	569	-127
337			TPS 017	101	137	407	208	238	13	418	-36
338		Mar gal uyu	TPS 003	64	245	550	271	309	73	564	-181
339		Pas irha lan g	TPS 012	38	174	325	161	212	8	220	-136
340			TPS 021	74	201	575	283	275	28	303	-127

341		Sel aa wi	TPS 013	105	229	567	286	334	42	376	-124
342		Sel aw ang i	TPS 011	108	268	591	288	376	20	396	-160
343		Suk araj a	TPS 028	105	249	597	290	354	16	609	-144
344	Pabu aran	Cib ada k	TPS 012	66	259	577	286	325	10	335	-193
345		Ciw alat	TPS 001	70	224	454	223	294	5	299	-154
346			TPS 004	60	248	582	301	308	8	316	-188
347			TPS 006	47	429	585	298	476	4	480	-382
348			TPS 007	41	355	473	255	396	19	415	-314
349		Pa bua ran	TPS 002	72	204	495	244	276	6	282	-132
350		Sir nas ari	TPS 007	68	189	507	259	257	14	271	-121
351		Suk aja ya	TPS 001	50	171	485	239	221	16	237	-121
352			TPS 002	32	271	573	294	303	6	309	-239
353			TPS 003	55	283	552	278	338	15	353	-228
354			TPS 004	47	178	466	240	225	4	229	-131
355			TPS 005	11	192	380	192	203	14	217	-181
356			TPS 006	30	156	406	201	186	7	193	-126
357			TPS 007	43	179	462	225	222	7	229	-136
358	Ciem as	Cib end a	TPS 001	45	296	553	284	341	0	341	-251
359			TPS 002	22	248	439	217	270	0	270	-226
360			TPS 004	62	223	507	250	285	0	285	-161
361			TPS 006	48	217	517	257	265	0	265	-169
362			TPS 007	66	232	489	245	298	0	298	-166
363			TPS 008	14	223	366	188	237	0	237	-209
364			TPS 009	26	262	451	230	288	0	288	-236
365		Cie ma s	TPS 001	13	129	236	111	142	3	145	-116
366			TPS 002	30	177	316	162	207	7	214	-147

367		TPS 004	69	206	539	273	275	8	283	-137
368		TPS 011	30	145	353	180	175	10	185	-115
369	Ciw aru	TPS 001	44	215	412	210	259	7	266	-171
370		TPS 002	31	217	466	227	248	6	254	-186
371		TPS 003	17	260	424	215	277	5	282	-243
372		TPS 004	30	200	445	224	230	10	240	-170
373		TPS 005	62	205	460	221	267	6	273	-143
374		TPS 006	45	214	453	222	259	14	273	-169
375		TPS 007	51	274	598	291	325	18	343	-223
376		TPS 008	48	220	562	275	268	12	280	-172
377		TPS 009	25	223	411	208	248	15	263	-198
378		TPS 010	44	204	490	253	248	13	261	-160
379		TPS 011	65	183	426	226	248	8	256	-118
380		TPS 012	33	223	442	208	256	7	263	-190
381		TPS 015	30	209	411	194	239	9	248	-179
382	Ma ndr aja ya	TPS 001	65	249	463	234	314	0	314	-184
383		TPS 002	26	223	409	210	249	0	249	-197
384		TPS 003	87	232	403	218	319	0	319	-145
385		TPS 005	72	211	509	271	283	0	283	-139
386		TPS 006	17	274	402	217	291	0	291	-257
387		TPS 007	19	239	361	179	258	0	258	-220
388		TPS 008	19	200	401	209	219	0	219	-181
389	Me karj aya	TPS 009	68	184	452	233	252	4	256	-116
390		TPS 012	45	232	551	277	277	13	290	-187
391		TPS 001	75	233	571	280	308	10	318	-158
392		TPS 002	61	241	557	279	302	7	309	-180
393		TPS 003	33	181	502	262	214	6	220	-148
394		TPS 004	48	168	452	224	216	7	223	-120
395		TPS 005	27	198	471	232	225	5	230	-171

396			TPS 007	34	259	599	298	293	13	306	-225
397			TPS 010	42	197	454	227	239	6	245	-155
398		Ta ma nja ya	TPS 001	77	221	564	259	298	0	298	-144
399			TPS 010	27	228	449	229	255	0	255	-201
400			TPS 011	53	175	424	224	228	0	228	-122
401	Cirac ap	Cik ang kun g	TPS 007	79	201	484	238	280	3	283	-122
402		Gu nun gba tu	TPS 001	52	209	482	223	261	8	269	-157
403		Me kar sari	TPS 008	26	200	473	251	226	6	232	-174
404		Pas irpa nja ng	TPS 003	49	165	479	234	214	8	222	-116
405			TPS 008	105	227	531	263	332	5	337	-122
406		Pur wa sed ar	TPS 007	63	178	468	231	241	5	246	-115
407	Jamp ang Kulo n	Boj ong Sar i	TPS 005	56	216	538	261	272	3	275	-160
408			TPS 008	69	208	463	219	277	3	280	-139
409		Boj ong gen ten g	TPS 002	63	240	527	251	303	14	317	-177
410		Cik ara ng	TPS 002	45	163	397	204	208	5	213	-118
411			TPS 003	71	199	481	241	270	15	285	-128
412		Cik ara ngg eus an	TPS 001	59	233	541	271	292	12	304	-174
413			TPS 002	71	188	510	261	259	9	268	-117
414		Cip ara y	TPS 001	56	199	485	227	255	13	268	-143
415			TPS 003	58	202	433	212	260	5	265	-144
416			TPS 006	59	233	477	228	292	5	297	-174
417			TPS 008	85	196	506	262	281	2	283	-111
418		Kar ang any ar	TPS 004	42	163	501	271	205	3	208	-121

419		Me karj aya	TPS 005	28	265	483	236	293	15	308	-237
420			TPS 006	41	224	481	228	265	6	271	-183
421		Na gra k Sar i	TPS 007	81	221	484	238	302	6	308	-140
422			TPS 011	38	223	451	219	261	7	268	-185
423		Pa daj aya	TPS 005	47	164	481	242	211	6	217	-117
424		Tan jun g	TPS 006	37	211	473	249	248	7	255	-174
425	Kalib unde r	Bal eka mb ang	TPS 008	20	189	588	311	209	10	219	-169
426		Sek ars ari	TPS 004	47	169	464	243	216	18	234	-122
427			TPS 005	11	184	488	257	195	3	198	-173
428			TPS 007	25	163	342	178	188	8	196	-138
429		Suk alu yu	TPS 005	49	173	436	210	222	6	228	-124
430			TPS 007	47	175	399	192	222	3	225	-128
431			TPS 008	48	245	495	246	293	8	301	-197
432	Sura de	Cip eun deu y	TPS 002	43	159	360	183	202	7	209	-116
433			TPS 005	43	229	539	269	272	7	279	-186
434			TPS 007	35	197	358	180	232	3	235	-162
435		Cit ang lar	TPS 002	33	236	597	303	269	11	612	-203
436			TPS 003	65	222	528	264	287	11	542	-157
437			TPS 004	41	201	355	189	242	8	364	-160
438			TPS 005	72	182	472	225	254	6	484	-110
439			TPS 006	62	183	408	193	245	7	418	-121
440			TPS 011	27	206	412	208	233	7	423	-179
441			TPS 013	20	158	207	101	178	0	178	-138
442		Jag am ukti	TPS 009	118	242	599	305	360	11	614	-124
443		Ka dal em an	TPS 002	131	144	581	289	275	17	292	-13
444			TPS 004	91	201	593	295	292	6	298	-110

445			TPS 005	68	136	592	297	204	36	240	-68
446			TPS 006	100	131	452	233	231	8	239	-31
447			TPS 007	34	97	214	104	131	6	137	-63
448			TPS 008	105	224	564	280	329	4	333	-119
449		Pasir Ipi	TPS 005	82	265	588	292	347	6	353	-183
450			TPS 012	78	207	525	271	285	8	539	-129
451			TPS 015	32	217	419	204	249	6	430	-185
452			TPS 017	53	178	440	217	231	0	450	-125
453		Surade	TPS 008	91	209	523	261	300	8	535	-118
454		Wanari	TPS 002	57	196	506	251	253	6	259	-139
455			TPS 005	37	240	498	244	277	7	284	-203
456			TPS 007	24	164	471	242	188	7	195	-140
457	Bantardug	Bantardug	TPS 001	20	293			313	7	320	-273
458			TPS 002	9	268			277	3	280	-259
459			TPS 004	8	183			191	3	194	-175
460			TPS 005	19	143			162	6	168	-124
461		Limunggal	TPS 006	42	182			224	10	234	-140
462			TPS 008	48	187			235	7	242	-139
463			TPS 009	37	160			197	4	201	-123
464			TPS 010	18	151			169	2	171	-133
465	Cikak	Cikak	TPS 002	79	183			262	8	270	-104
466		Cimaja	TPS 010	52	135			187	7	194	-83
467		Margalaksana	TPS 001	52	187			239	2	241	-135
468			TPS 002	35	230			265	1	266	195
469			TPS 006	72	120			192	14	206	-48
TOTAL				28.818	102.934	220.039	111.521	131.752	5.682	161.310	-73.726

4. Bahwa tabel data perolehan suara di 469 TPS yang tersebar di 27 kecamatan se-Kabupaten sukabumi tersebut diatas, patut diduga telah

terpengaruhi oleh dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan no urut 2 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga perolehan suara di 469 TPS tersebut, sudah sepantasnya dianulir atau dianggap cacat atau tidak sah atau setidaknya-tidaknya haruslah diuji kembali melalui proses pemungutan suara ulang.

5. Bahwa apabila rekapitulasi suara akhir pemilihan Bupati dan wakil bupati Sukabumi dihitung dari total 4.318 TPS dikurangi 469 TPS, atau dihitung dari 3.822 TPS, maka seharusnya perolehan suara Pemohon unggul dari perolehan suara No. urut 2, yakni dengan kalkulasi Suara Pemohon adalah sejumlah 470.172 suara, sementara perolehan suara No.urut 2 sejumlah 461.928 suara, sehingga selisih keunggulan perolehan suara No.urut 1 atau pemohon dari Perolehan suara No.2 adalah sejumlah 8.244 suara.
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termuat dalam posita nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, menunjukan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang terjadi di kurang lebih di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dari total keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Adapun terjadinya pelanggaran secara TSM di 27 kecamatan tersebut yakni :
 1. Kecamatan Palabuhanratu
 2. Kecamatan Ciemas
 3. Kecamatan Cicurug
 4. Kecamatan Cisolok
 5. Kecamatan Cidahu
 6. Kecamatan Kabandungan
 7. Kecamatan Bojonggenteng
 8. Kecamatan Parungkuda
 9. Kecamatan Simpenan
 10. Kecamatan Nagrak
 11. Kecamatan Kalibunder
 12. Kecamatan Ciracap
 13. Kecamatan Gunungguruh
 14. Kecamatan Bantargadung
 15. Kecamatan Sukaraja

16. Kecamatan Cikakak
17. Kecamatan Parakansalak
18. Kecamatan Caringin
19. Kecamatan Cibadak
20. Kecamatan Jampangkulon
21. Kecamatan Surade
22. Kecamatan Kebonpedes
23. Cisaat
24. Kecamatan Kalapanunggal
25. Cikembar
26. Kecamatan Pabuaran
27. Kecamatan Sukabumi

Sebagaimana terjadi pada Kecamatan dengan uraian peristiwa dan saksi pada kecamatan sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Marwan Hamami adalah seorang Bupati Sukabumi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang merupakan Partai Pengusung dan sekaligus sebagai Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 2 Drs H. Asep Japar dan Andreas SE diduga tidak melakukan cuti, ketika masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung (Bukti terlampir);
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran Terstruktur Sistemis dan Massif di dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024 yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Drs. H Asep Japar, MM., dan H. Andreas, SE., yang dibantu oleh Bupati Sukabumi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa ada pidato dari Bupati Sukabumi (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi) yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon nomor urut 2 bertempat di Gor Venue tinju dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah yang pesertanya dihadiri oleh kepala dusun se Kabupaten Sukabumi pada tanggal 26 Agustus 2024 yang mengarahkan para kepala dusun dengan semboyan “lanjutkan” yang merupakan salah satu jargon pasangan nomor urut 2 (Bukti Video terlampir);
4. Bahwa ada pidato Bupati Sukabumi dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada tanggal 12 November 2024 di Palabuhanratu yang mengarahkan

- Aparat Sipil Negara (ASN) untuk tidak bersikap netral/memberikan dukungan melalui jargon jargon pasangan nomor urut 2 (Bukti Video terlampir);
5. Bahwa ada Kegiatan Geopark Ciletuh Spektakuler di desa Mandrajaya pada tanggal 9 november 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang diduga syarat kepentingan untuk pasangan calon nomor urut 2 dibuktikan dengan memberikan simbol salam dua jari sebagai dukungan kepada pasangan nomor urut 2 (Bukti terlampir);
 6. Bahwa ada Pemberian Hibbah APBD Kabupaten Sukabumi dari Bupati Sukabumi kepada yayasan dan lembaga Keagamaan pada masa kampanye pilkada 2024 yaitu tanggal 7 November 2024 sebesar 32.785.000.000 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang syarat kepentingan untuk pasangan calon nomor urut 2 oleh karena Bupati Sukabumi melekat sebagai Tim Sukses Paslon no. 2;
 7. Bahwa ada Surat Keputusan Bupati Sukabumi nomor 800.1.3.2/kep.687/BPKSDM/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setingkat eselon II.B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada masa tahapan Pilkada 2024, yang syarat kepentingan oleh karena Bupati Sukabumi melekat sebagai Tim Sukses Paslon No. 2, dan melanggar Pasal 71 (2) undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada (Bukti Release SK terlampir);
 8. Bahwa ada Surat Keputusan Bupati Sukabumi nomor 800.1.3.2/kep.783/BPKSDM/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Administratur (Camat) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada masa tahapan pilkada 2024, yang syarat kepentingan oleh karena Bupati Sukabumi melekat sebagai Tim Sukses Paslon No. 2, dan melanggar Pasal 71 (2) undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada (Bukti Realease SK terlampir);
 9. Bahwa ada ketidaknetralan salah satu aparat Desa Benda Kecamatan Cicurug Sukabumi atas nama Ilyas Permana sebagai KASI perencanaan Desa Benda Kecamatan Cicurug Sukabumi Tanggal 27 November 2024, karena mendukung secara terang terangan dengan menunjukkan salam 2 jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon No. Urut 2 (Bukti Foto terlampir);

10. Bahwa telah terjadi pembagian sabun Cuci Piring di Desa gunung tanjung Kecamatan Cisolok yang dibuktikan dengan adanya tempelan sticker pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 26 November 2024 (Bukti Foto terlampir);
11. Bahwa Kepala Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu atas nama Opik terbukti tidak netral dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan screenshot Whatsapp, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mendukung pasangan calon nomor urut 2 secara terang-terangan, dengan cara menyebarkan broadcasted WA kepada lembaga-lembaga yang berada di PEMDES Desa JAYABAKTI agar patuh mengikuti perintah yang bersangkutan untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut. 2, Tertanggal 25 November 2024 (Bukti Surat dan SCREENSHOT WA terlampir);
12. Bahwa Kepala Desa Pulosari kalapanunggal atas nama (Dirja Miharja) telah tidak netral secara terang terangan dengan menunjukkan salam 2 jari sebagai symbol dukungan kepada Pasangan Calon No. Urut 2 pada tanggal 21 Oktober 2024. (Bukti foto terlampir);
13. Bahwa Kepala Desa Cianaga (Wardi Sutandi) Kecamatan Kabandungan tidak netral dibuktikan dengan adanya voice note keberpihakan yang bersangkutan kepada pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 20 November 2024 (Bukti Voice note terlampir);
14. Bahwa Kepala Desa Tugu Bandung (Yudi Guntara) Kecamatan Kabandungan tidak netral dibuktikan dengan voice note keberpihakan yang bersangkutan kepada pasangan Calon No. Urut 2 pada tanggal 18 November 2024 (Bukti voice note terlampir);
15. Bahwa Kepala Desa Cipanengah (Yusuf alias Yusef alias Utek) Kecamatan Bojong Genteng tidak netral dibuktikan dengan Video Tiktok (VT) berupa Screen Shot yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengantar pasangan calon nomor urut 2 ketempat kegiatan kampanye pada tanggal 15 Oktober 2024 (Bukti SCREENSHOT VT terlampir);
16. Bahwa Kepala Desa (Muhammad Yusuf) dan staff Desa Kadununggal Kecamatan Kalapanunggal tidak netral dibuktikan oleh foto yang melakukan salam 2 jari sebagai dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 22 Oktober 2024 (Bukti Foto terlampir);

17. Bahwa Staff Desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda tidak netral mengarahkan warga untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2, dibuktikan dengan voice note, diketahui pada tanggal 28 November 2024 (Bukti Voice note terlampir);
18. Bahwa Kepala Desa Cidadap (Deden Anta Nurman) Kecamatan Simpenan tidak netral karena yang bersangkutan ucapan selamat kepada pasangan calon nomor urut 2 diketahui pada tanggal 25 November 2024 dibuktikan dengan video (Bukti Video terlampir);
19. Bahwa Mantan Kepala Desa Pawenang (Hilman Nulhakim) Kecamatan Nagrak sekaligus Ketua Relawan Rajapati (Relawan Pasangan calon nomor 2) membagi-bagikan uang sebanyak jutaan rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- an kepada tokoh agama Desa Cihanjawa Kecamatan Nagrak Kampung Lemah Neundeut dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
20. Bahwa telah terjadi pembagian minyak goreng dan sabun cuci piring oleh Timses Paslon 02 di Kecamatan Kalibunder untuk memilih Paslon no 2 pada tanggal 26 November 2024 dibuktikan dengan Video dan foto (Bukti Video dan foto terlampir);
21. Bahwa ada pembagian Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap oleh Timses Paslon 02 untuk memilih Paslon no 2 terjadi pada tanggal 26 November 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti video terlampir);
22. Bahwa Kepala Desa Gunung Guruh (Panji Purnama) Kecamatan Gunungguruh tidak netral dibuktikan dengan yang bersangkutan memakai baju kaos Paslon no 2 (Bukti foto dan FB terlampir);
23. Bahwa di Kecamatan Bantargadung terjadi pembagian sembako yang bertuliskan Marwan Hamami selaku Timses Paslon 02 untuk mengarahkan warga memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 26 November 2024 dibuktikan oleh foto dan tangkapan layar percakapan (Bukti foto terlampir);
24. Bahwa Wakil Ketua BPD Desa Margaluyu (Hendi Lesmana) Kecamatan Sukaraja tidak netral karena melakukan kampanye bersama Paslon 02 Asjap, diketahui pada tanggal 30 November 2024 dibuktikan dengan Video. (Bukti video terlampir);

25. Bahwa Ketua IPHI Kecamatan Cidahu (H. Encub) pada masa kampanye melakukan kampanye Paslon nomor urut 2 di sarana keagamaan di Wilayah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi diketahui pada tanggal 25 November 2024 dibuktikan dengan video (Bukti video terlampir);
26. Bahwa para Kepala Desa Sekecamatan Cikakak, yaitu Kades Cirendang (Abdul Aziz), Kades Gandasoli (Ece Kurniawan), Kades Cimaja (R Wahyu Cakraningrat), Kades Cileungsir (Asep Ahmad Sobandi), Kades Rido Galih (Desi Safari) diketahui pada tanggal 27 November 2024 memberikan pernyataan dukungan pada paslon nomor 2 bertempat di kediaman Calon Bupati Nomor 2 (Asep Japar) dibuktikan dengan video (Bukti video terlampir);
27. Bahwa Ketua DPC APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sukabumi atas nama Deden Deni Wahyudin (Kepala Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak) dan Ketua Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi atas nama Aum Ruhyadi sekaligus yang bersangkutan menjabat Kepala Desa Padasih Kecamatan Cisaat melakukan deklarasi mendukung Asep Japar di rumah Deden Deni Wahyudi di Desa Sukakersa kecamatan Parakansalak diketahui pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan foto dan video (Bukti foto dan video terlampir);
28. Bahwa Kepala Desa Kalaparea (Heri Kurniawan), Kecamatan Nagrak tidak netral dan melakukan intimidasi kepada pimpinan sebuah perusahaan swasta berupa ancaman pemecatan kepada karyawan perusahaan peternakan ayam di Kalaparea kecamatan Nagrak yang menjadi pendukung paslon nomor urut 1, sebagai diketahui pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan voice note (Bukti voice note terlampir);
29. Bahwa Kepala UPTD Pasar Palabuhanratu (Uus Heryanto) tidak netral dengan memberikan pengarahannya untuk mendukung Paslon Nomor 2 dibuktikan dengan voice note diketahui pada tanggal 27 November 2024 (Bukti voice note terlampir);
30. Bahwa ada Whatsapp Group yang bernama "Kades AA Well" yang beranggotakan para Kepala Desa pendukung paslon no 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan foto atau tangkapan layar (Bukti foto terlampir);

31. Bahwa Kepala Desa Pasir Datar Indah (Samsul) Kecamatan Caringin tidak netral dengan menuliskan komentar pada chat group WA mendukung paslon nomor 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan foto atau tangkapan layar (Bukti Foto terlampir);
32. Bahwa Kepala Desa Karang Tengah (Agung Pratama Putra) beserta perangkat desa tidak netral dengan melakukan selebrasi kemenangan pada tanggal 28 November 2024 dibuktikan dengan foto dan video (Bukti foto dan video terlampir);
33. Bahwa ada pembagian Minyak Goreng dan kaos paslon nomor urut 2 terjadi di Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap kepada warga untuk memilih paslon 02 pada tanggal 26 November 2024, dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
34. Bahwa Kepala Desa Ciheulang Tonggoh (Yudi Mulyadi) Kecamatan Cibadak tidak netral memberikan dukungan dengan hadir pada kampanye paslon no 2 dan berfoto bersama paslon no 2 serta melakukan deklarasi dukungan bersama staf desa kepada paslon 02, diketahui pada tanggal 28 November 2024 dibuktikan dengan foto dan video (Bukti foto dan video terlampir);
35. Bahwa Camat Jampang Kulon (Dading) mengarahkan staf pegawai kecamatan untuk mendukung paslon nomor 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan voice note dan video (Bukti voice note dan video terlampir);
36. Bahwa Kepala Desa Padajaya (Ade Hermawan) Kecamatan Surade tidak netral dengan berfoto memberikan salam 2 jari paslon no 2, diketahui pada tanggal 25 November 2024 dibuktikan dengan foto dan video (Bukti foto terlampir);
37. Bahwa Pengawas Kelurahan Desa Benda Cicurug nyata nyata tidak netral dengan memberikan symbol 2 jari sebagai bentuk keberpihakan kepada Paslon No. 2 pasca pencoblosan, diketahui pada tanggal 28 November 2024 dibuktikan dengan foto dan video (Bukti foto dan video terlampir);
38. Bahwa Kepala Desa Cikaret (Usep Saepurohmat), Kepala Desa Jambe Nenggang (Hilman Permana) Kecamatan Kebon Pedes tidak netral dibuktikan dengan berfoto dengan paslon nomor 2 dan Dirut Pesona Wisata (Ase Riyadi) diketahui pada tanggal 27 November 2024 (Bukti foto terlampir);

39. Bahwa Kepala Desa Cijengkol (Oban Sobandi), Kecamatan Caringin pada tanggal 30 Oktober 2024 (Rabu Malam Kamis) menghadiri dan mengikuti deklarasi dukungan kepada paslon nomor 2 dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sedapil III (Tiga) yang bertempat di Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cibadak, dibuktikan dengan video (Bukti video terlampir);
40. Bahwa Kepala Desa Sukamulya (Mahdan Z.A) Kecamatan Caringin dan Kepala Desa Cijengkol (Oban Sobandi) Kecamatan Caringin pada tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di Mushala Kantor Kepolisian Sektor Caringin dengan sengaja dan tegas mengucapkan Jargon dan memberikan isyarat dengan gerakan tangan 2 jari sebagai keberpihakan atau dukungan pada paslon nomor urut 2, Dibuktikan dengan video (Bukti video terlampir);
41. Bahwa Kepala Desa Cimaja (R. Wahyu Cakraningrat) Kecamatan Cikakak tidak netral dengan menghadiri kegiatan paslon no urut 2 di rumah kediaman anggota DPRD Fraksi Golkar Rika Yulistina, diketahui pada tanggal 25 November 2024 dibuktikan dengan video (Bukti video terlampir);
42. Bahwa Ketua DPC APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sukabumi atas nama Deden Deni Wahyudin dan Ketua Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi atas nama Aum Ruhyadi sekaligus bersangkutan menjabat Kepala Desa Padasih dan Sukakersa melakukan deklarasi mendukung Asep Japar Rumah Makan Joglo Kota Sukabumi, diketahui pada tanggal 10 November 2024 dibuktikan dengan foto dan video (Bukti foto dan video terlampir);
43. Bahwa Kepala Desa Mandarajaya (Ajat) Kecamatan Ciemas melakukan pengumpulan warga untuk mendukung paslon nomor 2 diketahui pada tanggal 25 November 2024 dibuktikan dengan video (Bukti video terlampir);
44. Bahwa terjadi pembagian Sembako oleh Anggota DPRD Fraksi PAN atas nama Mansurudin kepada warga untuk memilih paslon no urut 02, diketahui pada tanggal 20 November 2024 bertempat di Kantor DPD PAN Palabuhanratu dibuktikan dengan foto dan video (Bukti foto dan video terlampir);
45. Bahwa ada pertemuan Kepala Desa Nagrak Selatan (Tutang Setiawan) dengan Calon Bupati atas nama Asep Japar untuk mendukung paslon no urut

- 02, diketahui pada tanggal 3 Desember 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
46. Bahwa ada pertemuan para Kepala Desa yaitu Kepala Desa Sukatani, Kepala Desa Buniwangi (Dadan), Kepala Desa Gunung Sungging (Nanang), kepala Desa Cipeundeuy (Bakang), Kepala Desa Warnasari (Sudarmi), kepala Desa Pasir Ipis (Nandang) Kecamatan Surade di kediaman Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi dengan memakai baju bergambar Asep Japar diketahui pada tanggal 25 November 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
 47. Bahwa telah terjadi pembagian sembako minyak goreng dan sabun cuci di Desa Babakan Jaya dan Desa Pondok Kaso Landeuh Kecamatan Parungkuda dari tim kampanye pasangan calon nomor 2 kepada warga setempat untuk memilih paslon no urut 2, diketahui pada tanggal 26 November 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
 48. Bahwa telah terjadi indikasi penggelembungan suara di TPS 8 Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu, dari sampling berbagai TPS yang diduga ada penggelembungan suara, serta pemalsuan tanda-tangan pemilih oleh penyelenggara pada tanggal 27 November 2024 (Bukti foto terlampir);
 49. Bahwa ada pesan berantai di Media Sosial WA yang di sampaikan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Sukabumi untuk mengintruksikan Kepala Desa mendukung paslon nomor 2, pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
 50. Bahwa telah terjadi Money Politik di Gg Ajid Cimaja 003/002 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dengan mengatasnamakan Paslon No. Urut 2 kepada warga untuk memilih paslon no 2, pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan Video dan foto (bukti video dan foto terlampir);
 51. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 telah beredar dimedia sosial hasil hitung cepat versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yang mana hal tersebut mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU, dibuktikan dengan foto Screenshot (Bukti foto terlampir);

52. Bahwa telah terjadi pembagian sabun cuci piring dengan stiker paslon no urut 2, di Kampung Pamatutan RT 23, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Bojonggenteng dari Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 2 kepada warga setempat untuk memilih paslon no urut 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
53. Bahwa terjadi pembagian sabun cuci piring di Desa Kertaraharja kecamatan cikembar yang bersticker pasangan nomor urut 2 dari timses pasangan calon nomor 2 kepada warga untuk memilih paslon no urut 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan foto (bukti foto terlampir);
54. Bahwa Staff Kesekretarian Dinas PU Kabupaten Sukabumi atas nama Wahyu melakukan Foto bersama rekan-rekannya berlatarbelakang baligho Gambar Paslon no urut 2 Asep dikediaman Asep Japar sebagai bentuk dukungan, diketahui pada tanggal 28 Nopember 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
55. Bahwa Staff Kesekretarian Dinas PU Kabupaten Sukabumi atas nama Wahyu melakukan Foto bersama Calon Bupati Asep Japar pada ragkaian kegiatan Turnamen Sepakbola di Kecamatan Cisolok, diketahui pada tanggal 28 Nopember 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
56. Bahwa Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Sukabumi atas nama Herdi Somantri alias Bima melakukan Foto bersama rekannya dengan menggunakan Kaos Calon Buoati Asep Japar, diketahui pada tanggal 28 Nopember 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
57. Bahwa Kepala Desa Karangpapak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atas nama Asep Supriatna melakukan Foto bersama warga dengan menggunakan kaos Calon Bupati Asep Japar pada ragkaian kegiatan Turnamen Sepakbola, diketahui pada tanggal 28 Nopember 2024 dibuktikan dengan foto (Bukti foto terlampir);
58. Bahwa kepala Desa Langensari kecamatan Sukaraja atas nasihin telah membuat pernyataan dukungan pada bulan oktober 2024, diketahui tanggal 30 November 2024 kepada pasangan calon nomor urut 2 Asep Japar dan Andreas (bukti foto terlampir);
59. Bahwa Kepala Desa Ciwalat Pabuaran atas nama Usep tidak netral dibuktikan dengan foto salam 2 jari yang merupakan nomor urut pasangan

calon Asep Japar dan Andreas diketahui tanggal 30 November 2024 (bukti foto terlampir) ;

60. Bahwa Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran atas nama Dede Hidayat tidak netral dibuktikan dengan foto salam 2 jari yang merupakan nomor urut pasangan calon Asep Japar dan Andreas diketahui tanggal 30 November 2024 (bukti foto terlampir);

61. Bahwa Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran atas nama Bambang Gunawan tidak netral dibuktikan dengan tangkapan foto layar facebook ucapan selamat atas terpilihnya pasangan no urut 2 padahal belum ada penetapan KPU Kabupaten Sukabumi diketahui tanggal 30 November 2024 (bukti foto terlampir);

62. Bahwa telah terjadi persiapan pembagian sembako pasangan nomor urut 2 di aula rapat Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi (bukti Video terlampir);

7. Bahwa terhadap dugaan TSM sebagaimana dijelaskan dalam posita nomor 4 (empat), kami telah dan atau sedang mengajukan permohonan pelaporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi dengan Tanda Bukti Penyampaian Nomor: 01/PL/TSM-PB/13.24/XII/2024, dan Pemberitahuan Perbaikan Laporan Nomor: 004/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB, **sepanjang** perolehan suara pasangan calon di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan sebagaimana dalam posita nomor 4 (empat).;

3. Memerintahkan Termohon untuk **membuka seluruh daftar hadir pemilih** di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Sukabumi, serta menyelenggarakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** di 469 TPS yang tersebar di 27 (dua puluh Kecamatan), sebagaimana tabel berikut:

No	KECAMATAN	DESA	TPS
1	Cisolok	Caringin	TPS 009
2			TPS 011
3		Cicadas	TPS 008
4			TPS 009
5			TPS 010
6		Cisolok	TPS 008
7		Gunungkaramat	TPS 003
8			TPS 004
9		Gunungtanjung	TPS 004
10		Karangpapak	TPS 002
11			TPS 005
12			TPS 008
13			TPS 009
14		Pasir Baru	TPS 009
15			TPS 010
16		Sirnaresmi	TPS 005
17			TPS 006
18			TPS 007
19			TPS 008
20		Sukarame	TPS 005
21		Wanajaya	TPS 003
22		Wangunsari	TPS 001
23	Pelabuhan Ratu	Cibodas	TPS 008
24			TPS 013
25		Cikadu	TPS 006
26		Citarik	TPS 006

27		Pasirsuren	TPS 016
28		Pelabuhan Ratu	TPS 024
29			TPS 026
30		Tonjong	TPS 013
31	Simpenan	Cidadap	TPS 012
32			TPS 015
33			TPS 022
34			TPS 024
35			TPS 026
36		Kertajaya	TPS 014
37		Loji	TPS 001
38			TPS 004
39			TPS 009
40			TPS 010
41			TPS 011
42			TPS 012
43		Mekar Asih	TPS 003
44	Bojong Genteng	Cibodas	TPS 013
45		Cipanengah	TPS 001
46			TPS 002
47			TPS 005
48	Cicurug	Benda	TPS 001
49			TPS 002
50			TPS 003
51			TPS 004
52			TPS 005
53			TPS 006
54			TPS 008
55			TPS 010
56			TPS 011
57			TPS 012
58			TPS 016

59		TPS 017
60		TPS 018
61		TPS 019
62		TPS 024
63		TPS 025
64	Caringin	TPS 004
65		TPS 005
66		TPS 006
67		TPS 008
68		TPS 009
69		TPS 010
70	Cisaat	TPS 002
71		TPS 006
72		TPS 014
73		TPS 017
74	Kutajaya	TPS 003
75		TPS 004
76		TPS 016
77		TPS 017
78		TPS 019
79		TPS 025
80		TPS 027
81		TPS 028
82	Mekarsari	TPS 006
83		TPS 007
84	Pasawahan	TPS 002
85		TPS 004
86		TPS 007
87		TPS 009
88		TPS 011
89		TPS 012
90		TPS 015

91		Purwasari	TPS 001
92			TPS 009
93			TPS 010
94		Tenjolaya	TPS 004
95			TPS 005
96			TPS 011
97	Cidahu	Cidahu	TPS 002
98			TPS 004
99			TPS 005
100			TPS 006
101			TPS 007
102			TPS 008
103			TPS 010
104			TPS 011
105			TPS 012
106			TPS 014
107			TPS 015
108			TPS 016
109			TPS 017
110		Girijaya	TPS 002
111			TPS 004
112			TPS 005
113			TPS 006
114			TPS 007
115			TPS 008
116			TPS 009
117			TPS 012
118			TPS 015
119		Jayabakti	TPS 001
120			TPS 002
121			TPS 004
122			TPS 005

123		TPS 007
124		TPS 008
125		TPS 009
126		TPS 011
127		TPS 014
128		TPS 016
129		TPS 017
130	Pasir Doton	TPS 001
131		TPS 002
132		TPS 003
133		TPS 004
134		TPS 005
135		TPS 006
136		TPS 010
137	Pondokaso Tengah	TPS 003
138		TPS 004
139		TPS 005
140		TPS 006
141		TPS 007
142		TPS 009
143		TPS 012
144	Pondokaso Tonggoh	TPS 001
145		TPS 003
146		TPS 004
147		TPS 005
148		TPS 006
149		TPS 007
150		TPS 011
151	Tangkil	TPS 001
152		TPS 003
153		TPS 006
154		TPS 007

155			TPS 008
156			TPS 009
157			TPS 011
158			TPS 012
159			TPS 014
160	Kabandungan	Cianaga	TPS 001
161			TPS 002
162			TPS 003
163		Cipeuteuy	TPS 011
164		Tugubandung	TPS 006
165	Kalapa Nunggal	Palasari Girang	TPS 002
166			TPS 003
167			TPS 006
168			TPS 010
169		Pulosari	TPS 009
170			TPS 012
171			TPS 013
172			TPS 014
173		Walang Sari	TPS 002
174			TPS 007
175			TPS 008
176			TPS 010
177	Parakan Salak	Bojong Asih	TPS 003
178			TPS 004
179			TPS 006
180			TPS 007
181		Bojong Longok	TPS 001
182		Lebaksari	TPS 007
183		Parakan Salak	TPS 008
184			TPS 010
185			TPS 011
186		Sukakersa	TPS 001

187			TPS 002
188			TPS 003
189			TPS 004
190			TPS 005
191			TPS 006
192			TPS 007
193			TPS 008
194			TPS 009
195			TPS 011
196			TPS 012
197		Sukatani	TPS 001
198			TPS 002
199			TPS 003
200			TPS 004
201			TPS 005
202			TPS 006
203			TPS 007
204			TPS 008
205			TPS 009
206			TPS 010
207	Parung Kuda	Langen Sari	TPS 001
208		Pondokkaso Landeu	TPS 002
209			TPS 011
210	Caringin	Caringin Wetan	TPS 004
211			TPS 008
212		Cijengkol	TPS 001
213			TPS 002
214			TPS 010
215		Pasir Datar Indah	TPS 001
216		Seuseupan	TPS 002
217			TPS 003
218			TPS 004

219			TPS 009
220		Sukamulya	TPS 010
221		Talaga	TPS 004
222			TPS 010
223	Cibadak	Cibadak	TPS 013
224		Ciheulang Tonggoh	TPS 012
225			TPS 013
226			TPS 014
227		Karangtengah	TPS 002
228			TPS 003
229			TPS 011
230			TPS 016
231		Sukasirna	TPS 001
232			TPS 014
233		Tenjojaya	TPS 008
234			TPS 009
235		Warnajati	TPS 004
236	Cikembar	Bojongkembar	TPS 001
237			TPS 015
238		Bojongraharja	TPS 012
239		Cibatu	TPS 004
240		Cikembar	TPS 012
241		Cimanggu	TPS 017
242		Kertaraharja	TPS 007
243		Parakanlima	TPS 001
244			TPS 003
245			TPS 006
246			TPS 007
247			TPS 009
248			TPS 012
249		Sukamulya	TPS 017
250	Nagrak	Babakan Panjang	TPS 006

251		TPS 007
252	Cihanjawar	TPS 005
253		TPS 006
254	Darmareja	TPS 012
255	Girijaya	TPS 003
256		TPS 005
257		TPS 006
258		TPS 008
259		TPS 009
260		TPS 010
261		TPS 011
262		TPS 012
263		TPS 014
264		TPS 015
265		TPS 017
266	Kalaparea	TPS 002
267		TPS 003
268		TPS 004
269		TPS 005
270		TPS 006
271		TPS 008
272		TPS 010
273		TPS 012
274	Nagrak Selatan	TPS 003
275		TPS 009
276		TPS 011
277	Nagrak Utara	TPS 012
278		TPS 022
279		TPS 023
280		TPS 024
281		TPS 027
282	Pawenang	TPS 001

283			TPS 002
284			TPS 003
285			TPS 004
286			TPS 005
287			TPS 006
288			TPS 007
289			TPS 008
290			TPS 009
291	Cisaat	Babakan	TPS 006
292		Cibatu	TPS 011
293		Cibolang Kaler	TPS 001
294		Cisaat	TPS 001
295			TPS 004
296		Gunungjaya	TPS 004
297		Kutasirna	TPS 001
298		Padaasih	TPS 001
299			TPS 002
300			TPS 006
301			TPS 007
302			TPS 015
303		Selajambe	TPS 009
304		Sukamanah	TPS 016
305		Sukaresmi	TPS 010
306		Sukasari	TPS 009
307			TPS 013
308	Gunung Guruh	Cibentang	TPS 006
309		Cibolang	TPS 001
310		Cikujang	TPS 015
311		Gunungguruh	TPS 010
312			TPS 011
313			TPS 015
314		Mangkalaya	TPS 004

315			TPS 010
316			TPS 011
317	Kebon Pedes	Cikaret	TPS 001
318			TPS 003
319		Jambenenggang	TPS 007
320			TPS 009
321	Sukabumi	Parungseah	TPS 001
322			TPS 002
323			TPS 016
324		Perbawati	TPS 002
325			TPS 004
326			TPS 005
327			TPS 011
328		Sudajaya Girang	TPS 007
329		Sukajaya	TPS 001
330			TPS 006
331		Warnasari	TPS 009
332			TPS 010
333	Sukaraja	Langensari	TPS 011
334			TPS 012
335			TPS 015
336		Limbangan	TPS 003
337			TPS 017
338		Margaluyu	TPS 003
339		Pasirhalang	TPS 012
340			TPS 021
341		Selaawi	TPS 013
342		Selawangi	TPS 011
343		Sukaraja	TPS 028
344	Pabuaran	Cibadak	TPS 012
345		Ciwalat	TPS 001
346			TPS 004

347			TPS 006
348			TPS 007
349		Pabuaran	TPS 002
350		Sirnasari	TPS 007
351		Sukajaya	TPS 001
352			TPS 002
353			TPS 003
354			TPS 004
355			TPS 005
356			TPS 006
357			TPS 007
358	Ciemas	Cibenda	TPS 001
359			TPS 002
360			TPS 004
361			TPS 006
362			TPS 007
363			TPS 008
364			TPS 009
365		Ciemas	TPS 001
366			TPS 002
367			TPS 004
368			TPS 011
369		Ciwaru	TPS 001
370			TPS 002
371			TPS 003
372			TPS 004
373			TPS 005
374			TPS 006
375			TPS 007
376			TPS 008
377			TPS 009
378			TPS 010

379			TPS 011
380			TPS 012
381			TPS 015
382		Mandrajaya	TPS 001
383			TPS 002
384			TPS 003
385			TPS 005
386			TPS 006
387			TPS 007
388			TPS 008
389		Mekarjaya	TPS 009
390			TPS 012
391			TPS 001
392			TPS 002
393			TPS 003
394			TPS 004
395			TPS 005
396			TPS 007
397			TPS 010
398		Tamanjaya	TPS 001
399			TPS 010
400			TPS 011
401	Ciracap	Cikangkung	TPS 007
402		Gunungbatu	TPS 001
403		Mekarsari	TPS 008
404		Pasirpanjang	TPS 003
405			TPS 008
406		Purwasedar	TPS 007
407	Jampang Kulon	Bojong Sari	TPS 005
408			TPS 008
409		Bojonggenteng	TPS 002
410		Cikarang	TPS 002

411			TPS 003
412		Cikaranggeusan	TPS 001
413			TPS 002
414		Ciparay	TPS 001
415			TPS 003
416			TPS 006
417			TPS 008
418		Karanganyar	TPS 004
419		Mekarjaya	TPS 005
420			TPS 006
421		Nagrak Sari	TPS 007
422			TPS 011
423		Padajaya	TPS 005
424		Tanjung	TPS 006
425	Kalibunder	Balekambang	TPS 008
426		Sekarsari	TPS 004
427			TPS 005
428			TPS 007
429		Sukaluyu	TPS 005
430			TPS 007
431			TPS 008
432	Surade	Cipeundeuy	TPS 002
433			TPS 005
434			TPS 007
435		Citanglar	TPS 002
436			TPS 003
437			TPS 004
438			TPS 005
439			TPS 006
440			TPS 011
441			TPS 013
442		Jagamukti	TPS 009

443		Kadaleman	TPS 002
444			TPS 004
445			TPS 005
446			TPS 006
447			TPS 007
448			TPS 008
449		Pasir Ipis	TPS 005
450			TPS 012
451			TPS 015
452			TPS 017
453		Surade	TPS 008
454		Wanasari	TPS 002
455			TPS 005
456			TPS 007
457	Bantargadug	Bantargadung	TPS 001
458			TPS 002
459			TPS 004
460			TPS 005
461		Limusnunggal	TPS 006
462			TPS 008
463			TPS 009
464			TPS 010
465	Cikakak	Cikakak	TPS 002
466		Cimaja	TPS 010
467		Margalaksana	TPS 001
468			TPS 002
469			TPS 006

Atau,

4. Mendiskualifikasi atau Tidak Sah Perolehan Suara di 469 TPS yang tersebar di 27 (dua puluh Kecamatan) Se-Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam tabel yang diuraikan dalam posita 3 (tiga).

5. Memerintahkan Termohon untuk menghitung dan **menetapkan hasil rekapitulasi suara akhir** pemilihan Bupati dan wakil bupati Sukabumi, dikurangi hasil perolehan suara di 469 TPS yang tersebar di 27 (dua puluh Kecamatan), sebagaimana termuat dalam tabel yang diuraikan dalam posita 3 (tiga), sehingga hasil rekapitulasi suara akhir adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Nomor Urut 1 (Pemohon)	Perolehan Suara Nomor Urut 2	Selisih
470.172	461.928	8.244

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-73, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Iyos Somantri, M.Si. dan Zainul S., S.E., M.Si. (Pemohon Prinsipal);
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Tim Kampanye nomor urut 2 dan screenshot berita yang membuktikan saudara Marwan Hamami adalah seorang Bupati Sukabumi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang merupakan Partai Pengusung dan sekaligus sebagai Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 2 Drs. H. Asep Japar dan Andreas, S.E. diduga tidak melakukan cuti, ketika masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung;
3. Bukti P-3 : Salinan video sambutan Bupati dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan pidato dari Bupati Sukabumi (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi) yang merupakan

partai pengusung Pasangan Calon nomor urut 2 bertempat di Gor Venue tinju dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah yang pesertanya dihadiri oleh kepala dusun se Kabupaten Sukabumi pada tanggal 26 Agustus 2024 yang mengarahkan para kepala dusun dengan semboyan “teruskan atau lanjutkan” pada detik ke 26, yang merupakan salah satu jargon pasangan nomor urut 2;

4. Bukti P-4 : Salinan video sambutan Bupati dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan pidato Bupati Sukabumi dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada tanggal 12 November 2024 di Palabuhanratu yang mengarahkan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk tidak bersikap netral/memberikan dukungan melalui jargon jargon pasangan nomor urut 2 pada menit ke 3 detik ke 3;
5. Bukti P-5 : Fotokopi foto-foto Kegiatan Geopark Ciletuh Spektakuler di desa Mandrajaya pada tanggal 9 november 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang diduga syarat kepentingan untuk pasangan calon nomor urut 2 dibuktikan dengan memberikan symbol simbol salam dua jari sebagai dukungan kepada pasangan nomor urut 2;
6. Bukti P-6 : Fotokopi screensoot Berita Pemberian Hibah APBD Kabupaten Sukabumi dari Bupati Sukabumi kepada yayasan dan lembaga Keagamaan pada masa kampanye pilkada 2024 yang menunjukkan adanya Pemberian Hibah APBD Kabupaten Sukabumi dari Bupati Sukabumi kepada yayasan dan lembaga Keagamaan pada masa kampanye pilkada 2024 yaitu tanggal 7 November 2024 sebesar 32.785.000.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang syarat kepentingan untuk pasangan calon nomor urut 2 oleh

karena Bupati Sukabumi melekat sebagai Tim Sukses Paslon no. 2;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukabumi nomor 800.1.3.2/kep.687/BPKSDM/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setingkat eselon II.B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada masa tahapan Pilkada 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukabumi nomor 800.1.3.2/kep.783/BPKSDM/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Administratur (Camat) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada masa tahapan pilkada 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Foto salah seorang aparat Desa Benda Kecamatan Cicurug Sukabumi yang menunjukkan ada ketidaknetralan salah satu aparat Desa Benda Kecamatan Cicurug Sukabumi atas nama Ilyas Permana sebagai KASI perencanaan Desa Benda Kecamatan Cicurug Sukabumi Tanggal 27 November 2024, karena mendukung secara terang terangan dengan menunjukkan salam 2 jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon No. Urut 2;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto Sabun Cuci Bergambar Paslon No. 02 yang menunjukkan telah terjadi pembagian sabun Cuci Piring di Desa gunung tanjung Kecamatan Cisolok yang dibuktikan dengan adanya tempelan sticker pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 26 November 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Jayabakti dan screenshoot Whatsapp yang menunjukkan Kepala Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu atas nama Opik terbukti tidak netral dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan screenshoot Whatsapp, yang menunjukkan Bukti yang bersangkutan mendukung pasangan calon nomor urut 2 secara terang-terangan, dengan cara menyebarkan broadcast WA kepada lembaga-lembaga yang berada di PEMDES Desa JAYABAKTI agar patuh mengikuti perintah

yang bersangkutan untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut. 2, Tertanggal 25 November 2024;

12. Bukti P-12 : Fotokopi foto Kepala Desa Pulosari Kalapanunggal yang menunjukkan Bukti Kepala Desa Pulosari kalapanunggal atas nama (Dirja Miharja) telah tidak netral secara terang terangan dengan menunjukkan salam 2 jari sebagai simbol dukungan kepada Pasangan Calon No. Urut 2 pada tanggal 21 Oktober 2024;
13. Bukti P-13 : Salinan voice note Kepala Desa Cianaga yang menunjukkan Bukti Kepala Desa Cianaga (Wardi Sutandi) Kecamatan Kabandungan tidak netral dibuktikan dengan adanya voice note keberpihakan yang bersangkutan kepada pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 20 November 2024;
14. Bukti P-14 : Salinan voice note kepala Desa Tugu Bandung yang menunjukkan Bukti Kepala Desa Tugu Bandung (Yudi Guntara) Kecamatan Kabandungan tidak netral dibuktikan dengan voice note keberpihakan yang bersangkutan kepada pasangan Calon No. Urut 2 pada tanggal 18 November 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi screenshot Video Tiktok Kepala Desa Cipanengah yang menunjukan Bukti Kepala Desa Cipanengah (Yusuf alias Yusef alias Utek) Kecamatan Bojong Genteng tidak netral dibuktikan dengan Video Tiktok (VT) berupa Screen Shot yang menyatakan Bukti yang bersangkutan mengantar pasangan calon nomor urut 2 ketempat kegiatan kampanye pada tanggal 15 Oktober 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi foto kepala desa (Muhamamd Yusuf) dan staff Desa Kadununggal Kecamatan Kalapanunggal yang menunjukkan bukti Kepala Desa (Muhammad Yusuf) dan staff Desa Kadununggal Kecamatan Kalapanunggal tidak netral dibuktikan oleh foto yang melakukan salam 2 jari

sebagai dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 22 Oktober 2024;

17. Bukti P-17 : Salinan voice note kepala desa Babakan Jaya (Ece Sabeno) Kecamatan Parungkuda yang menunjukkan Bukti Kepala Desa Babakan Jaya (Ece Sabeno) Kecamatan Parungkuda tidak netral mengarahkan warga untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2, dibuktikan dengan voice note, diketahui pada tanggal 28 November 2024;
18. Bukti P-18 : Salinan Video kepala desa Cidadap (Deden Anta Nurman) Kecamatan Simpenan yang menunjukkan adanya bukti Kepala Desa Cidadap (Deden Anta Nurman) Kecamatan Simpenan tidak netral karena memberikan Ucapan selamat kepada pasangan calon nomor urut 2 diketahui pada tanggal 30 November 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi foto Ketua Relawan Rajapati (relawan Pasangan calon nomor 2 membagi-bagikan uang nomor 2) yang menunjukkan adanya bukti Mantan Kepala Desa Pawenang (Hilman Nulhakim) Kecamatan Nagrak sekaligus Ketua Relawan Rajapati (Relawan Pasangan calon nomor 2) membagi-bagikan uang sebanyak jutaan rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- an kepada tokoh agama Desa Cihanjawar Kecamatan Nagrak Kampung Lemah Neundeut;
20. Bukti P-20 : Salinan video dan foto pembagian minyak goreng dan sabun cuci piring oleh Timses Paslon 02 yang menunjukkan bukti telah terjadi pembagian minyak goreng dan sabun cuci piring oleh Timses Paslon 02 di Kecamatan Kalibunder untuk memilih Paslon no 2 pada tanggal 26 November 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi foto dan salinan Video pembagian uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Desa Cikangkung

Kecamatan Ciracap oleh Timses Paslon 02 untuk memilih Paslon no 2 terjadi pada tanggal 26 November 2024;

22. Bukti P-22 : Fotokopi foto kepala desa gunung guruh (Panji Purnama) kecamatan Gunungguruh yang menunjukan bukti kepala Desa Gunung Guruh (Panji Purnama) Kecamatan Gunungguruh tidak netral dibuktikan dengan foto dan postingan facebook yang menunjukan bersangkutan memakai baju kaos paslon no 2 dan mengarahkan untuk memilih Paslon no 2;
23. Bukti P-23 : Fotokopi foto dan tangkapan layar percakapan pembagian sembako oleh Timses Paslon 02 di dapil 1 salah satunya di Kecamatan Bantargadung untuk mengarahkan warga memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 26 November 2024;
24. Bukti P-24 : Salinan video Wakil Ketua BPD Desa Margaluyu (Hendi Lesmana) Kecamatan Sukaraja tidak netral karena melakukan kampanye bersama Paslon 02 Asjap, diketahui pada tanggal 30 November 2024;
25. Bukti P-25 : Salinan video Ketua IPHI Kecamatan Cidahu (H. Encub) pada masa kampanye melakukan kampanye Paslon nomor urut 2 di sarana keagamaan di Wilayah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi diketahui pada tanggal 25 November 2024;
26. Bukti P-26 : Salinan video para Kepala Desa Sekecamatan Cikakak, yaitu Kades Cirendang (Abdul Aziz), Kades Gandasoli (Ece Kurniawan), Kades Cimaja (R Wahyu Cakraningrat), Kades Cileungsir (Asep Ahmad Sobandi), Kades Rido Galih (Desi Safari) diketahui pada tanggal 27 November 2024 memberikan pernyataan dukungan pada paslon nomor 2 bertempat di kediaman Calon Bupati Nomor 2 (Asep Japar);
27. Bukti P-27 : Fotokopi foto Ketua DPC APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sukabumi atas nama

Deden Deni Wahyudin (Kepala Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak) dan Ketua Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi atas nama Aum Ruhyadi sekaligus yang bersangkutan menjabat Kepala Desa Padasih Kecamatan Cisaat melakukan deklarasi mendukung Asep Japar di rumah Deden Deni Wahyudi di Desa Sukakersa kecamatan Parakansalak diketahui pada tanggal 27 November 2024;

28. Bukti P-28 : Salinan voice note Kepala Desa Kalaparea (Heri Kurniawan), Kecamatan Nagrak tidak netral dan melakukan intimidasi kepada pimpinan sebuah perusahaan swasta berupa ancaman pemecatan kepada karyawan perusahaan peternakan ayam di Kalaparea kecamatan Nagrak yang menjadi pendukung paslon nomor urut 1, sebagai diketahui pada tanggal 27 November 2024;
29. Bukti P-29 : Salinan voice note Kepala UPTD Pasar Palabuhanratu (Uus Heryanto) tidak netral dengan memberikan pengarahannya untuk mendukung Paslon Nomor 2 dibuktikan dengan voice note diketahui pada tanggal 27 November 2024;
30. Bukti P-30 : Fotokopi foto Whatsapp Group yang bernama "Kades AA Well" yang beranggotakan para Kepala Desa pendukung paslon no 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi foto Kepala Desa Pasir Datar Indah (Samsul) Kecamatan Caringin tidak netral dengan menuliskan komentar pada chat group WA mendukung paslon nomor 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi foto dan salinan video Kepala Desa Karang Tengah (Agung Pratama Putra) beserta perangkat desa tidak netral dengan melakukan selebrasi kemenangan pada tanggal 28 November 2024;

33. Bukti P-33 : Fotokopi foto pembagian minyak goreng dan kaos paslon nomor urut 2 terjadi di Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap kepada warga untuk memilih paslon 02 pada tanggal 26 November 2024;
34. Bukti P-34 : Fotokopi foto dan salinan video Kepala Desa Ciheulang Tonggoh (Yudi Mulyadi) Kecamatan Cibadak tidak netral memberikan dukungan dengan hadir pada kampanye paslon no 2 dan berfoto bersama paslon no 2 serta melakukan deklarasi dukungan bersama staf desa kepada paslon 02, diketahui pada tanggal 28 November 2024;
35. Bukti P-35 : Salinan voice note dan video Camat Jampang Kulon (Dading) mengarahkan staf pegawai kecamatan untuk mendukung paslon nomor 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi foto Kepala Desa Padajaya (Ade Hermawan) Kecamatan Jampang Kulon tidak netral dengan berfoto memberikan salam 2 jari paslon no 2, diketahui pada tanggal 25 November 2024;
37. Bukti P-37 : Fotokopi foto screenshot status Whatsapp Jari tangan Pengawas Kelurahan Desa Benda Cicurug nyata nyata tidak netral dengan memberikan symbol 2 jari sebagai bentuk keberpihakan kepada Paslon No. 2 pasca pencoblosan, diketahui pada tanggal 28 November 2024;
38. Bukti P-38 : Fotokopi foto Kepala Desa Cikaret (Usep Saepurohmat) dan Kepala Desa Jambe Nenggang (Hilman Permana) Kecamatan Kebon Pedes tidak netral dibuktikan dengan berfoto dengan paslon nomor 2 dan Dirut Pesona Wisata (Ase Riyadi) diketahui pada tanggal 27 November 2024;
39. Bukti P-39 : Salinan video Kepala Desa Cijengkol (Oban Sobandi) Kecamatan Caringin pada tanggal 30 Oktober 2024 (Rabu Malam Kamis) menghadiri dan mengikuti deklarasi dukungan kepada paslon nomor 2 dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sedapil III (Tiga) yang

bertempat di Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cibadak;

40. Bukti P-40 : Salinan video Kepala Desa Sukamulya (Mahdan Z.A) Kecamatan Caringin dan Kepala Desa Cijengkol (Oban Sobandi) Kecamatan Caringin pada tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di Mushala Kantor Kepolisian Sektor Caringin dengan sengaja dan tegas mengucapkan Jargon dan memberikan isyarat dengan gerakan tangan 2 jari sebagai keberpihakan atau dukungan pada paslon nomor urut 2;
41. Bukti P-41 : Salinan video Kepala Desa Cimaja (R. Wahyu Cakraningrat) Kecamatan Cikakak tidak netral dengan menghadiri kegiatan paslon no urut 2 di rumah kediaman anggota DPRD Fraksi Golkar Rika Yulistina, diketahui pada tanggal 25 November 2024;
42. Bukti P-42 : Salinan video Ketua DPC APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sukabumi atas nama Deden Deni Wahyudin dan Ketua Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi atas nama Aum Ruhyadi sekaligus bersangkutan menjabat Kepala Desa Padasih dan Sukakersa melakukan deklarasi mendukung Asep Japar Rumah Makan Joglo Kota Sukabumi, diketahui pada tanggal 10 November 2024;
43. Bukti P-43 : Salinan video Kepala Desa Mandarajaya (Ajat) Kecamatan Ciemas melakukan pengumpulan warga untuk mendukung paslon nomor 2 diketahui pada tanggal 25 November 2024;
44. Bukti P-44 : Salinan video pembagian Sembako oleh Anggota DPRD Fraksi PAN atas nama Mansyurudin kepada warga untuk memilih paslon no urut 02, diketahui pada tanggal 20 November 2024 bertempat di Kantor DPD PAN Palabuhanratu;

45. Bukti P-45 : Fotokopi foto Kepala Desa Nagrak Selatan (Tutang Setiawan) dengan Calon Bupati atas nama Asep Japar untuk mendukung paslon no urut 02, diketahui pada tanggal 3 Desember 2024;
46. Bukti P-46 : Fotokopi foto pertemuan para Kepala Desa yaitu Kepala Desa Sukatani, Kepala Desa Buniwangi (Dadan), Kepala Desa Gunung Sungging (Nanang), kepala Desa Cipeundeuy (Bakang), Kepala Desa Warnasari (Sudarmi), kepala Desa Pasir Ipis (Nandang) Kecamatan Surade di kediaman Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi dengan memakai baju bergambar Asep Japar diketahui pada tanggal 25 November 2024;
47. Bukti P-47 : Fotokopi foto pembagian sembako di Desa Babakan Jaya dan Desa Pondok Kaso Landeuh Kecamatan Parungkuda dari tim kampanye pasangan calon nomor 2 kepada warga untuk memilih paslon no urut 2, diketahui pada tanggal 26 November 2024;
48. Bukti P-48 : Fotokopi foto sampling daftar hadir pemilih terkait indikasi penggelembungan suara di TPS 8 Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu, dari sampling 469 TPS yang diduga ada penggelembungan suara, serta pemalsuan tanda-tangan pemilih oleh penyelenggara pada tanggal 27 November 2024;
49. Bukti P-49 : Fotokopi foto pesan berantai di Media Sosial WA yang di sampaikan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Sukabumi untuk mengintruksikan Kepala Desa mendukung paslon nomor 2, pada tanggal 27 November 2024;
50. Bukti P-50 : Salinan video terjadi Money Politik di Gg Ajid Cimaja 003/002 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dengan mengatasnamakan Paslon No. Urut 2

kepada warga untuk memilih paslon no 2, pada tanggal 27 November 2024;

51. Bukti P-51 : Fotokopi foto hasil hitung cepat versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 28 November 2024 telah beredar dimedia sosial hasil hitung cepat versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yang mana hal tersebut mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU;
52. Bukti P-52 : Fotokopi foto pembagian sabun cuci piring dengan stiker paslon no urut 2, di Desa Kampung Pamatutan RT 23 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng dari timses pasangan calon nomor 2 kepada warga untuk memilih paslon no urut 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024;
53. Bukti P-53 : Fotokopi foto terjadi pembagian sabun cuci piring di Desa Kertaraharja kecamatan cikembar yang bersticker pasangan nomor urut 2 dari timses pasangan calon nomor 2 kepada warga untuk memilih paslon no urut 2, diketahui pada tanggal 27 November 2024;
54. Bukti P-54 : Fotokopi foto Staff Kesekretariatan Dinas PU Kabupaten Sukabumi atas nama Wahyu melakukan foto bersama rekan-rekannya berlatarbelakang baligho gambar Paslon No. urut 2 Asep dikediaman Asep Japar sebagai bentuk dukungan, diketahui pada tanggal 28 Nopember 2024;
55. Bukti P-55 : Fotokopi foto Staff Kesekretariatan Dinas PU Kabupaten Sukabumi atas nama Wahyu melakukan Foto bersama Calon Bupati Asep Japar pada rangkaian kegiatan Turnamen Sepakbola di Kecamatan Cisolok, diketahui pada tanggal 28 Nopember 2024;
56. Bukti P-56 : Fotokopi foto Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Sukabumi atas nama Herdi Somantri alias Bima melakukan foto bersama rekannya dengan menggunakan Kaos Calon Buoati Asep Japar, diketahui pada tanggal 28 Nopember 2024;

57. Bukti P-57 : Fotokopi foto Kepala Desa Karangpapak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atas nama Asep Supriatna melakukan Foto bersama warga dengan menggunakan kaos Calon Bupati Asep Japar pada rangkaian kegiatan Turnamen Sepakbola, diketahui pada tanggal 28 Nopember 2024;
58. Bukti P-58 : Fotokopi foto pernyataan Kepala desa Langen sari bahwa bersangkutan mendukung pasangan calon nomor urut 2 atas nama Asep Japar dan Andreas bukti foto pernyataan per bulan oktober diketahui tanggal 28 November 2024;
59. Bukti P-59 : Fotokopi foto Kepala Desa Ciwalat Pabuaran atas nama Usep tidak netral dibuktikan dengan foto salam 2 jari yang merupakan nomor urut pasangan calon Asep Japar dan Andreas;
60. Bukti P-60 : Fotokopi foto Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran atas nama Dede Hidayat tidak netral dibuktikan dengan foto salam 2 jari yang merupakan nomor urut pasangan calon Asep Japar dan Andreas diketahui tanggal 30 November 2024;
61. Bukti P-61 : Fotokopi foto Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran atas nama Bambang Gunawan tidak netral dibuktikan dengan tangkapan foto layar facebook ucapan selamat atas terpilihnya pasangan no urut 2 padahal belum ada penetapan KPU Kabupaten Sukabumi diketahui tanggal 30 November 2024;
62. Bukti P-62 : Salinan Video persiapan pembagian sembako pasangan nomor urut 2 di aula rapat Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi nomor 1781 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi nomor 3057 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Sukabumi nomor 01/PL/TSM-PB/13.24/XII/2024 terkait Pelanggaran TSM ke Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat nomor :004/PL/TSM-PB/13.00/XI/2024 terkait Pelanggaran TSM ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan status laporan dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi berdasarkan pelaporan nomor 02/reg/LP/PB/kab/13.24/XI/2024;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Tabel Daftar 469 TPS beserta lampiran fotokopi C Hasil dan C Salinan hasil sejumlah 469 TPS yang tersebar di 27 Kecamatan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Putusan Pendahuluan badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D/VIII/2010.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, sebagaimana Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan:

1. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang ("**UU Pemilihan**") *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 3/2024**"), telah diatur bahwa yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam posita maupun petitum bahwa pokok Permohonan yang meminta pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB (**"Keputusan KPU Sukabumi"**) (**Bukti T-1**), bukan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di atas, melainkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan;

3. Bahwa selanjutnya dalam posita maupun petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**"TSM"**) dengan pokok sebagai berikut:
 - a) Dugaan Bupati Sukabumi beserta beberapa jajaran ASN lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Dugaan terjadinya politik uang dan kegiatan bagi-bagi sembako yang sarat akan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c) Dugaan pengelembungan suara dan pemalsuan tanda tangan yang terjadi di 469 TPS di 27 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi;
 - d) Dugaan adanya penghitungan hasil cepat di media sosial versi Bawaslu Kab. Sukabumi mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU.
5. Bahwa jenis pelanggaran dalam pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran tersebut telah ditentukan dalam UU Pemilihan sebagai berikut:

Tabel 1 : Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Dalam UU Pemilihan

No	Jenis Pelanggaran Pemilihan	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan	Dasar Hukum
1	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	Pasal 137 UU Pemilihan
		KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk badan <i>ad hoc</i>	
2	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 138 – Pasal 141 UU Pemilihan
	Pelanggaran Administrasi Pemilihan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A UU Pemilihan
3	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 UU Pemilihan
4	Tindak Pidana Pemilihan	Penyidik Kepolisian Negara RI dan Jaksa Penuntut Umum dalam Sentra Gakkumdu (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan)	Pasal 145 – Pasal 152 UU Pemilihan
		Pengadilan Negeri (tingkat pertama)	
		Pengadilan Tinggi (tingkat banding dan putusannya final)	
5	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 UU Pemilihan
6	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 UU Pemilihan

Berdasarkan hal tersebut di atas, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili harus merupakan perselisihan terkait penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

6. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan putusan-putusan Mahkamah telah mengingatkan tentang perubahan paradigma penyelesaian masalah hukum pemilu, dimana Mahkamah bukan memeriksa seluruh pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilihan, sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan perkara perselisihan hasil pemilihan dalam Pilkada sebelumnya yang antara lain mempertimbangkan: ***“Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa.... . Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.”*** Bahkan terkait hal ini ditegaskan kembali sebagaimana pada putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, walaupun putusan tersebut bukan mengatur terkait PHPU Kepala Daerah, namun bagaimanapun juga kedua PHPU tersebut adalah sebagai pelaksanaan kewenangan yang bersumber langsung dari ketentuan pasal yang sama, yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 mempertimbangkan dengan tegas: ***“...Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. Pertama, pelanggaran pemilu yang meliputi***

pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. Kedua, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. Ketiga, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. Keempat, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu]”.

“Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD Kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu].

Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tidak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu]”.

“...Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia”.

7. Bahwa andaipun dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon dapat diperiksa oleh Mahkamah, harusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut sebelumnya telah dilakukan keberatan secara berjenjang pada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masing-masing pelanggaran tersebut sesuai dengan masing-masing jenis pelanggarannya;
8. Bahwa sejalan dengan Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (“**Perbawaslu 9/2020**”), telah diatur khusus tentang bagaimana menyelesaikan

pelanggaran administratif pada pemilihan umum kepala daerah yang bersifat TSM, sebagaimana ditentukan pada Pasal 13 ayat (2), **Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;**

9. Bahwa faktanya Pemohon melakukan laporan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana yang dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024. Artinya, Pemohon baru mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut setelah melewati masa tenggang waktunya yaitu pada tanggal 27 November 2024, bahkan setelah dikeluarkannya Keputusan KPU Sukabumi yaitu tanggal 6 Desember 2024;
10. Bahwa Pemohon terkesan mengada-ada dan kebingungan setelah mengetahui bukan sebagai pihak pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Sukabumi. Seharusnya Pemohon jika memang beritikad baik untuk menegakkan demokrasi dan tidak mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, jauh-jauh hari melakukan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut atau setidaknya sebelum tenggang waktunya berakhir sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada uraian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan ketentuan mengenai syarat ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, namun Pemohon menguraikan dalilnya dengan menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku, yaitu ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa Termohon berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan;
3. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*

4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (**Bukti T-502**) *juncto* Surat Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18

Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (**Bukti T-503**) yang pada pokoknya menyampaikan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “**Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024**”), jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi adalah sebanyak 2.821.619 jiwa. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Sukabumi;

5. Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Sukabumi, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 : Perolehan Suara Berdasarkan Keputusan KPU
Kabupaten Sukabumi Tahun 2024**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Iyos Somantri dan H. Zainul S (Paslon 1)	498.990
2	H. Asep Japar dan H. Andreas (Paslon 2)	564.862
Total Suara Sah		1.063.852
Selisih Suara		65.872

6. Bahwa berdasarkan tabel di atas, jumlah perolehan suara sah adalah sebesar **1.063.852** suara. Sehingga perhitungan persentase menurut

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Perhitungan Persentase Sesuai Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan Untuk 1.063.852 Suara Sah

Persentase		Jumlah Perolehan Suara Sah		Maksimal Selisih
0,5%	x	1.063.852	=	5.319

Adapun selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 adalah sebesar **65.872** suara atau setara **6,19% (enam koma sembilan belas persen)** dari jumlah perolehan suara sah, dimana selisih tersebut **sangat jauh melebihi** ambang batas yang telah diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah perolehan suara sah. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan oleh karena selisih perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah 65.872 suara atau melebihi ketentuan 0,5% (5.319,26) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
8. Bahwa dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mohon menjadi pertimbangan Mahkamah agar kiranya Mahkamah memutus dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam putusan *dismissal* tanpa perlu memeriksa pokok permohonan atau tidak mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
9. Bahwa pengesampingan dan/atau penundaan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam praktiknya di Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara **KETAT** dan **TERBATAS**. Hal ini sebagaimana dapat dilihatnya

pada setidaknya 15 (lima belas) Putusan Mahkamah yang menjadi dasar pertimbangan putusan sebagai berikut:

- a) Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Tolikara);
- b) Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Intan Jaya);
- c) Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Puncak Jaya);
- d) Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Kepulauan Yapen);
- e) Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kab. Mimika);
- f) Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kab. Paniai);
- g) Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Boven Digoel);
- h) Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (PHP Kota Banjarmasin);
- i) Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Yalimo);
- j) Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Bandung);
- k) Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Nabire);
- l) Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Samosir);
- m) Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Nias Selatan);
- n) Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Pesisir Barat);
- o) Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Sabu Raijua)

10. Bahwa berdasarkan 15 (lima belas) putusan sebagaimana tersebut di atas, setidaknya terdapat 5 (lima) klasifikasi perkara yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah ketika mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, yaitu sebagai berikut:

- a) Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dinyatakan cacat hukum, ketika terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, karena terdapat perolehan suara yang tidak direkap baik karena adanya pengubahan angka perolehan suara Pasangan Calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara di sejumlah TPS dan/atau Kecamatan/Distrik, sebagaimana terjadi pada perkara:
 - 1) Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Tolikara);
 - 2) Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Intan Jaya);
 - 3) Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Puncak Jaya);

- 4) Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Kepulauan Yapen);
dan
 - 5) Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Yalimo);
- b) KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Pemilihan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah pemungutan suara ulang, pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana yang terjadi pada perkara:
- 1) Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Tolikara);
 - 2) Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kab. Paniai);
 - 3) Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Nias Selatan);
- c) Terjadi perbedaan pendapat antara KPU Kabupaten dengan KPU Provinsi, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana dalam Perkara Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Kepulauan Yapen);
- d) Cacat hukum dalam proses pencalonan, baik karena Pasangan Calon merupakan mantan terpidana maupun karena Pasangan Calon berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang terjadi pada Perkara:
- 1) Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Boven Digoel);
 - 2) Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Samosir);
 - 3) Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kab. Sabu Raijua)
- e) Adanya persoalan yang sangat mendasar dan krusial, dimana parameter dari sifat mendasar dan krusial itu sebenarnya sudah terlihat jelas sebagaimana uraian di atas. Persoalan mendasar dan krusial sebagaimana yang pernah dimuat dalam Putusan Mahkamah antara lain sebagai berikut:
- 1) Tidak adanya atau tidak sahnya Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,

sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020; (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018)

- 2) Daftar Pemilih Tetap menjadi cacat hukum dikarenakan jumlahnya melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020; (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021)

11. Bahwa apabila kelima klasifikasi perkara *a quo* dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan dan konstruksi peristiwa yang diuraikan Pemohon, maka **sebenarnya tidak ada isu yang bisa masuk ke dalam salah satu dari lima klasifikasi tersebut**, sehingga dengan demikian dalil dari Pemohon sebagaimana dalam permohonannya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan. Andai pun dugaan pelanggaran-pelanggaran *a quo* benar adanya (*quad non*), maka pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya bersifat kasuistis/sporadis yang tidak mempengaruhi penghitungan secara signifikan. Selain bersifat sporadis, beberapa dugaan pelanggaran juga bersifat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan *locus* atau tidak menguraikan konstruksi peristiwa secara utuh;

12. Bahwa selain itu, dalam beberapa Putusan Mahkamah terkait pelanggaran yang bersifat TSM diuraikan juga dalam pertimbangan hukumnya, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a) Bahwa pelanggaran yang bersifat **terstruktur** dimaksudkan pada pelanggaran yang dilakukan secara struktural dan berjenjang, baik oleh aparat penyelenggara pemilu maupun aparat pemerintahan. Pelanggaran ini dilakukan secara kolektif, bukan pelanggaran yang sifatnya individual atau perseorangan;
- b) Bahwa pelanggaran yang bersifat **sistematis** berarti pelanggaran yang telah direncanakan atau didesain terlebih dahulu, baik secara

sederhana maupun kompleks. Pelanggaran yang sifatnya insidentil atau spontan tidak termasuk dalam kriteria ini;

- c) Bahwa pelanggaran yang bersifat **masif** diartikan sebagai pelanggaran yang memiliki dampak sangat luas dan menyeluruh, bukan yang bersifat sporadis atau acak (*random*);
- d) Bahwa pelanggaran TSM yang dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada ini, ada yang harus dibuktikan terhadap ketiga kriteria pelanggaran secara kumulatif, atau cukup secara alternatif terhadap salah satu kriterianya saja. Namun demikian, baik kumulatif maupun alternatif, pembuktian terhadap pelanggaran TSM (ketiga kriterianya) tersebut harus memenuhi unsur signifikansi. Artinya, pelanggaran tersebut memiliki signifikansi terhadap perubahan peringkat perolehan suara atau kursi dan/atau keterpilihan bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, atau Calon Anggota Legislatif. Apabila tidak terbukti signifikan, **Mahkamah bisa saja menyatakan pelanggaran memang ada dan terbukti, namun tidak sampai membatalkan Ketetapan KPU karena diyakini tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suaranya secara signifikan. Sehingga, seandainya pun harus dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang, tetap tidak akan bisa mengubah peringkat perolehan suara atau keterpilihan seseorang;**
- e) Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat TSM, yaitu *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*. Berdasarkan kaidah-kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008

(Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, parsial, perorangan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak hanya terjadi pada satu Pasangan Calon saja, namun juga bisa terjadi pada Pasangan Calon lainnya;

- f) Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak memenuhi syarat, kondisi, dan fakta untuk mengesampingkan penggunaan ketentuan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah karena faktanya:
- 1) Objek permohonan didasarkan pada penghitungan dan rekapitulasi yang selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sukabumi oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) KPU Kabupaten Sukabumi tidak melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
 - 3) Tidak terdapat bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai sehingga Mahkamah dapat menggelar sidang lanjutan atau rapat pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil Pemohon.

- g) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021, apabila ditinjau dari dalil permohonan Pemohon hingga bukti-bukti yang diajukan Pemohon pada Pemohonan Perselisihan Hak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, bahwa unsur TSM yang didalilkan para pemohon baik secara kumulatif maupun alternatif, pembuktian terhadap TSM tidak memiliki unsur yang signifikan, artinya meskipun pelanggaran yang didalilkan Pemohon memang ada, namun Hakim Mahkamah meyakini tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan, karena diketahui perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon suara tertinggi memiliki perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan, sehingga Putusan Mahkamah dalam permohonan ini sangatlah tepat mengingat Mahkamah lebih mengedepankan amanat undang-undang (konsep keadilan prosedural) dan tidak menjadi lembaga kehakiman yang mengedepankan keadilan substantif, yang mana menurut konsep keadilan prosedural, **sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang**. Jika Hakim memutuskan di luar ketentuan undang-undang bisa dianggap tidak adil karena melanggar kepastian-kepastian yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Adil di dalam keadilan prosedural dimaknai bahwa putusan Hakim didasarkan pada aturan-aturan resmi yang ada sebelumnya, hal ini diperlukan agar ada kepastian bagi *justiciabelen* atau orang-orang pencari keadilan yang akan melakukan sesuatu sehingga bisa memprediksi apa akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu;
- h) Bahwa adanya ketentuan persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan telah mendorong setiap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya pelanggaran untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang melalui upaya hukum secara

hierarkis masing-masing lembaga (*ex officio*) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi, dan bukan dengan membawa ke Mahkamah Konstitusi, atau setidaknya sebelum dibawa kepada peradilan Mahkamah Konstitusi, harusnya Pemohon sebelumnya telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masing-masing pelanggaran tersebut sesuai dengan masing-masing jenis pelanggarannya. Dengan kata lain, sebelum dibawa kepada peradilan Mahkamah Konstitusi, pihak Pemohon telah melakukan keberatan atau laporan secara berjenjang, tidak serta-merta langsung kepada peradilan Mahkamah Konstitusi, karena **seyogianya keadilan yang diwujudkan dari sebuah lembaga peradilan adalah keadilan yang lahir dari sebuah kepastian hukum, sehingga para *justiciablen* tidak kebingungan dalam menentukan apa yang boleh atau apa yang tidak boleh;**

- i) Bahwa dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM kemudian mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan dalam setiap kasus konkretnya, Mahkamah akan kembali kepada masa lalu sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dengan memeriksa pokok permohonan setiap permohonan yang jelas-jelas tidak signifikan dan mempengaruhi hasil pemilihan. Padahal pada sisi lain melalui kewenangan yang diberikan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendirian dengan memutuskan Pasal 158 UU Pemilihan adalah konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII menjelaskan rasionalitas ketentuan ambang batas dalam pertimbangan putusannya bahwa: *"Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara*

*membuat perumusan norma undang-undang dimana **seseorang yang turut serta dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.***”

- j) Bahwa yurisprudensi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan yang dilahirkan Mahkamah sejak 2008-2020 telah banyak diakomodir undang-undang, yang berarti telah banyak terobosan-terobosan mengadili kasus konkret yang telah diterima dan berubah menjadi norma undang-undang, termasuk pelanggaran-pelanggaran TSM yang telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi ranah Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, sejak berlakunya UU Pemilihan semestinya dugaan-dugaan pelanggaran TSM telah diajukan kepada Bawaslu Provinsi sebagai yang berwenang, dan kurang tepat mekanisme penyelesaian yang seharusnya selesai di Bawaslu Provinsi tersebut digunakan sebagai celah hukum bagi pemohon yang tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), yang akhirnya Pasal 158 UU Pemilihan dan objek permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (*objectum litis*) di Mahkamah menjadi kurang memiliki makna dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM akan tetap diperiksa pokok permohonannya.

Ketentuan TSM sepenuhnya telah diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**“Peraturan Bawaslu No. 9/2020”**), dimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu No. 9/2020 mendefinisikan TSM sebagai berikut:

“8. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran

administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”;

- k) Bahwa faktanya Pemohon memang telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud sebagaimana Surat Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan nomor laporan: 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 (**“Laporan Pemohon 003”**). Namun pelaporan yang diajukan ini terkesan mengada-ngada dan menunjukkan bahwa pihak Pemohon kebingungan setelah mengetahui bukan sebagai pihak pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024. Hal ini didukung dengan Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana Nomor: 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan secara terbuka pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 (**“Putusan Bawaslu 003”**) (**Bukti T-500**);
- l) Bahwa Putusan Bawaslu 003 telah memberikan keputusan dimana dalam putusannya menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti. Putusan Bawaslu 003 ini diambil berdasarkan kesimpulan bahwa laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil;
- m) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Laporan Pemohon 003 yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah akal-akalan dan/atau siasat buruk untuk menghalang-halangi dilaksanakannya Keputusan KPU Sukabumi, sehingga atas Laporan Pemohon 003 patut secara hukum untuk dikesampingkan dan tidak dapat dikatakan sebagai laporan berjenjang yang telah dilakukan oleh Pemohon atas perkara *in casu*;
- n) Bahwa Pasal 158 UU Pemilihan memiliki kedudukan yang setara dengan syarat formal permohonan lainnya, yakni mengenai

tenggang waktu permohonan, objek permohonan, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan. Sehingga Mahkamah sudah sepatutnya tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan untuk terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan dalam perkara *a quo*, kecuali Mahkamah sebelumnya dengan menggunakan kewenangannya dalam pengujian konstitusional (*constitutional review*) telah menyatakan norma tersebut inkonstitusional.

13. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan:

1. PEMOHON SALAH MENGGUNAKAN DASAR HUKUM

- a) Bahwa dalam permohonannya, yaitu pada bagian uraian kedudukan hukum, Pemohon menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 6/2020**");
- b) Bahwa PMK 6/2020 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 PMK 3/2024;
- c) Bahwa dengan adanya kesalahan penggunaan dasar hukum tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak cermat, tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

2. PEMOHON SALAH MELAKUKAN PENGHITUNGAN PADA POSITA ANGKA 5 (LIMA)

- a) Bahwa terdapat kesalahan penghitungan dalam posita angka 5 (lima) terkait jumlah TPS yang berada di Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagaimana uraian dalil pada baris ke-3 (ketiga) yaitu

sebagai berikut: “... 4.318 TPS dikurangi 469 TPS, atau dihitung dari 3.822 TPS...”. dimana angka yang penulisannya salah adalah pada frasa 3.882 TPS, seharusnya yang benar adalah 3.849 TPS dimana angka ini berasal dari hasil pengurangan 4.318 TPS dikurangi 469 TPS;

- b) Bahwa kesalahan penghitungan jumlah TPS tersebut antara lain dikarenakan penyajian dalil-dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dilakukan dengan tidak menyandingkan tabulasi penghitungan menurut versi Pemohon dan menurut versi Termohon, baik secara keseluruhan TPS maupun TPS-TPS yang dianggap bermasalah sebagaimana yang telah ditentukan pada contoh penyajian permohonan pada PMK 3/2024;
- c) Bahwa atas kesalahan penghitungan ini dan penyajian permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan PMK 3/2024, maka sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS KARENA POSITA PEMOHON SALING BERTENTANGAN

a) PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENENTUKAN JUMLAH PENGGELEMBUNGAN SUARA

- 1) Bahwa dalam dalil uraian pokok permohonan, Pemohon menduga telah terjadi penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan, dimana dalam uraian Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas berapa sesungguhnya jumlah perolehan suara dan jumlah suara yang digelembungkan pada 469 TPS di 27 Kecamatan tersebut pada masing-masing pasangan calon;
- 2) Bahwa pada uraian permohonan Pemohon pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 3 baris ke-3 (ketiga), disebutkan: “.... *diduga terjadi penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut 2 (Drs. H. Asep Japar dan Andreas, SE.) sejumlah 102.934 suara, sedangkan perolehan suara No urut 1 atau Pemohon*

sejumlah 28.818 suara, sehingga terjadi selisih 73.726 suara". Pada uraian ini dapat dimaknai bahwa perolehan suara sebesar 102.934 suara dan 28.818 suara adalah jumlah penggelembungan suara yang dimaksud oleh Pemohon;

- 3) Bahwa sedangkan pada uraian bagian IV. Pokok Permohonan angka 3 baris ke-18 (kedelapan belas), pemaknaan tersebut kemudian berubah sebagaimana disebutkan oleh Pemohon sebagai berikut: *"... yakni total 564.862 suara dikurangi dengan jumlah suara di 469 TPS tersebut, yaitu 102.934 suara, maka perolehan suara no urut 2 adalah 461.928. sedangkan perolehan suara akhir No. urut 1 atau Pemohon, yaitu 498.990, jika dikurangi 28.818 dari 469 TPS, berarti 470.172. Apabila suara no urut 1 sejumlah 470.172 disandingkan dengan suara no. urut 2 sejumlah 461.928 suara, itu berarti perolehan suara no urut 1 unggul dengan selisih 8.244 suara."* Dari uraian ini, jumlah 102.934 dan 28.818 suara dimaknai sebagai jumlah perolehan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan oleh masing-masing pasangan calon, dan bukan sebagai jumlah penggelembungan suara;
- 4) Bahwa dari uraian huruf b dan c di atas, jelas terlihat ketidakjelasan Pemohon dalam menguraikan permohonannya, apakah jumlah 102.934 dan 28.818 suara adalah dimaksudkan sebagai penggelembungan suara atau merupakan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada 469 TPS di 27 Kecamatan;
- 5) Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 3 yang menyatakan penggelembungan yang terjadi pada 469 TPS di 27 Kecamatan didasarkan pada sampling indikasi di 3 TPS, yaitu TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu. Menurut Termohon, penggunaan sampling indikasi yang digunakan dalam 3 TPS tersebut tidak relevan dan tidak

berkeadilan. Seharusnya, apabila Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan, maka Pemohon wajib membuktikan secara keseluruhan pada semua TPS, yaitu pada 469 TPS di 27 Kecamatan;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa permohonan Pemohon sangat multitafsir, tidak relevan, dan tidak berkeadilan dalam menerapkan sampling indikasi sehingga permohonan Pemohon dianggap tidak jelas (*obscuur libel*);

b) PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS PENYEBAB PERMASALAHAN PEROLEHAN SUARA PADA 469 TPS DI 27 KECAMATAN

- 1) Bahwa terdapat ketidakkonsistenan uraian dalil yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonannya, dimana pada posita angka 3 Pemohon menguraikan bahwa pada pokoknya perolehan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan terjadi karena adanya penggelembungan suara yang merugikan pihak Pemohon. Sementara pada posita angka 4, pada pokoknya Pemohon menguraikan bahwa perolehan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan diduga telah terpengaruh oleh adanya pelanggaran secara TSM oleh Paslon 2;
- 2) Bahwa akibat dari ketidakkonsistenan tersebut, menimbulkan ketidakjelasan apa yang menjadi sasaran utama Pemohon dalam mendalilkan alasan yang menjadi sebab-musabab adanya permasalahan pada 469 TPS di 27 Kecamatan;
- 3) Bahwa ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonannya diduga kuat karena Pemohon memaksakan dalilnya untuk dapat memenuhi salah satu syarat pemenuhan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yaitu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2 Perbawaslu 9/2020, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya

pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

- 4) Bahwa untuk memenuhi ketentuan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten inilah yang memicu Pemohon untuk memasukkan dalil pelanggaran pada 469 TPS di 27 Kecamatan (*quad non*), dimana pemilihan TPS-TPS tersebut diambil oleh Pemohon berdasarkan TPS-TPS yang penghitungan perolehan suara yang diraih oleh Paslon 1 lebih sedikit dibanding Paslon 2 atau dengan kata lain TPS-TPS dimana Paslon 1 mengalami kekalahan perolehan suara;
- 5) Bahwa akibat Pemohon memaksakan dalil untuk memenuhi ketentuan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten inilah yang membuat posisinya menjadi tidak jelas;
- 6) Bahwa dengan demikian atas ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan maka telah nyata, terang, dan jelas permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR KARENA PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

- a) Bahwa dalam tabulasi yang diuraikan oleh pemohon banyak memuat kesalahan atas data-data yang disajikan sehingga membuat uraian yang diberikan menjadi tidak jelas bahkan cenderung menyesatkan, dimana kesalahan-kesalahan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

1) PERMOHON SALAH DALAM MENGURAIKAN TOTAL SUARAH DAN SUARA TIDAK SAH DALAM PERMOHONAN A QUO

- (a) Bahwa pada uraian pokok permohonan, Pemohon menguraikan tabulasi perolehan suara dari 469 TPS di 27

Kecamatan, dimana pada tabulasi yang diuraikan tersebut ditemukan banyak kesalahan penghitungan pada kolom “Suara Sah dan Suara Tidak Sah”, dimana seharusnya nilai pada kolom “Suara Sah dan Suara Tidak Sah” tersebut adalah hasil dari penjumlahan dari kolom “Suara Sah” dan “Suara Tidak Sah”, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4: Tabulasi Perolehan Suara Menurut Pemohon Yang Ditemukan Termohon Terdapat Kesalahan Penyajian Data Pada Kolom “Suara Sah dan Suara Tidak Sah” Dan Kolom “Total Pemilih”

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara 1	Suara 2	Total DPT	Total Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih	Suara Sah dan Tidak Sah yang Seharusnya
48	Cicurug	Benda	TPS 001	34	258	521	265	292	22	482	-224	314
49	Cicurug	Benda	TPS 002	68	256	536	276	324	17	550	-188	341
50	Cicurug	Benda	TPS 003	60	304	576	282	364	14	591	-244	378
51	Cicurug	Benda	TPS 004	98	229	588	286	327	21	603	-131	348
52	Cicurug	Benda	TPS 005	99	239	564	296	338	26	579	-140	364
53	Cicurug	Benda	TPS 006	78	228	557	274	306	20	571	-150	326
54	Cicurug	Benda	TPS 008	68	188	472	244	256	23	484	-120	279
55	Cicurug	Benda	TPS 010	74	197	568	278	271	12	583	-123	283
56	Cicurug	Benda	TPS 011	75	185	566	272	260	13	581	-110	273
57	Cicurug	Benda	TPS 012	82	207	540	273	289	15	528	-125	304
58	Cicurug	Benda	TPS 016	77	255	560	281	332	14	574	-178	346
59	Cicurug	Benda	TPS 017	101	252	563	285	353	23	578	-151	376
60	Cicurug	Benda	TPS 018	67	249	554	283	316	15	568	-182	331
61	Cicurug	Benda	TPS 019	73	226	532	271	299	15	546	-153	314
62	Cicurug	Benda	TPS 024	39	202	460	248	241	9	472	-163	250
63	Cicurug	Benda	TPS 025	33	274	528	271	307	7	542	-241	314
64	Cicurug	Carigin	TPS 004	53	204	441	230	257	15	453	-151	272
65	Cicurug	Carigin	TPS 005	72	192	468	251	264	19	480	-120	283

66	Cicurug	Carin gin	TPS 006	74	200	432	237	274	9	443	-126	283
67	Cicurug	Carin gin	TPS 008	53	254	476	251	307	14	488	-201	321
68	Cicurug	Carin gin	TPS 009	50	271	446	235	321	6	459	-221	327
69	Cicurug	Carin gin	TPS 010	92	215	446	226	307	8	458	-123	315
70	Cicurug	Cisa at	TPS 002	97	233	485	251	330	13	496	-136	343
71	Cicurug	Cisa at	TPS 006	37	192	386	197	229	13	395	-155	242
72	Cicurug	Cisa at	TPS 014	38	202	461	237	240	4	473	-164	244
73	Cicurug	Cisa at	TPS 017	107	231	528	269	338	25	542	-124	363
74	Cicurug	Kutaj aya	TPS 003	71	274	547	284	345	16	562	-203	361
75	Cicurug	Kutaj aya	TPS 004	109	228	520	271	337	24	532	-119	361
76	Cicurug	Kutaj aya	TPS 016	64	184	457	225	248	19	468	-120	267
77	Cicurug	Kutaj aya	TPS 017	48	299	472	246	347	18	484	-251	365
78	Cicurug	Kutaj aya	TPS 019	56	169	529	283	225	70	543	-113	295
79	Cicurug	Kutaj aya	TPS 025	55	182	406	209	237	17	417	-127	254
80	Cicurug	Kutaj aya	TPS 027	68	225	466	239	293	15	478	-157	308
81	Cicurug	Kutaj aya	TPS 028	62	261	579	295	323	20	594	-199	343
82	Cicurug	Meka r Sari	TPS 006	100	228	550	281	328	17	564	-128	345
83	Cicurug	Meka r Sari	TPS 007	72	194	469	233	266	18	481	-122	284
84	Cicurug	Pasa waha n	TPS 002	46	221	438	234	267	5	449	-175	272
85	Cicurug	Pasa waha n	TPS 004	39	277	470	225	316	15	482	-238	331
86	Cicurug	Pasa waha n	TPS 007	58	202	389	195	260	11	399	-144	271
87	Cicurug	Pasa waha n	TPS 009	86	327	553	259	413	9	567	-241	422
88	Cicurug	Pasa waha n	TPS 011	84	217	514	257	301	29	527	-133	330
89	Cicurug	Pasa waha n	TPS 012	77	207	478	239	284	18	490	-130	302

90	Cicurug	Pasawahan	TPS 015	47	168	418	220	215	22	429	-121	237
91	Cicurug	Purwasari	TPS 001	86	214	569	289	300	12	584	-128	312
92	Cicurug	Purwasari	TPS 009	67	216	432	225	283	16	443	-149	299
94	Cicurug	Tenjolaya	TPS 004	42	236	421	216	278	11	432	-194	289
95	Cicurug	Tenjolaya	TPS 005	82	193	471	245	275	14	483	-111	289
96	Cicurug	Tenjolaya	TPS 011	58	208	515	280	266	22	529	-150	288
167	Kalapa Nunggal	Palasari Girang	TPS 006	102	220	591	301	322	12	606	-118	334
169	Kalapa Nunggal	Pulosari	TPS 009	60	204	418	208	264	8	429	-144	272
170	Kalapa Nunggal	Pulosari	TPS 012	55	280	463	241	335	4	475	-225	339
171	Kalapa Nunggal	Pulosari	TPS 013	47	206	454	217	253	10	466	-159	263
173	Kalapa Nunggal	Walang Sari	TPS 002	78	200	494	258	278	12	507	-122	290
174	Kalapa Nunggal	Walang Sari	TPS 007	56	212	535	273	268	7	549	-156	275
175	Kalapa Nunggal	Walang Sari	TPS 008	58	168	477	248	226	5	490	-110	231
176	Kalapa Nunggal	Walang Sari	TPS 010	27	165	356	187	192	8	365	-138	200
177	Parakan Salak	Bojongan Asih	TPS 003	84	233	518	266	317	14	531	-149	331
178	Parakan Salak	Bojongan Asih	TPS 004	83	252	533	266	335	17	547	-169	352
179	Parakan Salak	Bojongan Asih	TPS 006	107	277	591	295	384	19	606	-170	403
180	Parakan Salak	Bojongan Asih	TPS 007	73	299	578	283	372	8	594	-226	380
186	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 001	70	302	563	290	372	20	578	-232	392
187	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 002	90	242	449	236	332	8	461	-152	340
188	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 003	53	240	454	244	293	16	467	-187	309

189	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 004	84	284	570	289	368	27	585	-200	395
190	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 005	66	196	457	229	262	4	469	-130	266
191	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 006	50	259	461	245	309	8	473	-209	317
192	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 007	62	238	462	220	300	15	473	-176	315
193	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 008	71	211	461	228	282	9	473	-140	291
194	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 009	70	257	458	239	327	1	470	-187	328
195	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 011	71	269	499	242	340	9	512	-198	349
196	Parakan Salak	Suka kersa	TPS 012	107	222	513	264	329	13	525	-115	342
197	Parakan Salak	Suka tani	TPS 001	17	289	426	227	306	10	437	-272	316
198	Parakan Salak	Suka tani	TPS 002	80	290	553	280	370	19	567	-210	389
199	Parakan Salak	Suka tani	TPS 003	82	258	556	271	340	7	570	-176	347
200	Parakan Salak	Suka tani	TPS 004	93	310	587	283	403	16	602	-217	419
201	Parakan Salak	Suka tani	TPS 005	31	237	461	227	268	8	473	-206	276
202	Parakan Salak	Suka tani	TPS 006	78	221	467	240	299	13	479	-143	312
203	Parakan Salak	Suka tani	TPS 007	38	241	477	248	279	17	489	-203	296
204	Parakan Salak	Suka tani	TPS 008	68	202	494	260	270	13	507	-134	283
205	Parakan Salak	Suka tani	TPS 009	73	263	515	255	336	5	682	-190	341
206	Parakan Salak	Suka tani	TPS 010	80	265	522	259	345	13	536	-185	358
213	Caringin	Cijen gkol	TPS 002	23	172	407	217	195	28	366	-149	223
227	Cibadank	Karangtengah	TPS 002	44	243	458	223	287	20	470	-199	307
228	Cibadank	Karangtengah	TPS 003	82	213	491	233	295	13	504	-131	308
229	Cibadank	Karangtengah	TPS 011	116	218	538	262	334	18	552	-102	352
230	Cibadank	Karangtengah	TPS 016	32	243	425	230	275	6	436	-211	281
231	Cibadank	Suka sirna	TPS 001	56	214	490	254	270	11	503	-158	281
232	Cibadank	Suka sirna	TPS 014	78	198	583	309	276	14	598	-120	290
233	Cibadank	Tenjo jaya	TPS 008	54	165	458	250	219	10	470	-111	229

234	Cibada k	Tenjo jaya	TPS 009	78	191	540	285	269	8	554	-113	277
235	Cibada k	Warnajati	TPS 004	112	223	518	276	335	17	531	-111	352
321	Sukabumi	Parungseah	TPS 001	71	267	494	263	338	9	507	-196	347
322	Sukabumi	Parungseah	TPS 002	39	277	480	233	316	15	492	-238	331
323	Sukabumi	Parungseah	TPS 016	82	214	452	240	296	32	464	-132	328
324	Sukabumi	Perbawati	TPS 002	114	252	537	279	366	20	551	-138	386
325	Sukabumi	Perbawati	TPS 004	47	278	446	220	325	17	458	-231	342
326	Sukabumi	Perbawati	TPS 005	59	235	403	201	294	9	414	-176	303
327	Sukabumi	Perbawati	TPS 011	6	200	387	185	206	1	397	-194	207
328	Sukabumi	Sudajaya Girang	TPS 007	107	213	581	294	320	19	599	-106	339
329	Sukabumi	Sukajaya	TPS 001	87	200	427	222	287	13	437	-113	300
330	Sukabumi	Sukajaya	TPS 006	76	200	516	259	276	23	529	-124	299
331	Sukabumi	Warnasari	TPS 009	110	211	539	276	321	15	551	-101	336
332	Sukabumi	Warnasari	TPS 010	82	185	486	238	267	22	475	-103	289
333	Sukaraja	Langensari	TPS 011	39	164	373	194	203	9	383	-125	212
334	Sukaraja	Langensari	TPS 012	19	166	304	152	185	13	312	-147	198
335	Sukaraja	Langensari	TPS 015	71	200	506	252	271	71	519	-129	342
336	Sukaraja	Limbangan	TPS 003	86	213	555	268	299	26	569	-127	325
337	Sukaraja	Limbangan	TPS 017	101	137	407	208	238	12	418	-36	250
338	Sukaraja	Margaluyu	TPS 003	64	245	550	271	309	73	564	-181	382
343	Sukaraja	Sukaraja	TPS 028	105	249	597	290	354	16	609	-144	370
435	Surade	Citanagar	TPS 002	33	236	597	303	269	11	612	-203	280
436	Surade	Citanagar	TPS 003	65	222	528	264	287	11	542	-157	298

437	Surade	Citan glar	TPS 004	41	201	355	189	242	8	364	-160	250
438	Surade	Citan glar	TPS 005	72	182	472	225	254	6	484	-110	260
439	Surade	Citan glar	TPS 006	62	183	408	193	245	7	418	-121	252
440	Surade	Citan glar	TPS 011	27	206	412	208	233	7	423	-179	240
442	Surade	Jaga mukti	TPS 009	118	242	599	305	360	11	614	-124	371
450	Surade	Pasir Ipi	TPS 012	78	207	525	271	285	8	539	-129	293
451	Surade	Pasir Ipi	TPS 015	32	217	419	204	249	6	430	-185	255
452	Surade	Pasir Ipi	TPS 017	53	178	440	217	231	0	450	-125	231
453	Surade	Sura de	TPS 008	91	209	523	261	300	8	535	-118	308

- (b) Bahwa data-data yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 4 di atas, yaitu di kolom “Suara Sah dan Tidak Sah” adalah penyajian yang salah dan tidak didasarkan data yang valid.
- (c) Bahwa berdasarkan tabulasi di atas, Pemohon keliru dalam menguraikan “Suara Sah dan Tidak Sah” dengan memasukkan angka yang diperoleh dari Surat Suara yang diterima oleh TPS ditambah dengan 2,5%;
- (d) Bahwa angka pada kolom “Suara Sah dan Tidak Sah” harus sama persis dengan kolom “Total Pemilih”, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah melakukan banyak kesalahan dalam menyajikan tabulasi dalam permohonan *a quo*;

2) PEMOHON SALAH DALAM MENGURAIKAN TOTAL PEMILIH DALAM PERMOHONAN A QUO

- (a) Bahwa data-data yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 4 di atas, yaitu di kolom “Total Pemilih” terdapat banyak kesalahan pengisian data;
- (b) Bahwa tabulasi yang disajikan oleh Pemohon memuat banyak kesalahan angka pada kolom “Total Pemilih”,

dimana dalam tabulasi tersebut Pemohon mencantumkan data pemilih laki-laki dalam DPT pada kolom “Total Pemilih”, seharusnya kolom “Total Pemilih” yang dimaksud adalah penjumlahan dari kolom “Suara Sah” ditambah “Suara Tidak Sah”;

- (c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepantasnya terdapat selisih antara “Total Pemilih” dengan “Suara Sah dan Tidak Sah”, hal tersebut karena kesalahan dari Pemohon dalam mencantumkan angka-angka tersebut dalam tabulasi pada permohonannya;
- (d) Bahwa seharusnya dalam penyajian tabulasi tersebut agar tidak terjadi kesalahan seperti pada poin 1) dan 2) di atas, Pemohon harusnya menyajikan dua versi tabulasi, yaitu tabulasi yang benar menurut versi Pemohon dan tabulasi penghitungan menurut versi Termohon. Dimana dari versi tabulasi yang benar menurut versi Pemohon ketika disandingkan dengan tabulasi penghitungan menurut versi Termohon, maka akan terlihat dengan jelas dan terang-benderang dimana kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon apabila ada (*quad non*). sehingga kemudian pada akhirnya demi kepastian hukum dapat memudahkan bagi Hakim, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu untuk memberikan pertimbangan hukum, jawaban, tanggapan, maupun keterangan;
- (e) Bahwa selanjutnya tabulasi yang disajikan oleh Pemohon pada posita angka 3, juga tidak menunjukkan terkait adanya penggelembungan suara yang dimaksud oleh Pemohon, seharusnya apabila ingin menggambarkan adanya penggelembungan suara perlu diuraikan secara jelas bagaimana pergeseran suara yang terjadi di setiap TPS yang dimaksud;

(f) Bahwa dengan terdapat kesalahan dalam penyajian tabulasi dan ketidakjelasan dalam menggambarkan bagaimana terjadinya penggelembungan suara sebagaimana yang dimaksud dalam uraian di atas, tabulasi yang disajikan menjadi tidak jelas, sehingga dengan demikian tabulasi tersebut seharusnya dikesampingkan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah.

b) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka Mahkamah memiliki dasar hukum untuk menentukan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan.

5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

- a) Bahwa dalam posita angka 3 dalam permohonannya, Pemohon menjadikan 469 TPS yang tersebar di 27 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi yang diduga terjadi penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut 2, dengan berdasarkan sampling indikasi penggelembungan suara terjadi di TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, dan TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu;
- b) Bahwa sementara dalam petitum angka 3 dalam permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng sebagai lokasi TPS dari 469 TPS yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya untuk memerintahkan Termohon untuk membuka seluruh daftar hadir pemilih di seluruh TPS se-Kabupaten Sukabumi, serta menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang;
- c) Bahwa dengan demikian, maka Pemohon ternyata dalam Petitumnya tidak menjadikan TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng sebagai *locus* pada 469 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sementara dalam positanya pada angka 3, TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng **DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU**

LOCUS SAMPLING INDIKASI terjadinya penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon kepada Termohon;

- d) Bahwa dengan tidak dimasukkannya TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng sebagai *locus* yang dimintakan Pemohon dalam petitumnya, maka terbukti dengan Jelas, Nyata dan Tegas bahwa Permohonan Pemohon dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas, dan kabur;
- e) Bahwa pada petitum angka 4 dan angka 5 dalam permohonannya, Pemohon juga memintakan putusan yang terkait perolehan suara di 469 TPS yang tidak memasukkan TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng sebagai *locus* yang dimintakan Pemohon dalam petitumnya sebagaimana table *locus* 469 TPS pada petitum angka 3;
- f) Bahwa dengan demikian semua permintaan putusan kepada Mahkamah oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah **TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR**, sehingga cukup alasan dan berdasar hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah diuraikan Termohon di atas, mulai dari eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dan eksepsi salah melakukan *nazegelen* alat bukti, maka telah berdasar dan beralasan hukum jika permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslast*), adapun dalil Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, secara

mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok permohonan ini;

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyandingkan data kekeliruan sebagaimana yang diatur menurut dan tata cara mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan PMK 3/2024;
- c. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang dijelaskan Pemohon tentang adanya penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi;
- d. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan terang-benderang bagaimana terjadinya penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Dimana seharusnya Pemohon menguraikan secara jelas bagaimana terjadinya penggelembungan suara yang terjadi, apakah terjadi pada proses penghitungan suara dan/atau rekapitulasi suara di tingkat KPPS, PPK, dan/atau di KPU Kabupaten;
- e. Bahwa selanjutnya terkait penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya hanya membuktikan dengan melakukan sampling indikasi di 3 TPS, yaitu TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu. Metode sampling indikasi yang hanya menggunakan sampling pada 3 (tiga) TPS ini sangat tidak representatif untuk menggeneralisir terjadinya keadaan yang sama pada 469 TPS di 27 Kecamatan. Dengan demikian dalil Pemohon terkait penggelembungan suara adalah tidak benar, ilusif serta mengada-ngada, bahkan cenderung tendensius dan manipulatif;
- f. Bahwa Termohon dapat jelaskan dan uraikan data penghitungan yang benar pada 469 TPS di 27 Kecamatan yang dianggap oleh Pemohon terdapat penggelembungan suara, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Cisolok

Tabel 5: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-473)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Caringin	9	20	165	20	165	0	0	Bukti T-3
Caringin	11	43	171	43	171	0	0	Bukti T-4
Cicadas	8	16	308	16	308	0	0	Bukti T-5
Cicadas	9	59	230	59	230	0	0	Bukti T-6
Cicadas	10	44	234	44	234	0	0	Bukti T-7
Cisolok	8	108	243	108	243	0	0	Bukti T-8
Gunungkaramat	3	114	161	114	161	0	0	Bukti T-9
Gunungkaramat	4	36	180	36	180	0	0	Bukti T-10
Gunungtanjung	4	76	196	76	196	0	0	Bukti T-11
Karangpapak	2	93	273	93	273	0	0	Bukti T-12
Karangpapak	5	94	259	94	259	0	0	Bukti T-13
Karangpapak	8	108	222	108	222	0	0	Bukti T-14
Karangpapak	9	87	225	87	225	0	0	Bukti T-15
Pasirbaru	9	63	176	63	176	0	0	Bukti T-16
Pasirbaru	10	46	179	46	179	0	0	Bukti T-17
Sirnaresmi	5	56	259	56	259	0	0	Bukti T-18
Sirnaresmi	6	51	192	51	192	0	0	Bukti T-19
Sirnaresmi	7	36	369	36	369	0	0	Bukti T-20
Sirnaresmi	8	45	272	45	272	0	0	Bukti T-21
Sukarame	5	73	247	73	247	0	0	Bukti T-22
Wanajaya	3	64	195	64	195	0	0	Bukti T-23
Wangunsari	1	80	198	80	198	0	0	Bukti T-24

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

2. Kecamatan Palabuhanratu

Tabel 6: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TPS	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-474)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Tonjong	13	28	164	28	164	0	0	Bukti T-32
Palabuhanratu	24	59	223	59	223	0	0	Bukti T-30
	26	50	249	50	249	0	0	Bukti T-31
Cibodas	8	58	181	58	181	0	0	Bukti T-25
	13	72	196	72	196	0	0	Bukti T-26
Pasirsuren	16	15	142	15	142	0	0	Bukti T-29

Cikadu	6	65	213	65	213	0	0	Bukti T-27
Citarik	6	96	221	96	221	0	0	Bukti T-28

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

3. Kecamatan Simpenan

Tabel 7 : Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-475)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cidadap	12	74	196	74	196	0	0	Bukti T-33
	15	53	208	53	208	0	0	Bukti T-34
	22	48	179	48	179	0	0	Bukti T-35
	24	22	196	22	196	0	0	Bukti T-36
	26	26	146	26	146	0	0	Bukti T-37
Kertajaya	14	57	202	57	202	0	0	Bukti T-38
Loji	1	93	224	93	224	0	0	Bukti T-39
	4	81	236	81	236	0	0	Bukti T-40
	9	54	284	54	284	0	0	Bukti T-41
	10	52	175	52	175	0	0	Bukti T-42
	11	32	229	32	229	0	0	Bukti T-43
	12	16	235	16	235	0	0	Bukti T-44
Mekarasih	3	29	178	29	178	0	0	Bukti T-45

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

4. Kecamatan Bojonggenteng

Tabel 8 : Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TPS	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-476)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cipanengah	1	44	304	44	304	0	0	Bukti T-47
Cipanengah	2	26	411	26	411	0	0	Bukti T-48
Cipanengah	5	73	216	73	216	0	0	Bukti T-49
Cibodas	13	44	200	44	200	0	0	Bukti T-46

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

5. Kecamatan Cicurug

Tabel 9 : Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

DESA	TP S	C.Hasil- KWK- Bupati		D.Hasil Kecamat an-KWK- Bupati (Bukti T-477)		Selisih		NOMOR ALAT BUKTI
		Paslo n 1	Paslo n 2	Paslo n 1	Paslo n 2	Paslo n 1	Paslo n 2	
Benda	1	34	258	34	258	0	0	Bukti T-50
Benda	2	68	265	68	265	0	0	Bukti T-51
Benda	3	60	304	60	304	0	0	Bukti T-52
Benda	4	98	229	98	229	0	0	Bukti T-53
Benda	5	99	239	99	239	0	0	Bukti T-54
Benda	6	78	228	78	228	0	0	Bukti T-55
Benda	8	68	188	68	188	0	0	Bukti T-56
Benda	10	74	197	74	197	0	0	Bukti T-57
Benda	11	75	185	75	185	0	0	Bukti T-58
Benda	12	82	207	82	207	0	0	Bukti T-59
Benda	16	77	255	77	255	0	0	Bukti T-60
Benda	17	101	252	101	252	0	0	Bukti T-61
Benda	18	67	249	67	249	0	0	Bukti T-62
Benda	19	73	226	73	226	0	0	Bukti T-63
Benda	24	39	202	39	202	0	0	Bukti T-64
Benda	25	33	274	33	274	0	0	Bukti T-65

Caringin	4	53	204	53	204	0	0	Bukti T-66
Caringin	5	72	192	72	192	0	0	Bukti T-67
Caringin	6	74	200	74	200	0	0	Bukti T-68
Caringin	8	53	254	53	254	0	0	Bukti T-69
Caringin	9	50	271	50	271	0	0	Bukti T-70
Caringin	10	92	215	92	215	0	0	Bukti T-71
Cisaat	2	97	233	97	233	0	0	Bukti T-72
Cisaat	6	37	192	37	192	0	0	Bukti T-73
Cisaat	14	38	202	38	202	0	0	Bukti T-74
Cisaat	17	107	231	107	231	0	0	Bukti T-75
Kutajaya	3	71	274	71	274	0	0	Bukti T-76
Kutajaya	4	109	228	109	228	0	0	Bukti T-77
Kutajaya	16	64	184	64	184	0	0	Bukti T-78
Kutajaya	17	48	299	48	299	0	0	Bukti T-79
Kutajaya	19	56	169	56	169	0	0	Bukti T-80
Kutajaya	25	55	182	55	182	0	0	Bukti T-81
Kutajaya	27	68	225	68	225	0	0	Bukti T-82
Kutajaya	28	62	261	62	261	0	0	Bukti T-83
Mekarsari	6	100	228	100	228	0	0	Bukti T-84
Mekarsari	7	72	194	72	194	0	0	Bukti T-85
Pasawahan	2	46	221	46	221	0	0	Bukti T-86
Pasawahan	4	39	277	39	277	0	0	Bukti T-87
Pasawahan	7	58	202	58	202	0	0	Bukti T-88
Pasawahan	9	86	327	86	327	0	0	Bukti T-89
Pasawahan	11	84	217	84	217	0	0	Bukti T-90
Pasawahan	12	77	207	77	207	0	0	Bukti T-91
Pasawahan	15	47	168	47	168	0	0	Bukti T-92
Purwasari	1	86	214	86	214	0	0	Bukti T-93
Purwasari	9	67	216	67	216	0	0	Bukti T-94
Purwasari	10	79	204	79	204	0	0	Bukti T-95
Tenjolaya	4	42	236	42	236	0	0	Bukti T-96
Tenjolaya	5	82	193	82	193	0	0	Bukti T-97
Tenjolaya	11	58	208	58	208	0	0	Bukti T-98

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat**

penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

6. Kecamatan Cidahu

Tabel 10: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-478)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
CIDAHU	2	54	165	54	165	0	0	Bukti T-99
CIDAHU	4	50	252	50	252	0	0	Bukti T-100
CIDAHU	5	62	220	62	220	0	0	Bukti T-101
CIDAHU	6	71	222	71	222	0	0	Bukti T-102
CIDAHU	7	25	238	25	238	0	0	Bukti T-103
CIDAHU	8	59	176	59	176	0	0	Bukti T-104
CIDAHU	10	40	198	40	198	0	0	Bukti T-105
CIDAHU	11	73	216	73	216	0	0	Bukti T-106
CIDAHU	12	57	182	57	182	0	0	Bukti T-107
CIDAHU	14	60	233	60	233	0	0	Bukti T-108
CIDAHU	15	49	212	49	212	0	0	Bukti T-109
CIDAHU	16	37	165	37	165	0	0	Bukti T-110
CIDAHU	17	41	187	41	187	0	0	Bukti T-111
GIRIJAYA	2	57	226	57	226	0	0	Bukti T-112
GIRIJAYA	4	23	138	23	138	0	0	Bukti T-113
GIRIJAYA	5	39	193	39	193	0	0	Bukti T-114
GIRIJAYA	6	50	219	50	219	0	0	Bukti T-115
GIRIJAYA	7	42	209	42	209	0	0	Bukti T-116
GIRIJAYA	8	90	248	90	248	0	0	Bukti T-117
GIRIJAYA	9	39	164	39	164	0	0	Bukti T-118
GIRIJAYA	12	50	242	50	242	0	0	Bukti T-119
GIRIJAYA	15	83	223	83	223	0	0	Bukti T-120
JAYABAKTI	1	75	263	75	263	0	0	Bukti T-121
JAYABAKTI	2	48	275	48	275	0	0	Bukti T-122
JAYABAKTI	4	67	224	67	224	0	0	Bukti T-123
JAYABAKTI	5	105	240	105	240	0	0	Bukti T-124
JAYABAKTI	7	80	216	80	216	0	0	Bukti T-125
JAYABAKTI	8	45	293	45	293	0	0	Bukti T-126
JAYABAKTI	9	74	245	74	245	0	0	Bukti T-127
JAYABAKTI	11	68	220	68	220	0	0	Bukti T-128
JAYABAKTI	14	72	290	72	290	0	0	Bukti T-129
JAYABAKTI	16	69	223	69	223	0	0	Bukti T-130
JAYABAKTI	17	53	243	53	243	0	0	Bukti T-131
PASIRDOTON	1	57	184	57	184	0	0	Bukti T-132
PASIRDOTON	2	71	207	71	207	0	0	Bukti T-133
PASIRDOTON	3	52	172	52	172	0	0	Bukti T-134
PASIRDOTON	4	38	208	38	208	0	0	Bukti T-135
PASIRDOTON	5	55	171	55	171	0	0	Bukti T-136

PASIRDOTON	6	47	229	47	229	0	0	Bukti T-137
PASIRDOTON	10	16	178	16	178	0	0	Bukti T-138
PONDOKAS O TENGAH	3	66	247	66	247	0	0	Bukti T-139
PONDOKAS O TENGAH	4	37	177	37	177	0	0	Bukti T-140
PONDOKAS O TENGAH	5	55	227	55	227	0	0	Bukti T-141
PONDOKAS O TENGAH	6	85	235	85	235	0	0	Bukti T-142
PONDOKAS O TENGAH	7	43	161	43	161	0	0	Bukti T-143
PONDOKAS O TENGAH	9	88	216	88	216	0	0	Bukti T-144
PONDOKAS O TENGAH	12	77	211	77	211	0	0	Bukti T-145
PONDOKAS O TONGGOH	1	62	237	62	237	0	0	Bukti T-146
PONDOKAS O TONGGOH	3	35	219	35	219	0	0	Bukti T-147
PONDOKAS O TONGGOH	4	72	225	72	225	0	0	Bukti T-148
PONDOKAS O TONGGOH	5	77	275	77	275	0	0	Bukti T-149
PONDOKAS O TONGGOH	6	89	213	89	213	0	0	Bukti T-150
PONDOKAS O TONGGOH	7	37	153	37	153	0	0	Bukti T-151
PONDOKAS O TONGGOH	11	95	216	95	216	0	0	Bukti T-152
TANGKIL	1	122	381	122	381	0	0	Bukti T-153
TANGKIL	3	25	138	25	138	0	0	Bukti T-154
TANGKIL	6	41	306	41	306	0	0	Bukti T-155
TANGKIL	7	98	252	98	252	0	0	Bukti T-156
TANGKIL	8	72	266	72	266	0	0	Bukti T-157
TANGKIL	9	88	217	88	217	0	0	Bukti T-158
TANGKIL	11	42	260	42	260	0	0	Bukti T-159
TANGKIL	12	86	206	86	206	0	0	Bukti T-160
TANGKIL	14	55	256	55	256	0	0	Bukti T-161

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

7. Kecamatan Kabandungan

Tabel 11 : Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil-KWK- Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-479)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cianaga	1	32	159	32	159	0	0	Bukti T-162
	2	34	213	34	213	0	0	Bukti T-163
	3	18	171	18	171	0	0	Bukti T-164
Cipeuteuy	11	51	168	51	168	0	0	Bukti T-165
Tugubandung	6	42	205	42	205	0	0	Bukti T-166

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.**

8. Kecamatan Kalapa Nunggal

Tabel 12 : Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-480)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Palasarigirang	2	52	212	52	212	0	0	Bukti T-167
Palasarigirang	3	50	194	50	194	0	0	Bukti T-168
Palasarigirang	6	102	220	102	220	0	0	Bukti T-169
Palasarigirang	10	80	280	80	280	0	0	Bukti T-170
Pulosari	9	60	204	60	204	0	0	Bukti T-171
Pulosari	12	55	280	55	280	0	0	Bukti T-172
Pulosari	13	47	206	47	206	0	0	Bukti T-173
Pulosari	14	90	257	90	257	0	0	Bukti T-174
Walangsari	2	78	200	78	200	0	0	Bukti T-175
Walangsari	7	56	212	56	212	0	0	Bukti T-176
Walangsari	8	58	168	58	168	0	0	Bukti T-177
Walangsari	10	27	165	27	165	0	0	Bukti T-178

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;**

Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

9. Kecamatan Parakan Salak

Tabel 13: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-481)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Bojongasih	03	84	233	84	233	0	0	Bukti T-179
Bojongasih	04	83	252	83	252	0	0	Bukti T-180
Bojongasih	06	107	277	107	277	0	0	Bukti T-181
Bojongasih	07	73	299	73	299	0	0	Bukti T-182
Bojonglongok	01	65	182	65	182	0	0	Bukti T-183
lebaksari	07	60	236	60	236	0	0	Bukti T-184
Parakansalak	08	59	228	59	228	0	0	Bukti T-185
Parakansalak	10	64	178	64	178	0	0	Bukti T-186
Parakansalak	11	28	149	28	149	0	0	Bukti T-187
Sukakersa	01	70	302	70	302	0	0	Bukti T-188
Sukakersa	02	90	242	90	242	0	0	Bukti T-189
Sukakersa	03	53	240	53	240	0	0	Bukti T-190
Sukakersa	04	84	284	84	284	0	0	Bukti T-191
Sukakersa	05	66	196	66	196	0	0	Bukti T-192
Sukakersa	06	50	259	50	259	0	0	Bukti T-193
Sukakersa	07	62	238	62	238	0	0	Bukti T-194
Sukakersa	08	71	211	71	211	0	0	Bukti T-195
Sukakersa	09	70	257	70	257	0	0	Bukti T-196
Sukakersa	11	71	269	71	269	0	0	Bukti T-197
Sukakersa	12	107	222	107	222	0	0	Bukti T-198
Sukatani	01	17	289	17	289	0	0	Bukti T-199
Sukatani	02	80	290	80	290	0	0	Bukti T-200
Sukatani	03	82	258	82	258	0	0	Bukti T-201
Sukatani	04	93	310	93	310	0	0	Bukti T-202
Sukatani	05	31	237	31	237	0	0	Bukti T-203
Sukatani	06	78	221	78	221	0	0	Bukti T-204
Sukatani	07	38	241	38	241	0	0	Bukti T-205
Sukatani	08	68	202	68	202	0	0	Bukti T-206
Sukatani	09	73	263	73	263	0	0	Bukti T-207
Sukatani	10	80	265	80	265	0	0	Bukti T-208

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon**, Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

10. Kecamatan Parung Kuda

Tabel 14: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil - KWK- Bupati		D.Hasil Kecamat an-KWK- Bupati (Bukti T-482)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLO N 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Pondokkas o Landeuh	2	82	198	82	198	0	0	Bukti T-210
Pondokkas o Landeuh	11	71	181	71	181	0	0	Bukti T-211
Langensari	1	97	240	97	240	0	0	Bukti T-209

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

11. Kecamatan Caringin

Tabel 15: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-483)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Caringin Wetan	04	70	181	70	181	0	0	Bukti T-212
Caringin Wetan	08	37	153	37	153	0	0	Bukti T-213
Cijengkol	01	61	237	61	237	0	0	Bukti T-214
Cijengkol	02	23	172	23	172	0	0	Bukti T-215
Cijengkol	10	52	252	52	252	0	0	Bukti T-216
Pasir Datar Indah	01	13	117	13	117	0	0	Bukti T-217
Seuseupan	02	43	330	43	330	0	0	Bukti T-218
Seuseupan	03	73	202	73	202	0	0	Bukti T-219

Seuseupan	04	47	175	47	175	0	0	Bukti T-220
Seuseupan	09	40	225	40	225	0	0	Bukti T-221
Sukamulya	10	82	169	82	169	0	0	Bukti T-222
Talaga	04	70	205	70	205	0	0	Bukti T-223
Talaga	10	89	209	89	209	0	0	Bukti T-224

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

12. Kecamatan Cibadak

Tabel 16: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil-KWK- Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-484)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cibadak	13	104	231	104	231	0	0	Bukti T-225
Ciheulang Tonggoh	12	57	229	57	229	0	0	Bukti T-226
Ciheulang Tonggoh	13	35	249	35	249	0	0	Bukti T-227
Ciheulang tonggoh	14	71	205	71	205	0	0	Bukti T-228
Karang tengah	2	44	243	44	243	0	0	Bukti T-229
Karang tengah	3	82	213	82	213	0	0	Bukti T-230
Karang tengah	11	116	218	116	218	0	0	Bukti T-231
Karang tengah	16	32	243	32	243	0	0	Bukti T-232
Sukasirna	1	56	214	56	214	0	0	Bukti T-233
Sukasirna	14	78	198	78	198	0	0	Bukti T-234

Tenjojaya	8	54	165	54	165	0	0	Bukti T-235
Tenjojaya	9	78	191	78	191	0	0	Bukti T-236
Warnajati	4	112	223	112	223	0	0	Bukti T-237

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

13. Kecamatan Cikembar

Tabel 17: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-485)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Bojongkembar	01	80	263	80	263	0	0	Bukti T-238
	15	93	227	93	227	0	0	Bukti T-239
Bojongraharja	12	58	259	58	259	0	0	Bukti T-240
Cibatu	04	77	234	77	234	0	0	Bukti T-241
Cikembar	12	80	195	80	195	0	0	Bukti T-242
Cimanggu	17	113	239	113	239	0	0	Bukti T-243
Kertaraharja	07	61	204	61	204	0	0	Bukti T-244
Parakanlima	01	92	204	92	209	0	0	Bukti T-245
	03	78	220	78	220	0	0	Bukti T-246
	06	63	224	63	224	0	0	Bukti T-247
	07	37	278	37	278	0	0	Bukti T-248
	09	43	156	43	156	0	0	Bukti T-249
	12	74	201	74	201	0	0	Bukti T-250
Sukamulya	17	78	241	78	241	0	0	Bukti T-251

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

14. Kecamatan Nagrak

Tabel 18: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-486)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Babakanpanjang	6	80	213	80	213	0	0	Bukti T-252
Babakanpanjang	7	24	261	24	261	0	0	Bukti T-253
Cihanyawar	5	150	264	150	264	0	0	Bukti T-254
Cihanyawar	6	52	232	52	232	0	0	Bukti T-255
DARMAREJA	12	78	194	78	194	0	0	Bukti T-256
Girijaya	3	87	197	87	197	0	0	Bukti T-257
Girijaya	5	73	230	73	230	0	0	Bukti T-258
Girijaya	6	57	211	57	211	0	0	Bukti T-259
Girijaya	8	24	347	24	347	0	0	Bukti T-260
Girijaya	9	85	199	85	199	0	0	Bukti T-261
Girijaya	10	57	173	57	173	0	0	Bukti T-262
Girijaya	11	42	206	42	206	0	0	Bukti T-263
Girijaya	12	83	201	83	201	0	0	Bukti T-264
Girijaya	14	67	182	67	182	0	0	Bukti T-265
Girijaya	15	59	218	59	218	0	0	Bukti T-266
Girijaya	17	34	320	34	320	0	0	Bukti T-267
Kalaparea	2	42	285	42	285	0	0	Bukti T-268
Kalaparea	3	49	170	49	170	0	0	Bukti T-269
Kalaparea	4	37	169	37	169	0	0	Bukti T-270
Kalaparea	5	87	215	87	215	0	0	Bukti T-271
Kalaparea	6	129	184	129	184	0	0	Bukti T-272
Kalaparea	8	70	200	70	200	0	0	Bukti T-273
Kalaparea	10	67	220	67	220	0	0	Bukti T-274
Kalaparea	12	60	252	60	252	0	0	Bukti T-275
Nagrak Selatan	3	79	221	79	221	0	0	Bukti T-276
Nagrak Selatan	9	110	224	110	224	0	0	Bukti T-277
Nagrak Selatan	11	95	230	95	230	0	0	Bukti T-278
Nagrak Utara	12	82	227	82	227	0	0	Bukti T-279
Nagrak Utara	22	69	255	69	255	0	0	Bukti T-280
Nagrak Utara	23	55	275	55	275	0	0	Bukti T-281
Nagrak Utara	24	26	166	26	166	0	0	Bukti T-282
Nagrak Utara	27	30	293	30	293	0	0	Bukti T-283
PAWENANG	1	93	228	93	228	0	0	Bukti T-284
PAWENANG	2	47	248	47	248	0	0	Bukti T-285
PAWENANG	3	57	296	57	296	0	0	Bukti T-286
PAWENANG	4	40	280	40	280	0	0	Bukti T-287
PAWENANG	5	65	260	65	260	0	0	Bukti T-288
PAWENANG	6	48	362	48	362	0	0	Bukti T-289
PAWENANG	7	72	264	72	264	0	0	Bukti T-290
PAWENANG	8	110	295	110	295	0	0	Bukti T-291
PAWENANG	9	93	339	93	339	0	0	Bukti T-292

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.**

Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

15. Kecamatan Cisaat

Tabel 19: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-487)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Babakan	6	126	264	126	264	0	0	Bukti T-293
Cibatu	11	130	145	130	145	0	0	Bukti T-294
CibolangKaler	1	119	248	119	248	0	0	Bukti T-295
Cisaat	1	92	235	92	235	0	0	Bukti T-296
Cisaat	4	89	228	89	228	0	0	Bukti T-297
Gunungjaya	4	73	188	73	188	0	0	Bukti T-298
Kutasirna	1	84	211	84	211	0	0	Bukti T-299
Padaasih	1	66	237	66	237	0	0	Bukti T-300
Padaasih	2	70	272	70	272	0	0	Bukti T-301
Padaasih	6	112	224	112	224	0	0	Bukti T-302
Padaasih	7	115	241	115	241	0	0	Bukti T-303
Padaasih	15	74	225	74	225	0	0	Bukti T-304
Selajambe	9	58	260	58	260	0	0	Bukti T-305
Sukamanah	16	92	243	92	243	0	0	Bukti T-306
Sukaresmi	10	110	228	110	228	0	0	Bukti T-307
Sukasari	9	138	126	138	126	0	0	Bukti T-308
Sukasari	13	95	181	95	181	0	0	Bukti T-309

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan dan **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;**

16. Kecamatan Gunung Guruh

Tabel 20: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-488)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cibentang	6	67	178	67	178	0	0	Bukti T-310
Cibolang	1	17	240	17	240	0	0	Bukti T-311
Cikujang	15	91	251	91	251	0	0	Bukti T-312

Gunungguruh	10	89	186	89	186	0	0	Bukti T-313
Gunungguruh	11	96	199	96	199	0	0	Bukti T-314
Gunungguruh	15	75	162	75	162	0	0	Bukti T-315
Mangkalaya	4	82	195	82	195	0	0	Bukti T-316
Mangkalaya	10	38	225	38	225	0	0	Bukti T-317
Mangkalaya	11	30	187	30	187	0	0	Bukti T-318

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon**. Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

17. Kecamatan Kebon Pedes

Tabel 21: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-489)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cikaret	1	90	238	90	238	0	0	Bukti T-319
Cikaret	3	83	201	83	201	0	0	Bukti T-320
Jambenenggang	7	59	204	59	204	0	0	Bukti T-321
Jambenenggang	9	32	218	32	218	0	0	Bukti T-322

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon**, Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

18. Kecamatan Sukabumi

Tabel 22: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati	D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-490)	Selisih	Nomor Alat Bukti
--------------------	---------	------------------------	--	---------	---------------------

		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
PARUNGSEAH	1	71	267	71	267	0	0	Bukti T-323
	2	39	277	39	277	0	0	Bukti T-324
	16	82	214	82	214	0	0	Bukti T-325
PERBAWATI	2	114	252	114	252	0	0	Bukti T-326
	4	47	278	47	278	0	0	Bukti T-327
	5	59	235	59	235	0	0	Bukti T-328
	11	6	200	6	200	0	0	Bukti T-329
SUDAJAYA GIRANG	7	107	213	107	213	0	0	Bukti T-330
SUKAJAYA	1	87	200	87	200	0	0	Bukti T-331
	6	76	200	76	200	0	0	Bukti T-332
WARNASARI	9	110	211	110	211	0	0	Bukti T-333
	10	82	185	82	185	0	0	Bukti T-334

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

19. Kecamatan Sukaraja

Tabel 23: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TPS	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-491)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Langensari	11	39	164	39	164	0	0	Bukti T-335
Langensari	12	19	166	19	166	0	0	Bukti T-336
Langensari	15	71	200	71	200	0	0	Bukti T-337
Limbangan	3	86	213	86	213	0	0	Bukti T-338
Limbangan	17	101	137	101	137	0	0	Bukti T-339
Margaluyu	3	64	245	64	245	0	0	Bukti T-340
Pasirhalang	12	38	174	38	174	0	0	Bukti T-341
Pasirhalang	21	74	201	74	201	0	0	Bukti T-342
Selaawi	13	105	229	105	229	0	0	Bukti T-343
Selawangi	11	108	268	108	268	0	0	Bukti T-344
Sukaraja	28	105	249	105	249	0	0	Bukti T-345

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.**

Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

20. Kecamatan Pabuaran

Tabel 24: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T- 492)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Ciwalat	1	70	224	70	224	0	0	Bukti T-347
Ciwalat	4	60	248	60	248	0	0	Bukti T-348
Ciwalat	6	47	429	47	429	0	0	Bukti T-349
Ciwalat	7	41	355	41	355	0	0	Bukti T-350
Cibadak	12	66	259	66	259	0	0	Bukti T-346
Pabuara n	2	72	204	72	204	0	0	Bukti T-351
Sirnasar i	7	68	189	68	189	0	0	Bukti T-352
Sukajay a	1	50	171	50	171	0	0	Bukti T-353
Sukajay a	2	32	271	32	271	0	0	Bukti T-354
Sukajay a	3	55	283	55	278	0	0	Bukti T-355
Sukajay a	4	47	178	47	178	0	0	Bukti T-356
Sukajay a	5	11	192	11	192	0	0	Bukti T-357
Sukajay a	6	30	156	30	156	0	0	Bukti T-358
Sukajay a	7	43	179	43	179	0	0	Bukti T-359

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

21. Kecamatan Ciemas

Tabel 25: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-493)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cibenda	1	45	296	45	296	0	0	Bukti T-360
Cibenda	2	22	248	22	248	0	0	Bukti T-361
Cibenda	4	62	223	62	223	0	0	Bukti T-362
Cibenda	6	48	217	48	217	0	0	Bukti T-363
Cibenda	7	66	232	66	232	0	0	Bukti T-364
Cibenda	8	14	223	14	223	0	0	Bukti T-365
Cibenda	9	26	262	26	262	0	0	Bukti T-366
Ciemas	1	13	129	13	129	0	0	Bukti T-367
Ciemas	2	30	177	30	177	0	0	Bukti T-368
Ciemas	4	69	206	69	206	0	0	Bukti T-369
Ciemas	11	30	145	30	145	0	0	Bukti T-370
Ciwaru	1	44	215	44	215	0	0	Bukti T-371
Ciwaru	2	31	217	31	217	0	0	Bukti T-372
Ciwaru	3	17	260	17	260	0	0	Bukti T-373
Ciwaru	4	30	200	30	200	0	0	Bukti T-374
Ciwaru	5	62	205	62	205	0	0	Bukti T-375
Ciwaru	6	45	214	45	214	0	0	Bukti T-376
Ciwaru	7	51	274	51	274	0	0	Bukti T-377
Ciwaru	8	48	220	48	220	0	0	Bukti T-378
Ciwaru	9	25	223	25	223	0	0	Bukti T-379
Ciwaru	10	44	204	44	204	0	0	Bukti T-380
Ciwaru	11	65	183	65	183	0	0	Bukti T-381
Ciwaru	12	33	223	33	223	0	0	Bukti T-382
Ciwaru	15	30	209	30	209	0	0	Bukti T-383
Mekarjaya	1	74	170	74	170	0	0	Bukti T-391
Mekarjaya	2	58	142	58	142	0	0	Bukti T-392
Mekarjaya	3	88	166	88	166	0	0	Bukti T-393
Mekarjaya	4	48	89	48	89	0	0	Bukti T-394
Mekarjaya	5	73	111	73	111	0	0	Bukti T-395
Mekarjaya	7	141	89	141	89	0	0	Bukti T-396
Mekarjaya	9	68	184	68	184	0	0	Bukti T-397
Mekarjaya	10	71	137	71	137	0	0	Bukti T-398
Mekarjaya	12	45	232	45	232	0	0	Bukti T-399
Mandrajaya	1	65	249	65	249	0	0	Bukti T-384
Mandrajaya	2	26	223	26	223	0	0	Bukti T-385
Mandrajaya	3	87	232	87	232	0	0	Bukti T-386
Mandrajaya	5	72	211	72	211	0	0	Bukti T-387
Mandrajaya	6	17	274	17	274	0	0	Bukti T-388
Mandrajaya	7	19	239	19	239	0	0	Bukti T-389
Mandrajaya	8	19	200	19	200	0	0	Bukti T-390
Tamanjaya	1	77	221	77	221	0	0	Bukti T-400
Tamanjaya	10	27	228	27	228	0	0	Bukti T-401
Tamanjaya	11	53	175	53	175	0	0	Bukti T-402

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon**. Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

22. Kecamatan Ciracap

Tabel 26: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TPS	C.Hasil-KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati (Bukti T-494)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cikangkung	7	79	201	79	201	0	0	Bukti T-403
Gunung Batu	1	52	209	52	209	0	0	Bukti T-404
Mekarsari	8	26	200	26	200	0	0	Bukti T-405
Pasir Panjang	3	49	165	49	165	0	0	Bukti T-406
Pasir Panjang	8	105	227	105	227	0	0	Bukti T-407
Purwasedar	7	63	178	63	178	0	0	Bukti T-408

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon**;

23. Kecamatan Jampang Kulon

Tabel 27: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/Kelurahan	TPS	C.Hasil-KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati (Bukti T-495)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Bojongsari	5	56	216	56	216	0	0	Bukti T-409
	8	69	208	69	208	0	0	Bukti T-410
Bojonggenteng	2	63	240	63	240	0	0	Bukti T-411
Cikarang	2	45	163	45	163	0	0	Bukti T-412
	3	71	199	71	199	0	0	Bukti T-413
Cikaranggeusan	1	59	233	59	233	0	0	Bukti T-414
	2	71	188	71	188	0	0	Bukti T-415
Ciparay	1	56	199	56	199	0	0	Bukti T-416
	3	58	202	58	202	0	0	Bukti T-417
	6	59	233	59	233	0	0	Bukti T-418

	8	85	196	85	196	0	0	Bukti T-419
Karanganyar	4	42	163	42	163	0	0	Bukti T-420
Mekarjaya	5	28	265	28	265	0	0	Bukti T-421
	6	41	224	41	224	0	0	Bukti T-422
Nagraksari	7	81	221	81	221	0	0	Bukti T-423
	11	38	223	38	223	0	0	Bukti T-424
Padajaya	5	47	164	47	164	0	0	Bukti T-425
Tanjung	6	37	211	37	211	0	0	Bukti T-426

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

24. Kecamatan Kalibunder

Tabel 28: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-496)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Balekambang	8	20	189	20	189	0	0	Bukti T-427
Sekarsari	4	47	169	47	169	0	0	Bukti T-428
Sekarsari	5	11	184	11	184	0	0	Bukti T-429
Sekarsari	7	25	163	25	163	0	0	Bukti T-430
Sukaluyu	5	49	173	49	173	0	0	Bukti T-431
Sukaluyu	7	47	175	47	175	0	0	Bukti T-432
Sukaluyu	8	48	245	48	245	0	0	Bukti T-433

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

25. Kecamatan Surade

Tabel 29: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TPS	C.Hasil-KWK- Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-497)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cipeundeuy	2	43	159	43	159	0	0	Bukti T-434
Cipeundeuy	5	43	229	43	229	0	0	Bukti T-435
Cipeundeuy	7	35	197	35	197	0	0	Bukti T-436
Citanglar	2	33	236	33	236	0	0	Bukti T-437
Citanglar	3	65	222	65	222	0	0	Bukti T-438
Citanglar	4	41	201	41	201	0	0	Bukti T-439
Citanglar	5	72	182	72	182	0	0	Bukti T-440
Citanglar	6	62	183	62	183	0	0	Bukti T-441
Citanglar	11	27	206	27	206	0	0	Bukti T-442
Citanglar	13	20	158	20	158	0	0	Bukti T-443
Jagamukti	9	118	242	118	242	0	0	Bukti T-444
Kadaleman	2	131	144	131	144	0	0	Bukti T-445
Kadaleman	4	91	201	91	201	0	0	Bukti T-446
Kadaleman	5	68	136	68	136	0	0	Bukti T-447
Kadaleman	6	100	131	100	131	0	0	Bukti T-448
Kadaleman	7	34	97	34	97	0	0	Bukti T-449
Kadaleman	8	105	224	105	224	0	0	Bukti T-450
Pasir Ipis	5	82	265	82	265	0	0	Bukti T-451
Pasir Ipis	12	78	207	78	207	0	0	Bukti T-452
Pasir Ipis	15	32	217	32	217	0	0	Bukti T-453
Pasir Ipis	17	53	178	53	178	0	0	Bukti T-454
Surade	8	91	209	91	209	0	0	Bukti T-455
Wanasari	2	57	196	57	196	0	0	Bukti T-456
Wanasari	5	37	240	37	240	0	0	Bukti T-457
Wanasari	7	24	164	24	164	0	0	Bukti T-458

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

26. Kecamatan Bantargadung

Tabel 30: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Bantargadug Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TPS	C.Hasil-KWK- Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-498)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Bantargadung	1	20	293	20	293	0	0	Bukti T-459
	2	9	268	9	268	0	0	Bukti T-460
	4	8	183	8	183	0	0	Bukti T-461

	5	19	143	19	143	0	0	Bukti T-462
Limusnunggal	6	42	182	42	182	0	0	Bukti T-463
	8	48	187	48	187	0	0	Bukti T-464
	9	37	160	37	160	0	0	Bukti T-465
	10	18	151	18	151	0	0	Bukti T-466

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

27. Kecamatan Cikakak

Tabel 31: Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi yang menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara (*quad non*):

Desa/ Kelurahan	TP S	C.Hasil- KWK-Bupati		D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati (Bukti T-499)		Selisih		Nomor Alat Bukti
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2	
Cimaja	10	52	135	52	135	0	0	Bukti T-468
Cikakak	2	79	183	79	183	0	0	Bukti T-467
Margalaksana	1	52	187	52	187	0	0	Bukti T-469
Margalaksana	2	35	230	35	230	0	0	Bukti T-470
Margalaksana	6	72	120	72	120	0	0	Bukti T-471

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 sesuai dengan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, **tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.** Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yang tidak terdapat selisih sama sekali;

- g. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian Tabel 1 sampai dengan Tabel 27 di atas, telah terbukti dengan terang, nyata dan jelas **tidak terdapat penggelembungan atau penambahan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan** sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Untuk itu, mohon Mahkamah untuk menolak seluruh dalil Pemohon terkait penggelembungan suara yang terjadi pada 469 TPS di 27 Kecamatan;

- h. Bahwa selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran proses pemilihan yang berakibat serius pada perolehan hasil akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang berupa:
 - 1. Terjadinya pelibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2. Dilakukannya praktik politik uang yang masif di beberapa kecamatan yang berdampak pada hilangnya kebebasan memilih bagi rakyat dan mempengaruhi hasil akhir pemilihan;
- i. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada huruf h di atas terkesan mengada-ngada dan kebingungan, setelah mengetahui bahwa Pemohon bukan sebagai pihak pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Sukabumi. Seharusnya Pemohon jika memang beriktikad baik untuk menegakkan demokrasi dan tidak mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, jauh-jauh hari melakukan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini diyakini oleh Termohon dikarenakan Pemohon baru mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut setelah melewati masa tenggang waktunya yaitu pada tanggal 27 November 2024, bahkan setelah dikeluarkannya Keputusan KPU Sukabumi yaitu tanggal 6 Desember 2024;
- j. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terkait TSM dan praktik politik uang ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagai pelanggaran yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, yang mana ketentuan ini merupakan syarat mutlak untuk dapat mengesampingkan penggunaan ambang batas sebagai kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan;
- k. Bahwa lebih lanjut terkait pelanggaran secara TSM, Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran di kurang lebih di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dari total keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, yang pada intinya mengenai:

a) **NETRALITAS ASN**

Tabel 32 : Dugaan Pelanggaran Terkait Netralitas ASN Menurut Pemohon (*quad non*)

No	Nama	Jabatan	Pelanggaran	Tanggal
1	Marwan Hamami	Bupati Sukabumi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi	Diduga tidak melakukan cuti ketika masa kampanye Pilkada 2024, dan menjadi bagian dari Tim Sukses dari Paslon No Urut 2.	-
			Pidatonya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah bertempat di Gor Venue Tinju yang dihadiri oleh Kepala Dusun se-Kabupaten Sukabumi yang mengarahkan para Kepala Dusun dengan semboyan “lanjutkan” yang merupakan salah satu jargon dari Paslon No Urut 2.	26 Agustus 2024

			Pidato dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional di Palabuhanratu yang mengarahkan ASN untuk tidak bersikap netral atau memberikan dukungan melalui jargon-jargon Paslon No Urut 2.	12 November 2024
			Hibah APBD kepada yayasan dan lembaga keagamaan pada masa kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp.32.785.000.000 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sarat akan kepentingan Paslon No Urut 2 karena Bupati Sukabumi melekat sebagai Tim Sukses Paslon No Urut 2.	7 November 2024
			Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor	

			800.1.3.2/Kep.6 87/BPKSDM/ 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada masa Pilkada 2024 yang sarat akan kepentingan akan kepentingan Paslon No Urut 2 karena Bupati Sukabumi melekat sebagai Tim Sukses Paslon No Urut 2. Hal tersebut melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.	
			Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800.1.3.2/Kep.7 83/BPKSDM/ 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Administratur (Camat) di Lingkungan Pemerintah	

			Kabupaten Sukabumi pada masa Pilkada 2024 yang sarat akan kepentingan akan kepentingan Paslon No Urut 2 karena Bupati Sukabumi melekat sebagai Tim Sukses Paslon No Urut 2. Hal tersebut melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.	
2	-	Dinas Pariwisata	Kegiatan Geopark Ciletuh Spektakuler di Desa Mandrajaya yang diduga sarat kepentingan untuk Paslon No Urut 2 dengan memberikan simbol salam dua jari.	9 November 2024
3	Drs. Asep Japar, M.M.	Paslon No Urut 2	Bersama-sama dengan Bupati Sukabumi melakukan pelanggaran TSM.	
4	H. Andreas, S.E.	Paslon No Urut 2	Bersama-sama dengan Bupati Sukabumi melakukan pelanggaran TSM.	

5	Ilyas Permana	KASI Perencanaan Desa Benda, Kecamatan Cicurug	Mendukung secara terang-terangan dengan menunjukkan salam 2 jari sebagai dukungan kepada Paslon No Urut 2.	27 November 2024
6	Opik	Kepala Desa Jayabakti, kecamatan Cidahu	Mendukung Paslon No Urut 2 dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan screenshot whatsapp dengan menyebarkan broadcast kepada lembaga-lembaga yang berada di PEMDES Desa Jayabakti agar patuh mengikuti perintah yang bersangkutan untuk mendukung Paslon No Urut 2	25 November 2024
7	Dirja Miharja	Kepala Desa Pulosari, Kecamatan Kapalanunggal	Secara terang-terangan menunjukkan salam dua jari sebagai dukungan kepada Paslon No Urut 2	21 Oktober 2024
8	Wardi Sutandi	Kepala Desa	Voice note keberpihakan	20 November 2024

		Cianaga, Kecamatan Kabandung an	kepada Paslon No Urut 2	
9	Yudi Guntara	Kepala Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandung an	Voice note keberpihakan kepada Paslon No Urut 2	18 November 2024
10	Yusuf alias Yusef alias Utek	Kepala Desa Cinanenga h, Kecamatan Bojong Genteng	Video TikTok berupa screenshot yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengantar Paslon No Urut 2 ke tempat kegiatan kampanye	15 Oktober 2024
11	Muhammad Yusuf	Kepala Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal	Foto yang melakukan salam dua jari bersama Staf Desa Kadununggal	22 Oktober 2024
12	-	Staf Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda	Mengarahkan warga untuk memberikan dukungan kepada Paslon No Urut 2	28 November 2024
13	Deden Anta Nurman	Kepala Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan	Mengucapkan selamat kepada Paslon No Urut 2	25 November 2024
14	Panji Purnama	Kepala Desa Gunung Guruh,	Memakai baju kaos Paslon No Urut 2	-

		Kecamatan Gurungguh		
15	Hendi Lesmana	Wakil Ketua BPD Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja	Melakukan kampanye bersama Paslon No Urut 2	30 November 2024
16	H. Encub	Ketua IPHI Kecamatan Cidahu	Melakukan kampanye Paslon No Urut 2 di sarana keagamaan di Wilayah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi,	25 November 2024
17	Abdul Aziz	Kepala Desa Cirendang, Kecamatan Cikakak	Memberikan pernyataan dukungan kepada Paslon No Urut 2 di kediaman Asep Japar.	27 November 2024
18	Ece Kurniawan	Kepala Desa Gandasoli, Kecamatan Cikakak	Memberikan pernyataan dukungan kepada Paslon No Urut 2 di kediaman Asep Japar.	27 November 2024
19	R. Wahyu Cakraningrat	Kepala Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak	Memberikan pernyataan dukungan kepada Paslon No Urut 2 di kediaman Asep Japar.	27 November 2024
			Menghadiri kegiatan paslon nomor urut 2 di rumah	25 November 2024

			kediaman anggota DPRD Fraksi Golkar Rika Yulistina	
20	Asep Ahmad Sobandi	Kepala Desa Cileungsir, Kecamatan Cikakak	Memberikan pernyataan dukungan kepada Paslon No Urut 2 di kediaman Asep Japar.	27 November 2024
21	Desi Safari	Kepala Desa Rido Galih, Kecamatan Cikakak	Memberikan pernyataan dukungan kepada Paslon No Urut 2 di kediaman Asep Japar.	27 November 2024
22	Deden Deni Wahyudin	Kepada Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak sekaligus sebagai Ketua DPC APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia)	Melakukan deklarasi mendukung Paslon No Urut 2 di rumah Deden Deni Wahyudin di Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak.	27 November 2024
			Bersama Kepala Desa Sukakersa melakukan deklarasi mendukung Asep Japar Rumah Makan Joglo Kota Sukabumi.	10 November 2024
23	Aum Ruhyadi	Kepala Desa Padasih, Kecamatan Cisaat	Melakukan deklarasi mendukung Paslon No Urut 2 di rumah	27 November 2024

		sekaligus sebagai Ketua Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi	Deden Deni Wahyudin di Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak.	
			Bersama Kepala Desa Padasih melakukan deklarasi mendukung Asep Japar Rumah Makan Joglo Kota Sukabumi.	10 November 2024
24	Heri Kurniawan	Kepala Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak	Melakukan intimidasi kepada pimpinan sebuah perusahaan swasta berupa ancaman kepada karyawan perusahaan peternakan ayam di Kalaparea, Kecamatan Nagrak yang menjadi pendukung Paslon No Urut 1.	27 November 2024
25	Uus Heryanto	Kepala UPTD Pasar Palabuhanratu	Memberikan pengarahan untuk mendukung Paslon No Urut 2	27 November 2024
26	-	-	Whatsapp Group yang	27 November 2024

			bernama “Kades AA Well” yang beranggotakan para Kepala Desa Pendukung Paslon No Urut 2	
27	Samsul	Kepala Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin	Menuliskan komentar pada chat Group Whatsapp mendukung Paslon No Urut 2.	-
28	Agung Pratama Putra	Kepala Desa Karang Tengah	Bersama dengan perangkat desa melakukan selebrasi kemenangan Paslon No Urut 2.	28 November 2024
29	Yudi Mulyadi	Kepala Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak	Memberikan dukungan dengan hadir pada kampanye, berfoto bersama, dan melakukan deklarasi dukungan bersama Staf Desa kepada Paslon No Urut 2.	28 November 2024
30	Dading	Camat Jampang Kulon	Mengarahkan staf pegawai kecamatan untuk mendukung Paslon No Urut 2.	27 November 2024

31	Ade Hermawan	Kepala Desa Padjaya, Kecamatan Jampang Kulon	Berfoto dengan memberikan salam dua jari sebagai bentuk dukungan kepada Paslon No Urut 2.	25 November 2024
32	-	Pengawas Kelurahan Desa Benda Cicurug	Memberikan simbol dua jari setelah mencoblos sebagai bentuk keberpihakan kepada Paslon No Urut 2.	28 November 2024
33	Usep Saepurohmat	Kepala Desa Cikaret, Kecamatan Kebon Pedes	Berfoto dengan Paslon No Urut 2 dan Dirut Pesona Wisata atas nama Ase Riyadi.	27 November 2024
34	Hilman Permana	Kepala Desa Jambe Nenggang, Kecamatan Kebon Pedes	Berfoto dengan Paslon No Urut 2 dan Dirut Pesona Wisata atas nama Ase Riyadi.	27 November 2024
35	Oban Sobandi	Kepala desa Cijengkol, Kecamatan Caringin	Menghadiri dan mengikuti deklarasi dukungan kepada Paslon No Urut 2 dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila se-Dapil III (tiga) yang bertempat di Sekretariat PAC Pemuda Pancasila	30 Oktober

			Kecamatan Cibadak.	
			Bersama Kepala desa Sukamulya mengucapkan Jargon dan isyarat dengan gerakan 2 jari sebagai keberpihakan atau dukungan pada paslon nomor urut 2 bertempat di Mushalla Kantor Kepolisian Sektor Caringin	
36	Mahdan Z.A	Kepala Desa Sukamulya	Bersama Kepala Desa Cijengkol mengucapkan Jargon dan isyarat dengan gerakan 2 jari sebagai keberpihakan atau dukungan pada paslon nomor urut 2 bertempat di Mushalla Kantor Kepolisian Sektor Caringin	16 Oktober 2024
37	Ajat	Kepala Desa Mandaraja, Kecamatan Ciemas	Mengumpulkan warga untuk mendukung paslon nomor 2	25 November 2024
38	Tutang Setiawan	Kepala Desa Nagrak Selatan	Melakukan pertemuan bersama dengan Calon Bupati Asep Japar untuk	3 Desember 2024

			mendukung paslon no Urut 02	
39	-	Kepala Desa Sukatani	Melakukan pertemuan para Kepala Desa yaitu bersama dengan Kepala Desa Buniwangi, Kepala Desa Gunung Sungging, Kepala Desa Cipeundeuy, Kepala Desa Warnasari, Kepala Desa Pasir Ipis Kec. Surade di kediaman Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi dengan memakai baju bergambar Asep Japar	25 November 2024
40	Dadan	Kepala Desa Buniwangi	Melakukan pertemuan para Kepala Desa yaitu bersama dengan Kepala Sukatani, Kepala Desa Gunung Sungging, Kepala Desa Cipeundeuy, Kepala Desa Warnasari, Kepala Desa Pasir Ipis Kec. Surade di	25 November 2024

			kediaman Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi dengan memakai baju bergambar Asep Japar	
41	Nanang	Kepala Desa Gunung Sungging	Melakukan pertemuan para Kepala Desa yaitu bersama dengan Kepala Sukatani, Kepala Desa Buniwangi, Kepala Desa Cipeundeuy, Kepala Desa Warnasari, Kepala Desa Pasir Ipis Kec. Surade di kediaman Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi dengan memakai baju bergambar Asep Japar.	25 November 2024
42	Bakang	Kepala Desa Cipeundeuy	Melakukan pertemuan para Kepala Desa yaitu bersama dengan Kepala Sukatani, Kepala Desa Gunung Sungging Kepala Desa Buniwangi, Kepala Desa Warnasari, Kepala Desa	25 November 2024

			Pasir Ipis Kec. Surade di kediaman Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi dengan memakai baju bergambar Asep Japar.	
43	Sudarmi	Kepala Desa Warnasari,	Melakukan pertemuan para Kepala Desa yaitu bersama dengan Kepala Sukatani, Kepala Desa Gunung Sungging Kepala Desa Buniwangi, Kepala Desa Cipeundeuy, Kepala Desa Pasir Ipis Kec. Surade di kediaman Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi dengan memakai baju bergambar Asep Japar.	25 November 2024
44	Nandang	Kepala Desa Pasir Ipis	Melakukan pertemuan para Kepala Desa yaitu bersama dengan Kepala Sukatani, Kepala Desa Gunung Sungging Kepala Desa Buniwangi,	25 November 2024

			Kepala Desa Cipeundeuy, Kepala Desa Warnasari Kec. Surade di kediaman Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi dengan memakai baju bergambar Asep Japar.	
45	-	-	Pesan berantai di Media Sosial WA yang disampaikan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Sukabumi untuk menginstruksikan Kepala Desa mendukung paslon no 02.	27 November 2024
46	Wahyu	Staff Kesekretarian Dinas PU Kab. Sukabumi	Telah melakukan foto bersama rekan-rekannya berlatarbelakang baliho gambar paslon no urut 2 Asep, di kediaman Asep Japar sebagai bentuk dukungan.	28 November 2024
			Melakukan foto bersama dengan Calon Bupati Asep Japar pada rangkaian kegiatan	28 November 2024

			Turnamen Sepakbola di Kecamatan Cisolok.	
47	Herdi Somantri alias Bima	Kepala Dinas Bapenda Kab. Sukabumi	Melakukan foto bersama rekannya dengan menggunakan kaos calon bupati Asep Japar .	28 November 2024
48	Asep Supriatna	Kepala Desa Karangpapak, Kec. Cikakak, Kab. Sukabumi	Bahwa melakukan foto bersama warga dengan menggunakan kaos Calon Bupati Asep Japar pada rangkaian kegiatan Turnamen Sepakbola	28 November 2024
49	Nasihin	Kepala Desa Langensari Kec. Sukaraja	Membuat pernyataan dukungan pada bulan Oktober 2024 kepada paslon no urut 2	30 November 2024
50	Usep	Kepala Desa Ciwalat Pabuaran	Tidak netral karena melakukan foto salam 2 jari yang merupakan nomor urut paslon Asep Japar dan Andreas	30 November 2024
51	Dede Hidayat	Kepala Desa Pabuaran,	Tidak netral karena melakukan foto salam 2 jari yang	30 November 2024

		Kec. Pabuaran	merupakan nomor urutan paslon Asep Japar dan Andreas	
52	Bambang Gunawan	Kepala Desa Sirnasari, Kec. Pabuaran	Tidak netral karena adanya tangkapan foto layer facebook ucapan selamat atas terpilihnya pasangan no urutan 2 padahal belum ada penetapan KPU Kab. Sukabumi	30 November 2024
53	-	-	Beredar di media sosial hasil hitung cepat versi Bawaslu, Kab. Sukabumi, yang mana hal tersebut mendahului penetapan hasil perhitungan suara melalui pleno KPU	28 November 2024
54	-	-	Terjadi persiapan pembagian sembako pasangan nomor urutan 2 di aula rapat Desa Sudajaya Girang, Kec Sukabumi.	-

- 1) Bahwa semua dugaan pelanggaran-pelanggaran terkait netralitas ASN sebagaimana tersebut di atas (*quad non*) sebagaimana yang

didalilkan oleh Pemohon terjadi sebelum atau setidaknya pada tanggal Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yaitu pada tanggal 27 November 2024;

- 2) Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas (*quad non*) sejak tanggal terjadinya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah dilakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang hingga tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, maupun Sentra Gakkumdu;
- 3) Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut (*quad non*) dilaporkan oleh Pemohon pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana Laporan Pemohon 003, yaitu setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten. Dengan kata lain pelaporan tersebut dilakukan jauh hari setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan. Atas Laporan Pemohon 003 ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga telah memberikan keputusan sebagaimana Putusan Bawaslu 003;
- 4) Bahwa dalam Putusan Bawaslu 003 telah dinyatakan laporan Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan Pelapor (Pemohon) tidak memenuhi syarat formil dan materil;
- 5) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Laporan Pemohon 003 yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah akal-akalan dan/atau siasat buruk untuk menghalang-halangi dilaksanakannya Keputusan KPU Sukabumi, sehingga atas Laporan Pemohon 003 patut secara hukum untuk dikesampingkan dan tidak dapat dikatakan sebagai laporan berjenjang yang telah dilakukan oleh Pemohon atas perkara *in casu*;
- 6) Bahwa sebagaimana uraian Dalam Pokok Permohonan huruf f di atas yang telah terbukti tidak terdapat adanya penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan dan tidak terdapat adanya kejadian khusus dan keberatan dari para pihak, baik Paslon 1 maupun Paslon 2, hal ini membuktikan dengan terang, jelas, dan nyata bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud di atas (*quad non*) oleh

Pemohon tidaklah mempengaruhi jumlah perolehan suara yang terjadi pada 469 TPS di 27 Kecamatan. Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon yang terkait TSM tidak terbukti karena tidak mempengaruhi perolehan suara secara signifikan;

b) **POLITIK UANG**

Tabel 33: Dugaan Pelanggaran Terkait Politik Uang Menurut Pemohon (*quad non*)

No	Nama	Jabatan	Pelanggaran	Tanggal
1	-	-	Pembagian sabun cuci piring di Desa Gunung Tanjung, Kecamatan Cisolok yang dibuktikan dengan adanya tempelan stiker Paslon No Urut 2	26 November 2024
2	Hilman Nulhakim	Mantan Kepala Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak sekaligus Ketua Relawan	Membagi-bagikan uang sebanyak jutaan rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- an kepada tokoh agama Desa Cihanjavar Kecamatan Nagrak Kampung Lemah Neundeut.	-
3	-	-	Pembagian minyak goreng dan sabun cuci piring oleh Timses Paslon No Urut 2 di Kecamatan Kalibunder untuk memilih Paslon No Urut 2.	26 November 2024

4	-	-	Pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap oleh Timses Paslon No Urut 2 di Kecamatan Kalibunder untuk memilih Paslon No Urut 2.	26 November 2024
5	Marwan Hamami	Bupati Sukabumi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi	Pembagian sembako yang bertuliskan Marwan Hamami selaku Timses Paslon No Urut 2 di Kecamatan Bantargadung untuk mengarahkan warga memberikan dukungan kepada Paslon No Urut 2.	26 November 2024
6	-	-	Pembagian minyak goreng dan kaos Paslon No Urut 2 kepada warga Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap.	26 November 2024
7	Mansurudin	Anggota DPRD Fraksi PAN	Membagikan sembako kepada warga untuk memilih paslon no. urut 02 di Kantor DPD PAN Palabuhanratu	20 November 2024
8	-	Tim Kampanye Paslon 2	Terjadi pembagian sembako minyak goreng dan sabun	-

			cuci di Desa Babakan Jaya dan Desa Pondok Kaso Landeuh Kec. Parungkuda kepada warga setempat untuk memilih paslon no urut 2	
9	-	-	Telah terjadi Money Politik di Gg Ajid Cimaja 003/002, Desa Cimaja, Kec. Cikakak, Kab. Sukabumi dengan mengatas namakan Paslon no urut 2 kepada warga untuk memilih paslon no urut 2	27 November 2024
10	-	Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2	Telah terjadi pembagian sabun cuci piring dengan stiker paslon no urut 2, di Kampung Pamatutan RT 23, Desa Bojonggenteng, Kec. Bojonggenteng kepada warga setempat untuk memilih paslon no urut 2	27 November 2024
11	-	Timses Paslon Nomor Urut 2	Telah terjadi pembagian sabun cuci piring berstiker paslon no urut 2 di Desa Kertaraharja, Kec. Cikembar kepada warga	27 November 2024

			untuk memilih paslon no urut 2	
--	--	--	-----------------------------------	--

- 1) Bahwa semua dugaan pelanggaran-pelanggaran terkait politik uang sebagaimana tersebut di atas (*quad non*) yang didalilkan oleh Pemohon terjadi sebelum atau setidak-tidaknya pada tanggal Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yaitu pada tanggal 27 November 2024;
- 2) Bahwa pada tabel politik uang sebagaimana diuraikan Pemohon terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang tidak diuraikan secara jelas atau spesifik terkait siapa yang melakukan praktik politik uang tersebut;
- 3) Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas (*quad non*) sejak tanggal terjadinya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah dilakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang hingga tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, maupun Sentra Gakkumdu. Kalaupun ada laporan atau temuan indikasi pelanggaran, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan tidak terdapat bukti cukup untuk dapat diperiksa lebih lanjut;
- 4) Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut (*quad non*) dilaporkan oleh Pemohon pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana Laporan Pemohon 003, yaitu setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten. Dengan kata lain pelaporan tersebut dilakukan jauh hari setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan. Atas Laporan Pemohon 003 ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga telah memberikan keputusan sebagaimana Putusan Bawaslu 003;
- 5) Bahwa dalam Putusan Bawaslu 003 telah dinyatakan bahwa laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan

Pelapor (Pemohon) tidak memenuhi syarat formil dan materil;

- 6) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Laporan Pemohon 003 yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah akal-akalan dan/atau siasat buruk untuk menghalang-halangi dilaksanakannya Keputusan KPU Sukabumi, sehingga atas Laporan Pemohon 003 patut secara hukum untuk dikesampingkan dan tidak dapat dikatakan sebagai laporan berjenjang yang telah dilakukan oleh Pemohon atas perkara *in casu*;
- 7) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Dalam Pokok Permohonan huruf f di atas, yang telah terbukti tidak terdapat adanya penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan dan tidak adanya kejadian khusus dan keberatan dari para pihak, baik Paslon 1 maupun Paslon 2, hal ini membuktikan dengan terang, jelas, dan nyata bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud di atas (*quad non*) oleh Pemohon tidaklah mempengaruhi jumlah perolehan suara yang terjadi pada 469 TPS di 27 Kecamatan. Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon yang terkait TSM tidak terbukti karena tidak mempengaruhi perolehan suara secara signifikan;

c) **PENGGELEMBUNGAN SUARA DAN PEMALSUAN TANDA TANGAN**

Tabel 34 : Dugaan Pelanggaran Terkait Penggelembungan Suara Dan Pemalsuan Tanda Tangan Menurut Pemohon (*quad non*)

No	Nama	Jabatan	Pelanggaran	Tanggal
1	-	-	Terjadi indikasi penggelembungan suara di TPS 8 di Desa Berkah Kec. Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kec. Pabuaran, TPS 17 Desa Cidahu Kec. Cidahu, dari sampling berbagai TPS	27 November 2024

			yang diduga ada penggelembungan suara serta pemalsuan tanda tangan pemilih oleh penyelenggara	
--	--	--	---	--

- 1) Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu sebagaimana Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang dan yang telah ditindaklanjuti oleh KPU sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3056 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 (**Bukti T-501**), pada TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng telah dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Dan atas adanya rekomendasi pelanggaran kode etik pada TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, Termohon juga telah mengambil langkah tegas pada KPPS TPS 8 Desa Berekah untuk tidak direkomendasikan menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan periode yang akan datang, hal ini terbukti dengan tidak dilibatkan lagi pada saat penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut pada tanggal 6 Desember 2024. Hal ini dapat dibuktikan Termohon dengan menunjuk pihak yang bukan KPPS TPS 8 Desa Berekah sebagai anggota KPPS di TPS 8 Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, yaitu sebagaimana Surat Tugas Nomor: 1405/PL.02.6-ST/3202/22024, tertanggal 5 Desember 2024;
- 2) Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang menjadi sampling indikasi oleh Pemohon pada TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng ini pun tidak dijadikan tuntutan dalam petitumnya

(yaitu petitum nomor 3, 4 dan 5 dalam permohonan Pemohon) untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau yang dibatalkan hasil perolehan suaranya, sehingga sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil Pemohon dalam permohonannya;

- 3) Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, sesuai dengan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 174/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (**Bukti T-506**) dan Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Pabuaran Nomor 001/PP.00.02/K.JB-16.37/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (**Bukti T-504**), yang diterima oleh Termohon pada tanggal 20 Desember 2024, Dimana rekomendasi tersebut terkait dugaan adanya tanda tangan mirip yang dilakukan oleh salah satu anggota KPPS. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan yang pokoknya menjelaskan bahwa Termohon tidak dapat memproses rekomendasi pelanggaran kode etik tersebut, dikarenakan masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024, yaitu sebagaimana Surat Termohon Nomor: 1448/PL.02.04-SD/3202/2024, Perihal Tanggapan, tertanggal 27 Desember 2024 (**Bukti T-505**);
- 4) Berdasarkan data C.Hasil-KWK-BUPATI pada TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu, dan D.Hasil Kecamatan-KWK-BUPATI/WALIKOTA pada Kecamatan Cidahu, tidak terdapat penggelembungan atau perbedaan penghitungan perolehan suara, serta pemalsuan tanda tangan pemilih sebagaimana dimaksud Pemohon dalam posita 3 pada permohonannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dan pengisian formulir kejadian khusus pada tingkat TPS dari seluruh saksi, baik saksi Paslon 1 dan Paslon 2, termasuk dari Pengawas TPS. Para saksi pun semuanya menandatangani C.Hasil-KWK-

BUPATI pada TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu. Begitu pula pada tingkat kecamatan dimana berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-BUPATI/WALIKOTA pada Kecamatan Cidahu tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang sesuai dengan yang tercatat dalam formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Tingkat Kecamatan atau Nama Lain bahkan semua saksi turut bertanda tangan, termasuk saksi dari Paslon 1;

- 5) Bahwa sebagaimana yang telah dibuktikan sebelumnya pada uraian Dalam Pokok Permohonan huruf f di atas, terkait tidak adanya penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan dan tidak adanya kejadian khusus dan keberatan dari para pihak, baik Paslon 1 maupun Paslon 2, selain itu juga terkait temuan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran pada TPS 8 Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi dan TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, telah ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga hal ini membuktikan dengan terang, jelas, dan nyata bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran terkait penggelembungan suara dan pemalsuan tanda tangan yang dimaksud di atas (*quad non*) oleh Pemohon tidaklah mempengaruhi jumlah perolehan suara yang terjadi pada 469 TPS di 27 Kecamatan. Apalagi adanya ketidakjelasan pada petitum nomor 3, 4 dan 5 dalam permohonan Pemohon yang tidak memasukkan TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng sebagai bagian dalam 469 TPS yang dipermasalahkan, padahal TPS 8 ini dijadikan sebagai sampling indikasi Pemohon. Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon yang terkait TSM tidak terbukti karena tidak mempengaruhi perolehan suara secara signifikan;

- I. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tidak terdapat alasan dan fakta yang relevan dan berkeadilan untuk dapat dikabulkannya permohonan

Pemohon, sehingga dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Iyos Somantri dan H. Zainul S (Paslon 1)	498.990
2	H. Asep Japar dan H. Andreas (Paslon 2)	564.862
Total Suara Sah		1.063.852

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-506 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1781 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa/Kelurahan Caringin Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa/Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten
Sukabumi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Gunung Karamat, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Gunung Karamat, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Gunung Tanjung, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Karangpapak, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Karangpapak, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Karangpapak, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Karangpapak, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Pasir Baru, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Pasir Baru, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Sukarame, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Wangunsari, Kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Citarik, Kecamatan Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 016
Desa/Kelurahan Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 024
Desa/Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 026
Desa/Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Tonjong, Kecamatan Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Cidadap, Kecamatan Simpenan,
Kabupaten Sukabumi;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Cidadap, Kecamatan Simpenan,
Kabupaten Sukabumi;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 022
Desa/Kelurahan Cidadap, Kecamatan Simpenan,
Kabupaten Sukabumi;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 024
Desa/Kelurahan Cidadap, Kecamatan Simpenan,
Kabupaten Sukabumi;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 026
Desa/Kelurahan Cidadap, Kecamatan Simpenan,
Kabupaten Sukabumi;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Simpenan,
Kabupaten Sukabumi;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Mekar Asih, Kecamatan Simpenan,
Kabupaten Sukabumi;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng,
Kabupaten Sukabumi;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Bojong
Genteng, Kabupaten Sukabumi;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Bojong
Genteng, Kabupaten Sukabumi;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Bojong
Genteng, Kabupaten Sukabumi;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;

- 57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 016
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 018
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 019
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 024
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 025
Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Caringin, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;

77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 016
Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 019
Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 025
Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 027
Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 028
Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;

86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Purwasari, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Purwasari, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Purwasari, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;

96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Tenjolaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Tenjolaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Tenjolaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;

106. Bukti T-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 016
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;

116. Bukti T-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;

126. Bukti T-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 016
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
131. Bukti T-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
132. Bukti T-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Pasir Doton, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
133. Bukti T-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Pasir Doton, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
134. Bukti T-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Pasir Doton, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
135. Bukti T-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Pasir Doton, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;

136. Bukti T-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Pasir Doton, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
137. Bukti T-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Pasir Doton, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
138. Bukti T-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Pasir Doton, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabumi;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Pondokaso Tengah, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
140. Bukti T-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Pondokaso Tengah, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
141. Bukti T-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Pondokaso Tengah, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
142. Bukti T-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Pondokaso Tengah, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
143. Bukti T-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Pondokaso Tengah, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
144. Bukti T-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Pondokaso Tengah, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
145. Bukti T-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Pondokaso Tengah, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;

146. Bukti T-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Pondokaso Tonggoh, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
147. Bukti T-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Pondokaso Tonggoh, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
148. Bukti T-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Pondokaso Tonggoh, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
149. Bukti T-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Pondokaso Tonggoh, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
150. Bukti T-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Pondokaso Tonggoh, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
151. Bukti T-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Pondokaso Tonggoh, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
152. Bukti T-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Pondokaso Tonggoh, Kecamatan
Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
153. Bukti T-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
154. Bukti T-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
155. Bukti T-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;

156. Bukti T-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
157. Bukti T-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
158. Bukti T-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
159. Bukti T-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
160. Bukti T-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
161. Bukti T-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi;
162. Bukti T-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cianaga, Kecamatan Kabandungan,
Kabupaten Sukabumi;
163. Bukti T-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cianaga, Kecamatan Kabandungan,
Kabupaten Sukabumi;
164. Bukti T-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Cianaga, Kecamatan Kabandungan,
Kabupaten Sukabumi;
165. Bukti T-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan,
Kabupaten Sukabumi;

166. Bukti T-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Tugubandung, Kecamatan
Kabandungan, Kabupaten Sukabumi;
167. Bukti T-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Palasari Girang, Kecamatan Kalapa
Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
168. Bukti T-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Palasari Girang, Kecamatan Kalapa
Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
169. Bukti T-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Palasari Girang, Kecamatan Kalapa
Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
170. Bukti T-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Palasari Girang, Kecamatan Kalapa
Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
171. Bukti T-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Pulosari, Kecamatan Kalapa Nunggal,
Kabupaten Sukabumi;
172. Bukti T-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Pulosari, Kecamatan Kalapa Nunggal,
Kabupaten Sukabumi;
173. Bukti T-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Pulosari, Kecamatan Kalapa Nunggal,
Kabupaten Sukabumi;
174. Bukti T-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Pulosari, Kecamatan Kalapa Nunggal,
Kabupaten Sukabumi;
175. Bukti T-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Walang Sari, Kecamatan Kalapa
Nunggal, Kabupaten Sukabumi;

176. Bukti T-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Walang Sari, Kecamatan Kalapa
Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
177. Bukti T-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Walang Sari, Kecamatan Kalapa
Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
178. Bukti T-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Walang Sari, Kecamatan Kalapa
Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
179. Bukti T-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Bojong Asih, Kecamatan Parakan
Salak, Kabupaten Sukabumi;
180. Bukti T-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Bojong Asih, Kecamatan Parakan
Salak, Kabupaten Sukabumi;
181. Bukti T-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Bojong Asih, Kecamatan Parakan
Salak, Kabupaten Sukabumi;
182. Bukti T-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Bojong Asih, Kecamatan Parakan
Salak, Kabupaten Sukabumi;
183. Bukti T-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Bojong Longok, Kecamatan Parakan
Salak, Kabupaten Sukabumi;
184. Bukti T-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Lebaksari, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
185. Bukti T-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Parakan Salak, Kecamatan Parakan
Salak, Kabupaten Sukabumi;

186. Bukti T-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa/Kelurahan Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
187. Bukti T-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa/Kelurahan Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
188. Bukti T-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
189. Bukti T-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
190. Bukti T-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
191. Bukti T-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
192. Bukti T-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
193. Bukti T-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
194. Bukti T-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
195. Bukti T-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;

196. Bukti T-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
197. Bukti T-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
198. Bukti T-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
199. Bukti T-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
200. Bukti T-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
201. Bukti T-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
202. Bukti T-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
203. Bukti T-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
204. Bukti T-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
205. Bukti T-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;

206. Bukti T-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
207. Bukti T-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
208. Bukti T-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Sukatani, Kecamatan Parakan Salak,
Kabupaten Sukabumi;
209. Bukti T-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Langen Sari, Kecamatan Parung Kuda,
Kabupaten Sukabumi;
210. Bukti T-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Pondokkaso Landeuh, Kecamatan
Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi;
211. Bukti T-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Pondokkaso Landeuh, Kecamatan
Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi;
212. Bukti T-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Caringin Wetan, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
213. Bukti T-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Caringin Wetan, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
214. Bukti T-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cijengkol, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
215. Bukti T-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cijengkol, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;

216. Bukti T-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Cijengkol, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
217. Bukti T-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
218. Bukti T-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Seuseupan, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
219. Bukti T-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Seuseupan, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
220. Bukti T-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Seuseupan, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
221. Bukti T-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Seuseupan, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
222. Bukti T-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
223. Bukti T-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
224. Bukti T-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Sukabumi;
225. Bukti T-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;

- 226. Bukti T-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Ciheulang Tonggoh, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- 227. Bukti T-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Ciheulang Tonggoh, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- 228. Bukti T-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Ciheulang Tonggoh, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- 229. Bukti T-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;
- 230. Bukti T-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;
- 231. Bukti T-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;
- 232. Bukti T-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 016
Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;
- 233. Bukti T-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Sukasirna, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;
- 234. Bukti T-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Sukasirna, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;
- 235. Bukti T-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Tenjojaya, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;

236. Bukti T-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Tenjojaya, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;
237. Bukti T-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Warnajati, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi;
238. Bukti T-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Bojongkembar, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
239. Bukti T-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Bojongkembar, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
240. Bukti T-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Bojongraharja, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
241. Bukti T-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
242. Bukti T-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Cikembar, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
243. Bukti T-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
244. Bukti T-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Kertaraharja, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
245. Bukti T-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Parakanlima, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;

- 246. Bukti T-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Parakanlima, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
- 247. Bukti T-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Parakanlima, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
- 248. Bukti T-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Parakanlima, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
- 249. Bukti T-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Parakanlima, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
- 250. Bukti T-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Parakanlima, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
- 251. Bukti T-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi;
- 252. Bukti T-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 253. Bukti T-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 254. Bukti T-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Cihanyawar, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 255. Bukti T-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Cihanyawar, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;

- 256. Bukti T-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Darmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 257. Bukti T-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 258. Bukti T-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 259. Bukti T-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 260. Bukti T-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 261. Bukti T-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 262. Bukti T-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 263. Bukti T-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 264. Bukti T-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 265. Bukti T-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 014
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;

- 266. Bukti T-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten
Sukabumi;
- 267. Bukti T-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten
Sukabumi;
- 268. Bukti T-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Kalaparea, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 269. Bukti T-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Kalaparea, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 270. Bukti T-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Kalaparea, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 271. Bukti T-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Kalaparea, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 272. Bukti T-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Kalaparea, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 273. Bukti T-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Kalaparea, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 274. Bukti T-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Kalaparea, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
- 275. Bukti T-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Kalaparea, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;

276. Bukti T-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
277. Bukti T-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
278. Bukti T-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
279. Bukti T-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
280. Bukti T-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 022
Desa/Kelurahan Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
281. Bukti T-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 023
Desa/Kelurahan Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
282. Bukti T-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 024
Desa/Kelurahan Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
283. Bukti T-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 027
Desa/Kelurahan Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
284. Bukti T-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
285. Bukti T-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;

286. Bukti T-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
287. Bukti T-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
288. Bukti T-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
289. Bukti T-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
290. Bukti T-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
291. Bukti T-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
292. Bukti T-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Pawenang, Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi;
293. Bukti T-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Babakan, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
294. Bukti T-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabumi;
295. Bukti T-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;

- 296. Bukti T-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabumi;
- 297. Bukti T-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabumi;
- 298. Bukti T-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Gunungjaya, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
- 299. Bukti T-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Kutasirna, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
- 300. Bukti T-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
- 301. Bukti T-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
- 302. Bukti T-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
- 303. Bukti T-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
- 304. Bukti T-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
- 305. Bukti T-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Selajambe, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;

306. Bukti T-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 016
Desa/Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
307. Bukti T-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
308. Bukti T-308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Sukasari, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
309. Bukti T-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Sukasari, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi;
310. Bukti T-310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Cibentang, Kecamatan Gunungguruh,
Kabupaten Sukabumi;
311. Bukti T-311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cibolang, Kecamatan Gunungguruh,
Kabupaten Sukabumi;
312. Bukti T-312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Cikujang, Kecamatan Gunungguruh,
Kabupaten Sukabumi;
313. Bukti T-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Gunungguruh, Kecamatan
Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;
314. Bukti T-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Gunungguruh, Kecamatan
Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;
315. Bukti T-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Gunungguruh, Kecamatan Gunung
Guruh, Kabupaten Sukabumi;

- 316. Bukti T-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Mangkalaya, Kecamatan Gunung
Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- 317. Bukti T-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh,
Kabupaten Sukabumi;
- 318. Bukti T-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh,
Kabupaten Sukabumi;
- 319. Bukti T-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cikaret, Kecamatan Kebon Pedes,
Kabupaten Sukabumi;
- 320. Bukti T-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Cikaret, Kecamatan Kebon Pedes,
Kabupaten Sukabumi;
- 321. Bukti T-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Jambenenggang, Kecamatan Kebon
Pedes, Kabupaten Sukabumi;
- 322. Bukti T-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Jambenenggang, Kecamatan Kebon
Pedes, Kabupaten Sukabumi;
- 323. Bukti T-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Parungseah, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 324. Bukti T-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Parungseah, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 325. Bukti T-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 016
Desa/Kelurahan Parungseah, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;

- 326. Bukti T-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Perbawati, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 327. Bukti T-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Perbawati, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 328. Bukti T-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Perbawati, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 329. Bukti T-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Perbawati, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 330. Bukti T-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Sudajaya Girang, Kecamatan
Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- 331. Bukti T-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 332. Bukti T-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 333. Bukti T-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Warnasari, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 334. Bukti T-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Warnasari, Kecamatan Sukabumi,
Kabupaten Sukabumi;
- 335. Bukti T-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;

336. Bukti T-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
337. Bukti T-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
338. Bukti T-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Limbangan, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
339. Bukti T-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Limbangan, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
340. Bukti T-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
341. Bukti T-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
342. Bukti T-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 021
Desa/Kelurahan Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
343. Bukti T-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Selaawi, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
344. Bukti T-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Selawangi, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;
345. Bukti T-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 028
Desa/Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;

- 346. Bukti T-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Cibadak, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 347. Bukti T-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Ciwalat, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 348. Bukti T-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Ciwalat, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 349. Bukti T-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Ciwalat, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 350. Bukti T-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Ciwalat, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 351. Bukti T-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 352. Bukti T-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Sirnasari, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 353. Bukti T-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 354. Bukti T-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
- 355. Bukti T-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;

356. Bukti T-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
357. Bukti T-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
358. Bukti T-358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
359. Bukti T-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Sukabumi;
360. Bukti T-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cibenda, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
361. Bukti T-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cibenda, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
362. Bukti T-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Cibenda, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
363. Bukti T-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Cibenda, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
364. Bukti T-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Cibenda, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
365. Bukti T-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Cibenda, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;

366. Bukti T-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Cibenda, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
367. Bukti T-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Ciemas, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
368. Bukti T-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Ciemas, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
369. Bukti T-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Ciemas, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
370. Bukti T-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Ciemas, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
371. Bukti T-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
372. Bukti T-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
373. Bukti T-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
374. Bukti T-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
375. Bukti T-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;

376. Bukti T-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
377. Bukti T-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
378. Bukti T-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
379. Bukti T-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
380. Bukti T-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
381. Bukti T-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
382. Bukti T-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
383. Bukti T-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten
Sukabumi;
384. Bukti T-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Mandrajaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
385. Bukti T-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Mandrajaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;

- 386. Bukti T-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Mandrajaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 387. Bukti T-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Mandrajaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 388. Bukti T-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Mandrajaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 389. Bukti T-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Mandrajaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 390. Bukti T-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Mandrajaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 391. Bukti T-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 392. Bukti T-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 393. Bukti T-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 394. Bukti T-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
- 395. Bukti T-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;

396. Bukti T-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
397. Bukti T-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
398. Bukti T-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
399. Bukti T-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
400. Bukti T-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
401. Bukti T-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
402. Bukti T-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi;
403. Bukti T-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Cikangkung, Kecamatan Ciracap,
Kabupaten Sukabumi;
404. Bukti T-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Gunungbatu, Kecamatan Ciracap,
Kabupaten Sukabumi;
405. Bukti T-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Ciracap,
Kabupaten Sukabumi;

406. Bukti T-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Pasirpanjang, Kecamatan Ciracap,
Kabupaten Sukabumi;
407. Bukti T-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Pasirpanjang, Kecamatan Ciracap,
Kabupaten Sukabumi;
408. Bukti T-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Purwasedar, Kecamatan Ciracap,
Kabupaten Sukabumi;
409. Bukti T-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Jampang
Kulon, Kabupaten Sukabumi;
410. Bukti T-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Jampang
Kulon, Kabupaten Sukabumi;
411. Bukti T-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Bojonggenteng, Kecamatan Jampang
Kulon, Kabupaten Sukabumi;
412. Bukti T-412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
413. Bukti T-413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
414. Bukti T-414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Cikaranggeusan, Kecamatan Jampang
Kulon, Kabupaten Sukabumi;
415. Bukti T-415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cikaranggeusan, Kecamatan Jampang
Kulon, Kabupaten Sukabumi;

- 416. Bukti T-416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Ciparay, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
- 417. Bukti T-417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Ciparay, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
- 418. Bukti T-418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Ciparay, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
- 419. Bukti T-419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Ciparay, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
- 420. Bukti T-420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Jampang
Kulon, Kabupaten Sukabumi;
- 421. Bukti T-421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
- 422. Bukti T-422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
- 423. Bukti T-423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Nagrak Sari, Kecamatan Jampang
Kulon, Kabupaten Sukabumi;
- 424. Bukti T-424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Nagrak Sari, Kecamatan Jampang
Kulon, Kabupaten Sukabumi;
- 425. Bukti T-425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Padajaya, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;

426. Bukti T-426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon,
Kabupaten Sukabumi;
427. Bukti T-427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kalibunder,
Kabupaten Sukabumi;
428. Bukti T-428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Sekarsari, Kecamatan Kalibunder,
Kabupaten Sukabumi;
429. Bukti T-429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Sekarsari, Kecamatan Kalibunder,
Kabupaten Sukabumi;
430. Bukti T-430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Sekarsari, Kecamatan Kalibunder,
Kabupaten Sukabumi;
431. Bukti T-431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Kalibunder,
Kabupaten Sukabumi;
432. Bukti T-432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Kalibunder,
Kabupaten Sukabumi;
433. Bukti T-433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Kalibunder,
Kabupaten Sukabumi;
434. Bukti T-434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;

435. Bukti T-435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
436. Bukti T-436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
437. Bukti T-437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Citanglar, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
438. Bukti T-438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003
Desa/Kelurahan Citanglar, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
439. Bukti T-439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Citanglar, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
440. Bukti T-440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Citanglar, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
441. Bukti T-441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Citanglar, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
442. Bukti T-442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 011
Desa/Kelurahan Citanglar, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
443. Bukti T-443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 013
Desa/Kelurahan Citanglar, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
444. Bukti T-444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Jagamukti, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;

- 445. Bukti T-445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Kadaleman, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 446. Bukti T-446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Kadaleman, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 447. Bukti T-447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Kadaleman, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 448. Bukti T-448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Kadaleman, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 449. Bukti T-449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Kadaleman, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 450. Bukti T-450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Kadaleman, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 451. Bukti T-451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Pasir Ipis, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 452. Bukti T-452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 012
Desa/Kelurahan Pasir Ipis, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 453. Bukti T-453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 015
Desa/Kelurahan Pasir Ipis, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
- 454. Bukti T-454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 017
Desa/Kelurahan Pasir Ipis, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;

455. Bukti T-455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten
Sukabumi;
456. Bukti T-456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
457. Bukti T-457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
458. Bukti T-458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 007
Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Surade,
Kabupaten Sukabumi;
459. Bukti T-459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Bantargadung, Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
460. Bukti T-460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Bantargadung, Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
461. Bukti T-461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 004
Desa/Kelurahan Bantargadung, Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
462. Bukti T-462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 005
Desa/Kelurahan Bantargadung, Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
463. Bukti T-463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
464. Bukti T-464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 008
Desa/Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;

465. Bukti T-465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 009
Desa/Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
466. Bukti T-466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
467. Bukti T-467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Cikakak, Kecamatan Cikakak,
Kabupaten Sukabumi;
468. Bukti T-468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 010
Desa/Kelurahan Cimaja, Kecamatan Cikakak,
Kabupaten Sukabumi;
469. Bukti T-469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001
Desa/Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak,
Kabupaten Sukabumi;
470. Bukti T-470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002
Desa/Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak,
Kabupaten Sukabumi;
471. Bukti T-471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 006
Desa/Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak,
Kabupaten Sukabumi;
472. Bukti T-472 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati,
Kabupaten Sukabumi;
473. Bukti T-473 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati
Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
474. Bukti T-474 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati
Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
475. Bukti T-475 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati
Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;

- 476. Bukti T-476 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi;
- 477. Bukti T-477 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- 478. Bukti T-478 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
- 479. Bukti T-479 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi;
- 480. Bukti T-480 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
- 481. Bukti T-481 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
- 482. Bukti T-482 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi;
- 483. Bukti T-483 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi;
- 484. Bukti T-484 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- 485. Bukti T-485 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;
- 486. Bukti T-486 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
- 487. Bukti T-487 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- 488. Bukti T-488 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- 489. Bukti T-489 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi;

490. Bukti T-490 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
491. Bukti T-491 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
492. Bukti T-492 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi;
493. Bukti T-493 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;
494. Bukti T-494 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;
495. Bukti T-495 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi;
496. Bukti T-496 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi;
497. Bukti T-497 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
498. Bukti T-498 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
499. Bukti T-499 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi;
500. Bukti T-500 : Fotokopi Putusan Pendahuluan BAWASLU Provinsi Jawa Barat Nomor : 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
501. Bukti T-501 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3056 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024

502. Bukti T-502 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
503. Bukti T-503 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
504. Bukti T-504 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pabuaran Nomor: 001/PP.00.02/ K.JB-16.37/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
505. Bukti T-505 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 1448/PL.02.4-SD/3202/2024 tanggal 27 Desember 2024, perihal Tanggapan;
506. Bukti T- 506 : Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi Nomor: 174/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tanggal 18 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016;
2. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan** dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (vide, Pasal 156 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016);
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang berdampak langsung pada penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
4. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon hasil perbaikan tertanggal 12 Desember 2024 tidak ada dalil dan bukti langsung yang menunjukkan perubahan hasil penghitungan suara, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran TSM yang didalilkan berdampak langsung pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, perkara ini tidak memenuhi kriteria untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, dinyatakan: a. "Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contratrio*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki

institusi-isntituti lainnya.” (vide, Putusan Nomor 34/PHP.GUN-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018 halaman 83);

6. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 *juncto* Putusan Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018 tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 jelaslah bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati, sehingga bukan pula kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, oleh karena Permohonan *a quo* tidak selaras dengan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016;
7. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, oleh karena Permohonan *a quo* tidak selaras dengan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur batasan selisih perolehan suara yang dapat diajukan sebagai dasar permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yaitu:

Pasal 158 ayat (2) :

- a. Untuk Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hingga 250.000 jiwa, selisih suara maksimal 2%;

- b. Untuk Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai 500.000 jiwa, selisih suara maksimal 1,5%;
 - c. Untuk Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai 1.000.000 jiwa, selisih suara maksimal 1%;
 - d. Untuk Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, selisih suara maksimal 0,5%;
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi 2024, diketahui bahwa:
- a. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon): 498.990 Suara
 - b. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait): 564.862 Suara
 - c. Selisih perolehan suara: 65.872 Suara atau 6,2%

Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah penduduk berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Sukabumi yang diperbaharui tanggal 20 Februari 2024 **sebanyak 2,8 Juta Jiwa (Bukti PT-4)**, sehingga selisih suara yang diatur adalah Untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, selisih suara maksimal 0,5%. **Jumlah selisih perolehan suara sebanyak 65.872 atau sebesar 6,2% tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.** Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Kontitusi dalam menerapkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat beberapa putusan yang menyimpangi ketentuan tersebut, akan tetapi harus ada syarat-syarat atau hal-hal khusus yang dilanggar dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sehingga menciderai kemurnian pelaksanaan Pilkada;

4. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan mencermati dalil Permohonan Pemohon, ternyata tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang adanya kejadian atau hal-hal khusus, sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 di atas, sehingga menurut Pihak Terkait tidak beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi hanya dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang memenuhi syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); .

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa **dalam Permohonan Pemohon pada poin 2 halaman 6 diakui sendiri bahwa Pemohon tidak dapat menetapkan perhitungan suara yang benar** kecuali perhitungan suara dikurangi menurut versi tabel Pemohon dalam permohonannya, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mewajibkan Pemohon untuk menyertakan uraian mengenai perhitungan suara yang dianggap benar menurut Pemohon di dalam posita maupun petitum, disertai perbedaan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, suatu permohonan harus disusun secara jelas, sistematis, dan lengkap. Namun, Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi kriteria tersebut. **Dalil-dalil yang**

diajukan Pemohon disampaikan secara melompat-lompat, tidak berurutan, dan tidak memberikan alur argumentasi yang logis, sehingga sulit dipahami. Uraian Permohonan Pemohon seperti mimpi yang tidak selesai dan keburu terbangun. Hal ini **terbukti dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2025, di mana Kuasa Hukum Pemohon terlihat kesulitan membaca permohonannya sendiri berdasarkan bukti potongan video (panel 1 Sidang Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota) saat agenda Sidang Pendahuluan tanggal 8 Januari 2025 pembacaan Pokok Permohonan oleh Pemohon pada menit 4:19 (Bukti PT-5).** Bahkan pokok-pokok permasalahan yang diminta dibacakan oleh Ketua Panel tidak dapat disampaikan dengan baik, dan Kuasa Hukum Pemohon malah menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi permohonannya, sehingga membingungkan Pihak Terkait pada saat itu. Lebih lanjut, **Kuasa Hukum Pemohon juga kesulitan menyebut jumlah selisih suara, terlihat mencari-cari angka selama sidang berlangsung. Kejadian tersebut semakin menegaskan bahwa Permohonan Pemohon memang tidak jelas, tidak sistematis, dan sulit dipahami, bukti Video menit ke 4:19 (Bukti PT-5)** yang pada akhirnya melanggar prinsip dasar penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024;

3. Bahwa ketidakjelasan dalam menyusun permohonan oleh Pemohon telah menyulitkan Pihak Terkait untuk memberikan tanggapan secara substansial. Permohonan tidak disusun secara ringkas, jelas dan *to the point*, sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang mengharuskan setiap permohonan memuat uraian jelas mengenai pokok permohonan.
4. Bahwa ketidakjelasan dalam Permohonan Pemohon melanggar prinsip ***due process of law*** yang melindungi hak setiap pihak dalam proses peradilan, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketidakjelasan ini tidak hanya menghambat Pihak Terkait dalam memahami serta menanggapi substansi

permohonan secara terarah, tetapi juga menunjukkan ketidakkonsistenan dan kerancuan dalam argumen Pemohon. Pemohon secara jelas tidak memahami secara menyeluruh substansi yang hendak mereka mohonkan. Hal ini terlihat dari perubahan-perubahan substansi permohonan yang cenderung tidak konsisten dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Perubahan-perubahan tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon sendiri tidak memiliki kejelasan atau arah yang pasti mengenai permasalahan yang Pemohon ajukan. Lebih lanjut, Pemohon juga gagal membedakan dengan jelas antara perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)** dan perkara yang masuk dalam kategori **Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**. Sebagaimana diketahui, perkara PHPU berfokus pada perselisihan terkait hasil penghitungan suara yang memiliki dampak signifikan terhadap perolehan suara, sedangkan perkara TSM berfokus pada pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang secara langsung memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Ketidakmampuan Pemohon dalam membedakan kedua jenis perkara ini semakin mempertegas bahwa permohonan yang diajukan tidak relevan dan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam Permohonan Pemohon harus dianggap melanggar prinsip *due process of law* dan tidak dapat diterima untuk dilanjutkan pada proses persidangan lebih lanjut;

5. Bahwa selain itu, Pemohon tidak menguraikan fakta tentang dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Melainkan Pemohon hanya menjabarkan setiap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait pada kurang lebih 469 TPS, yang oleh Pemohon disimpulkan selisih tersebut merupakan hasil dari penggelembungan suara bagi Pihak Terkait. Lebih tegasnya Pemohon tidak menguraikan secara detail bagaimana proses penggelembungan itu dilakukan dan siapa yang melakukan, yang katanya menurut Pemohon ini adalah tindakan TSM;

6. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam dalilnya menggunakan frasa “*kurang lebih 469 TPS*”, merupakan pengakuan dan/atau indikasi ketidakmampuan Pemohon untuk menguraikan secara detail terkait perhitungan jumlah TPS yang bermasalah menurut Pemohon. Karenanya Permohonan Pemohon yang demikian, tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil, Pasal 39 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima jika tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan tidak terpenuhinya syarat sistematis, kejelasan dan kelengkapan dalam Permohonan Pemohon, perkara ini secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dengan demikian, klaim Pemohon yang hanya mendalilkan adanya penggelembungan suara dari pihak Termohon untuk Pasangan Calon nomor urut 2 **tanpa menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon dalam posita maupun petitum,** tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya perselisihan hasil pemilihan. Dalil Pemohon yang demikian hanya bersifat asumsi yang tidak memenuhi standar pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PERBAIKAN PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH MENGUBAH POKOK SUBSTANSI PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, proses perbaikan permohonan oleh Pemohon diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi (PMK 3/2024). Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan sebelum atau pada sidang pendahuluan. Namun, perbaikan ini seharusnya tidak boleh mengubah dan/atau menambahkan substansi pokok permohonan seperti yang dilakukan Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dalam perkara ini telah menyampaikan perbaikan permohonan dengan mengubah dan menambahkan substansi pokok permohonan awal, sebagaimana terlihat pada:

2.1 Jumlah halaman pada Perbaikan Permohonan tanggal 12 Desember 2024 dengan **51 halaman** yang sangat jauh berdeda dengan jumlah halaman yang ada di permohonan awal tanggal 10 Desember 2024 dengan hanya **10 halaman saja**. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan terhadap substansi permohonan yang sangat signifikan sehingga dapat merugikan semua pihak seperti Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait dalam menyiapkan jawaban atau keterangan;

2.2 Perbaikan Permohonan poin 3, 4 dan 5 halaman 6 s/d 28, pada poin-poin tersebut **Pemohon banyak mendalilkan dalil baru** seperti: jumlah 469 TPS dan 27 Kecamatan yang diduga terjadi penggelembungan suara nomor urut 2 (Pihak Terkait) sejumlah 102.934 suara. Lalu dalil mengenai sampling yang dilakukan Pemohon terhadap indikasi penggelembungan suara di 3 TPS dari total 469 TPS yang dimaskud Pemohon. Dalil mengenai indikasi tanda tangan pemilih yang tidak hadir oleh penyelenggara KPPS. Selanjutnya dalil mengenai perhitungan suara dan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang digambarkan melalui penambahan tabel data perolehan suara di 469 TPS menurut Pemohon;

2.3 Perbaikan permohonan poin 6 halaman 28 s/d 37 terdapat perubahan terhadap klaim Pemohon yang menyebutkan beberapa peristiwa dugaan terjadinya Pelanggaran TSM yang sebelumnya tidak diuraikan sama sekali dalam permohonan awal;

2.4 Pada bagian petium, poin 3 halaman 38 dalam perbaikan permohonan, terdapat perubahan permintaan mengenai perintah untuk Termohon (KPU Kabupaten Sukabumi) agar membuka seluruh **daftar hadir pemilih di seluruh TPS Kabupaten Sukabumi**, sedangkan pada permohonan awal Pemohon Petitumnya sama sekali tidak memohonkan untuk membuka daftar hadir pemilih, demikian juga permintaan penambahan petitum tentang penetapan perolehan suara

yang benar, yang pada petitum permohonan awal Pemohon sama sekali tidak dimohonkan.

3. Bahwa perubahan tersebut tidak hanya sekadar memperbaiki kekurangan administratif atau penyesuaian teknis, tetapi mengarah pada substansi pokok perkara yang telah diajukan sebelumnya. Bahwa perubahan substansi dalam perbaikan permohonan oleh Pemohon mengakibatkan:

3.1 Ketidakpastian hukum karena substansi permohonan yang diubah dapat merugikan Pihak Terkait dalam menyiapkan tanggapan pada keterangan Pihak Terkait.

3.2 Potensi penyalahgunaan proses hukum dengan memanfaatkan mekanisme perbaikan untuk mengajukan dalil baru atau mengubah objek sengketa.

3.3 Mengganggu asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perbaikan permohonan Pemohon yang mengubah substansi pokok permohonan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*). Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tetap didasarkan pada dokumen awal yang telah disampaikan sebelum perbaikan. Dan Menolak seluruh dalil perbaikan permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

E. PERMOHONAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN BERBEDA DENGAN YANG DIAJUKAN SECARA TERTULIS

1. Bahwa pada persidangan pendahuluan tanggal 8 Januari 2025 dengan agenda pembacaan permohonan oleh Pemohon di dalam persidangan, Kuasa Pemohon dipersilahkan untuk membacakan Permohonannya, sehingga selaku Pihak Terkait mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama pembacaan permohonan yang dibacakan oleh Pemohon pada persidangan tersebut;
2. Bahwa permohonan yang dibacakan oleh Pemohon sangat berbeda jauh dari permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah

Konsitusi, perbedaan tersebut sangat terlihat pada petitum yang dibacakan oleh Pemohon pada persidangan tersebut, sebagaimana kami uraikan pada subpoin 2.4 halaman 9 di atas. Dimana petitum yang dibacakan oleh Pemohon di singkat-singkat, tidak berurutan dan tidak sama dengan yang diajukan dalam permohonan Pemohon;

3. Bahwa menurut Hukum Acara yang berlaku, bahwasanya setiap surat maupun bukti dianggap sah adalah surat dan bukti yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Permohonan yang sah adalah yang dibacakan dalam persidangan;
4. Bahwa meskipun diperkenankan membacakan yang pokok-pokoknya saja terhadap permohonan, akan tetapi sudah seharusnya antara yang dibacakan oleh Pemohon dengan yang diajukan dalam perbaikan permohonan substansinya harus sama dan tidak berbeda. Tegasnya tidak ada penambahan dan/atau pengurangan. Permohonan tersebut seharusnya dibacakan secara sistematis, berurutan dan sesuai dengan apa yang di tulis dalam permohonan;
5. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas Pihak Terkait juga memperhatikan bahwasanya selama pembacaan permohonan oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan, Pihak Terkait memperhatikan gestur yang tidak biasa ditunjukkan oleh Kuasa Pemohon dalam membaca Permohonan. Gestur yang tidak biasa tersebut adalah seringnya Kuasa Pemohon menyentuh hidung dan mulut selama persidangan, serta sering salah menyebutkan angka yang tertuang dalam permohonan yang di tulis Pemohon sehingga membacakan angka tersebut diulang lebih dari 3 (tiga) kali. Menurut Vrij (2008) menjelaskan bahwa pengulangan berlebihan atau kesalahan dalam menyampaikan informasi dapat terjadi karena tekanan kognitif saat seseorang berbohong. Sebagaimana ciri-ciri orang yang sedang berbohong tersebut menurut ilmu psikologis dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait menduga seluruh isi dari permohonan Pemohon adalah tidak benar, hanya asumsi dan rekayasa semata. Oleh karena berperkara pada Mahkamah Konstitusi adalah perang alat bukti bukan perang opini,

maka menurut hukum permohonan Pemohon sudah seharusnya di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*).

II. BANTAHAN TERHADAP POKOK PEMOHON

Bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait kelompokkan ke dalam tiga isu utama, yang semuanya bersifat indikasi atau dugaan, yaitu:

- A. Dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait.**
- B. Dalil Pemohon terkait selisih perolehan suara.**
- C. Dugaan pelanggaran TSM yang disebutkan terjadi di 27 Kecamatan oleh Pemohon.**

Terhadap tiga isu utama tersebut, Pihak Terkait memberikan bantahan berikut secara sistematis agar lebih mudah dipahami:

A. BAHWA TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) YANG DIDUGA TERJADI, PIHAK TERKAIT MENANGGAPINYA SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan Poin 1 halaman 5 mengenai Penetapan Hasil rekapitulasi Suara oleh Termohon dan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebesar 65.872 Suara, telah sesuai dengan **hasil rekapitulasi resmi** yang ditetapkan dalam **Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2024**. Penetapan hasil tersebut juga diatur melalui **Surat Keputusan KPU Nomor 3057 Tahun 2024** tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi 2024;
- 2) Bahwa pada poin 2 halaman 6 dalam Permohonan, **Pemohon sendiri mengakui bahwa ia "belum dapat menetapkan perhitungan suara yang**

benar menurut Pemohon." Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Pemohon untuk memberikan dasar penghitungan suara yang **valid** sebagai rujukan untuk mengklaim adanya pelanggaran dalam bentuk penggelembungan yang didalilkan oleh Pemohon yang memengaruhi hasil akhir. Artinya Pemohon sendiri tidak memiliki basis data yang valid dan tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghitung perolehan suaranya sendiri. Hal Ini menunjukkan Pemohon meragukan kredibilitas penghitungan datanya sendiri. Bila Pemohon tidak memiliki basis data dan penghitungan yang jelas, maka secara hukum, klaim terjadinya pelanggaran tidak dapat dibuktikan. Dalil Pemohon tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan atas keragu-raguan Pemohon terhadap dalil dan/atau argumentasi yang dibangun. Dalil yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan atau tidak dapat diterima guna menghindari proses peradilan yang diputus berdasarkan asumsi. Ketidakmampuan ini juga melanggar syarat formil sebagaimana dijelaskan dalam eksepsi di atas, di mana Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 3 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa permohonan harus memuat perhitungan yang jelas dan relevan untuk membuktikan klaim Pemohon;

- 3) Bahwa pada poin 2 halaman 6 permohonan, Pemohon menyebut adanya pelanggaran yang "jelas dan nyata," tetapi tidak menguraikan secara konkret yang relevan dengan dugaan-dugaan Pemohon. Misalnya, tidak disebutkan secara rinci siapa saja ASN yang dilibatkan, siapa pejabat yang memerintahkan ASN tersebut, dan seperti apa tindakan ASN atas perintah pihak-pihak tertentu, dan bagaimana tindakan itu dilakukan serta kapan peristiwa itu terjadi khususnya pada kurang lebih 469 TPS yang didalilkan Pemohon yang menurut Pemohon adalah Penggelembungan suara bagi Pihak terkait, sementara penggelembungan yang dimaksud oleh Pemohon adalah merupakan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini membuat argumen bersifat asumptif. Berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) harus dibuktikan dengan fakta yang **valid** dan **terverifikasi**, seperti laporan resmi, dokumen pendukung dan kesaksian saksi yang kredibel. Namun Pemohon tidak menyajikan argumentasi TSM itu secara utuh dalam permohonannya, sehingga dalil

Pemohon dalam hal ini hanya asumsi semata karenanya harus dikesampingkan;

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 nomor (1) halaman 6 permohonan. Mengenai Definisi TSM Berdasarkan Penjelasan dalam Undang- Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang : Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Adapun yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 nomor (1) halaman 6 permohonan, berdasarkan definisi *Terstruktur, Sistematis dan Masif* (TSM) sebagaimana diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, klaim Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. Sebaliknya, potensi pelanggaran TSM justru lebih relevan jika dikaitkan dengan pihak Pemohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. **Calon Bupati Nomor Urut 1, sdr. Iyos Somantri, merupakan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi periode 2021 sampai 2025 yang sedang menjabat pada saat mencalonkan diri sebagai calon Bupati atau sebagai Calon Petahana. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan kewenangan secara *terstruktur* untuk memengaruhi hasil pemilu, karena memiliki akses langsung terhadap birokrasi dan aparatur negara di tingkat daerah;**
 - b. **Anggota tim hukum Pemohon atas nama Ferry Gustaman adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Periode 2018 – 2023 dan juga Wakil Sekretaris Tim Pemenangan sesuai Surat Keputusan**

Nomor: 1/I/Paslon-lz/VIII/2024 Tentang Struktur Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 - 2029. DRS. H IYOS SOMANTRI, M.Si – H. ZAINUL S, M.Si. berdasarkan bukti (Bukti PT-6). Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang potensi penyalahgunaan informasi strategis, jaringan atau pengaruh terhadap proses pemilu yang dilakukan secara *sistematis* dan terencana;

- c. **Pemohon gagal membuktikan keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam dugaan pelanggaran TSM. Sebaliknya, posisi Pemohon sebagai petahana dan tim hukumnya yang terdiri dari mantan pejabat penyelenggara pemilu justru menunjukkan potensi pelanggaran yang lebih signifikan, yang dapat memengaruhi hasil pemilu secara *masif*,**
- 6) Bahwa dalil Pemohon tentang istilah seperti "Terstruktur, Sistematis, dan Masif" (TSM) digunakan tanpa menguraikan elemen-elemen spesifiknya. Pemohon tidak membuktikan bahwa pelibatan ASN dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon tertentu. Pelibatan ASN, jika benar terjadi, tetap harus dibuktikan memiliki dampak langsung terhadap pilihan pemilih. Faktanya, tidak ada bukti bahwa ASN secara nyata memaksa atau mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan tertentu. Sebaliknya, pelaksanaan pemilu tetap berlangsung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan, sebagaimana terlihat dari daftar hadir pemilih yang mencapai kurang lebih 57%, menunjukkan bahwa masyarakat tetap bebas untuk memilih sesuai hati nuraninya. Selain itu, ASN yang dimaksud dalam dalil Pemohon juga tidak dijelaskan secara spesifik, baik dari segi nama, jabatan, maupun peran mereka dalam dugaan pelanggaran. Hal ini membuat tuduhan tersebut terkesan spekulatif dan tidak berdasar. Justru pasangan calon nomor urut 1, yang saat ini mengajukan permohonan, memiliki latar belakang yang memungkinkan mereka untuk memiliki kedekatan dengan ASN, mengingat **Pasangan Calon nomor urut 1, saudara Iyos Somantri sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi pada periode 2015.** Jabatan tersebut secara struktural dan fungsional memiliki akses dan hubungan kerja

langsung dengan ASN di Kabupaten Sukabumi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tuduhan Pemohon tentang pelibatan ASN cenderung tidak objektif, bahkan dapat dianggap sebagai upaya mengalihkan perhatian dari potensi pelibatan ASN yang lebih relevan dengan kedudukan dan peran Pasangan Calon nomor urut 1 di masa lalu. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai pelibatan ASN yang dianggap TSM seharusnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- 7) Bahwa Pemohon mengklaim adanya pelanggaran TSM di 469 TPS pada 27 kecamatan yang melibatkan Pihak Terkait. Namun, klaim ini tidak didukung oleh bukti substantif seperti laporan investigasi resmi atau dokumen autentik yang menunjukkan keterlibatan langsung Pihak Terkait. Sebagai contoh, laporan pelanggaran administratif atau politik uang yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum tanpa verifikasi yang valid dari lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu. Fakta bahwa hasil pemilu telah disahkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 menunjukkan bahwa dugaan tersebut tidak memengaruhi hasil pemilu secara signifikan;
- 8) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana dugaan pelanggaran birokrasi atau praktik politik uang secara langsung memengaruhi hasil akhir. Tidak ada data atau analisis kuantitatif dan kualitatif untuk membuktikan bahwa dugaan pelanggaran tersebut cukup signifikan untuk mengubah hasil pemilihan. Dalam hal ini justru dugaan tersebut lebih tepat ditujukan kepada diri Pemohon sendiri yang keduanya jelas berlatar belakang sebagai birokrat;

B. BAHWA TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI SELISIH PEROLEHAN SUARA, PIHAK TERKAIT MENANGGAPINYA SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Bahwa mengenai dalil Pemohon dalam poin 3 halaman 6 s/d 7 tentang selisih perolehan suara, perlu ditegaskan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 diterbitkan melalui proses yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pemohon tidak

dapat membuktikan adanya cacat hukum yang signifikan dalam proses tersebut yang dapat menggugurkan keabsahannya. Selain itu, proses tersebut diawasi secara ketat oleh BAWASLU, yang memastikan bahwa hasil pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan mencerminkan kehendak rakyat. Pada **Sidang Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** yang dilaksanakan di **Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi** pada **Jumat, 6 Desember 2024**, hadir saksi dari semua pasangan calon, termasuk saksi dari pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon). Sidang pleno tersebut dipimpin oleh **Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Saudara Budi Ardiansyah**, yang menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai prosedur. Dalam sidang pleno tersebut, saat Ketua Sidang Pleno bertanya mengenai hasil penghitungan suara, saksi dari pasangan calon nomor urut 1 pada menit 00.49 menjawab "sah," sehingga palu sidang diketuk sebagaimana yang terekam dalam bukti video (**Bukti PT-7**). Namun demikian, meskipun saksi pasangan calon nomor urut 1 secara lisan menyatakan pengakuan atas hasil penghitungan suara, saksi tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara tanpa memberikan alasan yang sah secara hukum. Sikap yang kontradiktif ini menunjukkan inkonsistensi sikap Pemohon, di mana di satu sisi mereka mengakui hasil penghitungan suara sebagai sah, tetapi di sisi lain mereka mencoba menggugat hasil tersebut tanpa dasar yang jelas. Hal ini semakin mempertegas bahwa dalil Pemohon terkait selisih perolehan suara tidak memiliki relevansi dan hanya bersifat spekulatif, karena proses penetapan hasil telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang ketat oleh lembaga berwenang;

- 2) Bahwa Pemohon menyatakan adanya penggelembungan suara di 469 TPS dengan selisih 102.934 suara, (vide Permohonan Pemohon angka 3 halaman 6) tetapi tidak melampirkan bukti yang konkret dan komprehensif. **Pemohon tidak memberikan detail bagaimana dugaan penggelembungan suara terjadi.** Apakah dilakukan dengan menambahkan suara palsu, memindahkan suara, atau metode lainnya?! Pemohon menggunakan bukti berdasarkan **"sampling"** dari segelintir TPS untuk menggeneralisasi penggelembungan suara di 469 TPS. Pemohon hanya berasumsi penggelembungan itu adalah

selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, klaim ini bersifat asumptif karena tidak menunjukkan data yang valid atau audit suara yang terverifikasi dari keseluruhan TPS. Tuduhan tanpa penjelasan teknis seperti ini hanya bersifat asumsi yang tidak memenuhi kriteria pembuktian dalam hukum. Selain itu teknik sampling Pemohon memiliki beberapa kelemahan, dimana Pemohon tidak menjelaskan pihak mana atau lembaga mana yang melakukan sampling tersebut apakah lembaga yang terakreditasi dan berkualifikasi, kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan metode apa yang digunakan dalam pengambilan sampling tersebut, tidak dijelaskan siapa saja atau kalangan mana saja yang dijadikan sebagai objek samplingnya, tidak pula mencantumkan berapa margin error dari hasil sampling tersebut, serta tidak mencantumkan indikator apa saja yang dijadikan sebagai bahan dalam melakukan sampling tersebut. Dengan tidak adanya seluruh hal tersebut menunjukkan bahwa dalil-dalil Pemohon sangat prematur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara ilmiah maupun secara hukum;

- 3) Bahwa pada Perbaikan Permohonan Pemohon pada Poin 3 halaman 6 dalil Pemohon mengenai indikasi/dugaan penggelembungan suara di 469 TPS yang tersebar di 27 kecamatan. **Dalil Pemohon terkait penggelembungan suara tidak memiliki dasar yang kuat dan bersifat spekulatif**, karena dalam proses rekapitulasi dan penghitungan suara pada TPS yang disebutkan oleh Pemohon, **KPPS telah melakukan verifikasi secara konkret dan sesuai prosedur yang berlaku**. Setiap TPS memverifikasi jumlah **DPT (Daftar Pemilih Tetap)** dan penggunaan surat suara, yang disesuaikan dengan **daftar hadir pemilih sebelum mereka menggunakan hak pilihnya**. Proses ini memastikan transparansi dan akurasi perhitungan suara di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa tingkat kehadiran pemilih di setiap TPS **tidak pernah mencapai 100% dari total DPT**, sehingga klaim Pemohon mengenai penggelembungan suara menjadi **tidak logis**. Tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti konkret yang valid dan hanya berupa asumsi sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan **asas pembuktian yang jelas dan kuat**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b PMK No. 3 Tahun 2024

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan **C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS bersangkutan**, tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tuduhan tersebut murni spekulasi yang bertujuan menggiring opini tanpa fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 4) Bahwa pada poin 3 halaman 6 Permohonan, Pemohon menyampaikan terdapat indikasi/dugaan terjadinya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) berdasarkan sampling hanya di 3 TPS, yaitu di TPS 8 Desa Berkah, TPS 6 Desa Ciwalat, dan TPS 17 Desa Cidahu, sampling yang dilakukan oleh Pemohon tanpa menjelaskan metode statistik apa yang digunakan, populasi yang diambil, atau teknik pengolahannya. Sumber data sampling ini pun tidak dijelaskan asal-usulnya, apakah bersumber dari dokumen resmi atau hanya berdasarkan asumsi. Dari sekian banyak TPS (ada total 2.011 TPS di 27 Kecamatan yang dimaksud Pemohon) Pemohon hanya melakukan sampling pada tiga TPS (TPS 8 Desa Berkah, TPS 6 Desa Ciwalat, dan TPS 17 Desa Cidahu). Jika Pemohon hanya melakukan sampling di 3 TPS untuk merepresentasikan 469 TPS, apalagi dari total 2.011 TPS di 27 kecamatan, maka persentase sampling terhadap total TPS sangatlah kecil. Pemohon hanya melakukan **sampling di 3 TPS**, yang merepresentasikan: **0,15%** dari total **2.011 TPS** di 27 kecamatan. **0,64%** dari **469 TPS** yang mereka klaim mengalami indikasi pelanggaran. Sampling sekecil ini jelas **tidak cukup representatif**, baik untuk total TPS di seluruh kecamatan maupun untuk 469 TPS yang disebutkan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan kelemahan signifikan dalam metode dan validitas klaim yang diajukan. sampling ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran secara menyeluruh di 469 TPS, karena tidak memenuhi standar representasi atau validitas statistik. Dalam hukum, tuduhan pelanggaran harus berdasarkan bukti konkret, bukan asumsi yang diambil dari segelintir TPS. Sementara itu Pemilihan Umum tersebut haruslah berdasarkan penghitungan yang pasti tidak boleh lagi mempergunakan sampling, karena satu suara saja sangat diperhitungkan tidak boleh dikurangi dan disaksikan oleh seluruh Penyelenggara, Bawaslu,

Saksi Para Calon dan dipublikasikan kepada masyarakat mulai dari Penyelenggaraan sampai dengan penetapan hasil penghitungan suara. Jadi jelas tidak benar dan tidak berdasar hukum dan berdasarkan fakta dalil-dalil dari Pemohon tersebut;

- 5) Bahwa Pemohon yang hanya melakukan sampling di tiga TPS, yaitu TPS 8 Desa Berkah (yang notabene sudah dilakukan PSU), TPS 6 Desa Ciwalat, dan TPS 17 Desa Cidahu, untuk menyimpulkan dugaan pelanggaran di 469 TPS yang tersebar di 27 Kecamatan. Jika Pemohon mengklaim pelanggaran terjadi di 469 TPS, seharusnya setiap TPS tersebut diuraikan dengan jelas pelanggaran apa yang terjadi, termasuk bukti konkret dari setiap TPS yang dimaksud. Dalam hukum pemilu, pelanggaran harus dibuktikan secara faktual di setiap TPS yang diduga bermasalah, bukan berdasarkan sampling. **Sampling seperti yang dilakukan Pemohon adalah pendekatan yang tidak dapat diterima secara hukum dan berpotensi melanggar konstitusi.** Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sampling tidak mencerminkan asas "jujur" dan "adil" tersebut. Itulah sebabnya Penghitungan Suara selalu dilakukan secara langsung, manual, terbuka untuk umum demi menjamin hasil yang jujur dan adil agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada seluruh rakyat serta Tuhan Yang Maha Mengetahui;
- 6) Bahwa Gambaran tabel yang disajikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan poin 3 halaman 8 s/d 27 **terlihat dilebih-lebihkan dan tidak didukung oleh logika maupun fakta yang valid.** Berdasarkan data yang telah diverifikasi pada **469 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata antara jumlah DPT dengan jumlah surat suara sah adalah sesuai dengan formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dan berita acara resmi yang ditandatangani oleh KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon pada masing-masing TPS setelah perhitungan suara.** Tabel yang disajikan Pemohon **tidak jelas, terkesan mengada-ada dan tidak memberikan gambaran faktual mengenai dugaan pelanggaran.** Selain itu, perhitungan selisih suara yang dimaksud oleh Pemohon sebagai penggelembungan suara Pihak Terkait bukanlah sebagai bagian dari

tindakan TSM yang didalilkan oleh Pemohon melainkan hanya merupakan selisih perolehan suara antar Pemohon dengan Pihak Terkait;

- 7) Tabel yang disajikan Pemohon sangat membingungkan dan tidak memberikan informasi yang relevan mengenai dugaan pelanggaran. **Pada 27 Kecamatan tersebut terdapat 151 desa dan 2.011 TPS. Dengan jumlah TPS sebanyak itu, sampling pada hanya 3 TPS yang Pemohon sebutkan tanpa penjelasan fenomena faktual di lapangan sama sekali tidak mewakili keadaan yang sebenarnya. Tabel-tabel yang disajikan oleh Pemohon hanyalah asumsi yang tidak didukung oleh metode statistik yang jelas atau data yang dapat diverifikasi dan tidak jelas lembaga mana yang membuat tabel-tabel tersebut.** Bahkan, tabel-tabel semacam ini dapat disusun dengan mudah tanpa memerlukan bukti nyata. Dalam hukum, tuduhan pelanggaran harus dibuktikan secara konkret, bukan hanya berdasarkan asumsi dari sampling. Sampling yang dilakukan Pemohon tidak membuktikan pola pelanggaran yang *Terstruktur, Sistematis, dan Masif* di semua TPS yang disebutkan. Pemohon bahkan tidak menjelaskan hubungan antara tiga TPS yang diambil sampelnya dengan keseluruhan 469 TPS lainnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan formil dan materil yang diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 8) Bahwa terhadap dalil permohonan poin 4 Lembar ke 28 Pemohon hanya menyebut dugaan-dugaan TSM tanpa menjelaskan kejadian apa yang sebenarnya terjadi di 469 TPS tersebut. Sebagai contoh, jika memang ada pelanggaran, Pemohon seharusnya merinci:
 - Jenis pelanggaran yang terjadi di masing-masing TPS;
 - Siapa saja pelakunya;
 - Kapan dan dimana terjadinya;
 - Metode atau cara apa yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pelanggaran;
 - Bukti konkret atau saksi di lapangan;
 - Hubungan antara pelanggaran tersebut dengan hasil pemilu; dan

- Berapa banyak jumlah suara yang terpengaruh atau berubah dengan adanya pelanggaran tersebut;

Tanpa penjelasan ini, klaim Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk mengkualifikasi dalil Pemohon sebagai pelanggaran TSM sebagai alasan bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah agar mengurangi hasil perolehan suara Pihak Terkait atau memutuskan untuk dilakukan PSU;

- 9) Bahwa Pemohon berusaha mengurangi suara Pasangan Calon nomor Urut 2 sebesar 102.934 suara tanpa dasar yang jelas, padahal Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*LUBER JURDIL*). Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk dalam hal penggunaan hak pilih. Mengurangi perolehan suara tanpa dasar yang jelas melanggar prinsip hukum tersebut. Lebih lanjut, perbuatan Pemohon yang secara sepihak mengurangi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam Keputusan Nomor 3057 tahun 2024 merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum menyatakan **bahwa suara yang telah direkapitulasi oleh penyelenggara pemilu tidak boleh diubah atau dikurangi kecuali ada putusan pengadilan yang sah**. Pemohon mengurangi suara pasangan nomor urut 2 dengan seenaknya tanpa dasar hukum yang valid, sehingga melanggar aturan tersebut;
- 10) Bahwa Konstitusi Indonesia menjamin setiap suara sah dari warga negara, termasuk mereka yang tidak sehat akalnya sekalipun, dilindungi dan dihitung. Tindakan Pemohon yang berupaya mengurangi suara pasangan nomor urut 2 tanpa dasar yang valid adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. **Pemohon berupaya mengurangi suara Pihak Terkait sebesar 102.934 suara tanpa**

menghormati hak konstitusional warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya secara sah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa setiap suara yang sah wajib dihitung dan diakui. Mengurangi suara tanpa dasar adalah bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi dan hukum pemilu. Tindakan Pemohon ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena berpotensi menimbulkan ketidakstabilan proses demokrasi dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon tidak berdasar dan tindakan yang dilakukan tersebut harus dinilai sebagai upaya yang tidak sah serta melanggar aturan hukum yang berlaku;

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 5 lembar ke 28, berdasarkan analisa Pihak Terkait, pada 469 TPS yang disebutkan oleh Pemohon pada permohonannya, pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) justru memiliki perolehan suara yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasangan nomor urut 1 (Pemohon) pada 469 TPS yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon berupaya untuk mengurangi suara yang sah dari Pihak Terkait dengan dalil-dalil tidak berdasar. Tidak hanya itu, terdapat beberapa TPS di mana pasangan nomor urut 1 (Pemohon) memperoleh suara lebih banyak, namun Pemohon tidak memasukkan TPS tersebut ke dalam dalil pengurangan suara. Ini membuktikan bahwa Pemohon bersikap tidak objektif dan hanya berfokus pada TPS-TPS yang menguntungkan Pemohon, sehingga klaimnya menjadi tidak kredibel. Jika Pihak Terkait menggunakan cara yang sama seperti Pemohon, Pihak Terkait juga bisa saja mengajukan pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS tertentu, terutama di TPS di mana Pemohon memperoleh suara tinggi. Namun, Pihak Terkait tidak melakukannya karena menghormati prinsip keadilan pemilu

yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan KPU terkait rekapitulasi hasil suara. Sikap Pemohon yang hanya berfokus pada pengurangan suara di TPS tertentu tanpa prosedur yang jelas menunjukkan ketidakseriusan dan bertentangan dengan prinsip konstitusi serta telah melanggar hak konstitusi Pihak Terkait.

C. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM DI DAERAH YANG DISEBUTKAN OLEH PEMOHON, DAPAT PIHAK TERKAIT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan peristiwa pelanggaran TSM yang disampaikan dalam permohonan dengan melampirkan **video dan/atau foto bertanggal setelah hari pencoblosan (27 Desember 2024) tidak relevan dan tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat**. Hal ini bertentangan dengan prinsip relevansi waktu dalam hukum pembuktian. **Pencoblosan telah selesai dilakukan pada 27 Desember 2024**, dan setiap dugaan pelanggaran yang dipersoalkan seharusnya secara langsung terkait dengan pelaksanaan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, atau rekapitulasi yang berlangsung pada hari pencoblosan tersebut. Pemohon mencoba mempermasalahkan peristiwa yang terjadi setelah hari pencoblosan tanpa memberikan argumen yang kuat tentang bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi hasil pemilu. Dalil seperti ini lebih cenderung bersifat spekulatif dan tidak memenuhi standar pembuktian dalam proses hukum yang adil dan terukur. Sebaliknya, proses pemilu di Kabupaten Sukabumi, termasuk pencoblosan pada 27 Desember 2024, telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pengawasan ketat dari lembaga berwenang seperti **Bawaslu**. Fakta ini diperkuat dengan **kehadiran saksi dari semua pasangan calon dalam tahapan rekapitulasi suara**, yang tidak mengajukan keberatan substansial pada saat proses tersebut berlangsung

- 1) Bahwa bantahan Terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan Poin 6 nomor 1 dan 2 halaman 29 yang menyatakan bahwa Saudara Marwan Hamami adalah Bupati Sukabumi memang benar, **tuduhan bahwa Bupati Kabupaten Sukabumi Saudara Marwan Hamami merupakan bagian**

dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 sama sekali tidak berdasar dan keliru, tuduhan Pemohon hanya bersifat asumsi tanpa didukung fakta atau dokumen sah yang membuktikan keterlibatan Saudara Marwan Hamami. Saudara Marwan Hamami tidak pernah tercatat sebagai bagian dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang terdaftar secara resmi di KPU Kabupaten Sukabumi. Hal ini dapat dibuktikan melalui SURAT KEPUTUSAN Nomor: SKEP-003/IN/TPK/IX/2024 TENTANG PENGESAHAN TIM PEMENANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKABUMI DRS. H. ASEP JAPAR, M.MM. DAN H. ANDREAS, SE. PERIODE 2024-2029 yang menunjukkan daftar tim sukses Pasangan Calon nomor urut 2 (**Bukti PT-8**) ditambah Pernyataan Kuasa Hukum Pemohon yang mengatakan "*pidato pak Bupati selaku ketua timses (tim sukses)*" Pada saat sidang panel agenda sidang pendahuluan tanggal 8 Januari 2025 potongan video pada menit 6:26 (**Bukti PT-5**)

- 2) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan poin 6 nomor 3 halaman 30 yang menyatakan adanya pidato Bupati Sukabumi di GOR Venue Tinju yang dihadiri oleh kepala dusun se-Kabupaten Sukabumi, tidak memiliki relevansi dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2, merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Kutipan semboyan "Lanjutkan" yang disinggung Pemohon bersifat umum (generalis) dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pasangan calon nomor urut 2. Semboyan tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk dalam konteks mendukung keberlanjutan program-program prioritas pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa pidato tersebut dimaksudkan sebagai ajakan untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 2 atau kampanye terselubung untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, karena kegiatan tersebut terjadi sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kehadiran kepala dusun se-Kabupaten Sukabumi dalam acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan yang wajar dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai bentuk keberpihakan. Tuduhan ini mengabaikan fakta bahwa pidato seorang kepala daerah dalam**

kapasitasnya sebagai pejabat publik bertujuan untuk menyampaikan visi dan arahan pemerintahan, bukan untuk mengkampanyekan pasangan calon tertentu. Hal ini sejalan dengan **Pasal 71 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada**, yang mengatur batasan kepala daerah untuk tidak menggunakan jabatan guna menguntungkan pasangan calon. Selain itu, **dalil Pemohon tidak mampu menjelaskan secara spesifik hubungan kausalitas antara pidato tersebut dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2**. Asumsi semata tanpa bukti konkret tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai bahwa pidato tersebut memengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Apalagi kata “lanjutkan” ini adalah kata umum dalam Bahasa Indonesia yang juga lumrah digunakan dalam setiap sambutan hingga pada saat Apel atau Upacara sehingga sangat tidak etis bila Pemohon melakukan penafsiran secara cocokologi hanya untuk memfitnah Pihak Terkait;

- 3) Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan poin 6 nomor 4 halaman 30 mengenai pidato Bupati Sukabumi pada kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tanggal 12 November 2024 di Palabuhanratu, tidak memiliki relevansi atau hubungan langsung dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2. **Dalil Pemohon bersifat asumsi tanpa bukti konkrit** yang menunjukkan bahwa pidato tersebut secara langsung mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Pemohon hanya mendasarkan klaimnya pada interpretasi pribadi terhadap pidato tersebut tanpa menguraikan secara jelas isi, konteks, dan tujuan dari pidato itu sendiri. **Tidak ada bukti langsung** yang menghubungkan pidato tersebut dengan instruksi spesifik kepada ASN untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, apalagi memengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Dugaan Pemohon tidak didukung oleh data atau bukti yang relevan untuk memperkuat klaim tersebut. **Pidato yang disampaikan dalam acara formal pemerintahan, seperti peringatan Hari Kesehatan Nasional, harus dilihat dalam konteksnya**. Sebagai kepala daerah, Bupati Sukabumi memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan yang bersifat umum dan tidak serta-merta dapat diasosiasikan dengan tindakan mendukung salah satu pasangan calon;

- 4) Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan nomor 6 angka 5 terkait simbol dua jari pada kegiatan **Geopark Ciletuh** di Desa Madrajaya (9 November 2024) adalah asumsi yang tidak berdasar. Penggunaan simbol dua jari tersebut belum tentu ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi. Hal ini karena simbol serupa juga bisa merujuk pada konteks lain, seperti Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang memiliki empat pasangan calon, simbol tersebut juga lazim digunakan untuk menyimbolkan *victory* atau *peace*. Oleh karena itu, Pemohon seharusnya melakukan klarifikasi langsung kepada pihak yang menggunakan simbol tersebut untuk memastikan konteks dan maksudnya. Tuduhan tanpa verifikasi hanya menimbulkan spekulasi yang tidak relevan;
- 5) Bahwa terkait dalil pemberian hibah APBD pada tanggal 7 November 2024 kepada **Yayasan dan Lembaga Keagamaan**, vide Permohonan nomor 6 angka 6 halaman 30, Pemohon menyatakan bahwa Hibah tersebut bermuatan kepentingan politik karena Bupati Sukabumi adalah bagian dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2. Tuduhan ini tidak benar. **Dalam dokumen resmi, Bupati Sukabumi tidak tercantum sebagai bagian dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2.** Hibah tersebut adalah kewajiban pemerintah daerah yang diatur dalam APBD dan telah melalui prosedur hukum yang berlaku. Apalagi Pihak Terkait juga tidak memiliki akses sama sekali terhadap proses hibah yang berasal dari APBD tersebut. Pemohon harus dapat membuktikan dengan bukti otentik jika tuduhan tersebut benar agar tidak asal tuduh yang berujung kepada fitnah kepada Pihak Terkait. Mohon diingat bahwa perbuatan fitnah memiliki Ancaman Pidana maksimal 4 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat 1 KUHP;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok Permohonan pada poin 6 Nomor 7 halaman 30 mengenai Pengangkatan pejabat eselon II.B melalui SK Bupati Sukabumi Nomor 800.1.3.2/Kep.687/BPKSDM/2024. Tuduhan Pemohon bahwa pengangkatan ini terkait kemenangan pasangan calon nomor urut 2 tidak relevan. **Pengangkatan tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum dengan bukti surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: 800.1.3.1/3750/MKPA/2024**

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi (Bukti PT-9) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3990/SJ perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tertanggal 21 Agustus 2024 (Bukti PT-10). Bawaslu Kabupaten Sukabumi juga tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu terkait pengangkatan ini. Tuduhan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan harus ditolak;

- 7) Bahwa pada poin 6 nomor 8 halaman 30-31 permohonan, terkait pengangkatan pejabat administrasi (camat) melalui SK Bupati Sukabumi Nomor 800.1.3.2/Kep.785/BPKSDM/2024, tuduhan Pemohon bahwa pengangkatan ini memiliki relevansi dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 juga tidak berdasar. **Proses pengangkatan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, disertai Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 800.1.3.1/5997/eid.MKPA/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 (Bukti PT-11) dan Surat Persetujuan dari Kemendagri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 100.2.2.6/7777/OTDA tanggal 2 Oktober 2024 (Bukti PT-12) Tuduhan Pemohon hanyalah asumsi spekulatif;**
- 8) Bahwa terkait poin 6 nomor 9 halaman 31, terdapat tuduhan ketidaknetralan aparatur pemerintah, Pemohon menyebutkan beberapa individu seperti staf desa, kepala dinas, dan lainnya. Tuduhan ini adalah isu tanpa dasar fakta yang kuat. Tindakan individu tersebut dilakukan secara personal dan tidak dapat dihubungkan dengan arahan atau instruksi dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2. Bahkan jika terjadi pelanggaran oleh aparatur, itu adalah kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Apalagi Pihak Terkait bukanlah petahana dan tidak memiliki akses apapun kepada aparatur pemerintahan, justru Pemohon sebagai Petahana dan birokrat yang berpeluang lebih besar dalam melakukan pelanggaran tersebut;

- 9) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 10 halaman 31, mengenai pembagian sabun cuci piring** di Desa Gunung Tanjung Kecamatan Cisolok pada tanggal 26 November 2024 **tidak memiliki relevansi dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2.** Fakta menunjukkan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari agenda kampanye resmi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya arahan atau instruksi dari Tim Pemenangan nomor urut 2 terkait pembagian sembako tersebut. Sebaliknya, fakta lapangan menunjukkan pembagian barang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1, antara lain:

9.1 Saudara Ariana Supriatna yang merupakan menantu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Demokrat atas nama Saepulloh, S.E selaku Anggota Koordinator Dapil 2 (dua) yang terregistrasi pada KPUD Sukabumi melalui **Surat Keputusan Nomor: 1//Paslon-Iz/VIII/2024** tentang Struktur TIM Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Sukabumi tahun 2024-2029, membagikan paket telur berlabel Pasangan calon nomor urut 1 di Desa Kadununggal, Kp. Legos, Kecamatan Kalapanunggal. Terlampir Video (**Bukti PT-13**);

9.2 Pembagian paket telur oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, atas nama Iman Adi Nugraha, SE., A.Kt. selaku **DEWAN PENGARAH** dalam **Surat Keputusan Nomor: 1//Paslon-Iz/VIII/2024** tentang Struktur TIM Pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupten Sukabumi tahun 2024-2029 oleh DRS. H. Iyos Somantri, M.Si - H. Zainul S, M.Si. yang telah terdaftar di KPUD Kabupaten Sukabumi, di **Posko Pemenangan Iman Adi Nugaraha untuk Pemohon** di Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon. Diketahui pada awal November 2024 Berdasarkan Vidio (**Bukti PT-14**);

9.3 Pembagian **soundsystem** di acara pengajian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Desa Kabadungan, Kecamatan Kabadungan, Kabupaten Sukabumi yang dilakukan secara terang-terangan oleh pasangan calon nomor urut 1 saudara Iyos Somantri (Pemohon) pada tanggal 5 November 2024 Berdasarkan foto (**Bukti PT-15**);

9.4 Pembagian kerudung di Kp. Babakan Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, di Masjid Jami' Nurussa'aadah yang dilakukan langsung oleh pasangan calon nomor urut 1 saudara Iyos Somantri pada tanggal 5 November 2024. **(Bukti PT-16);**

- 10) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 nomor 11 halaman 31 ketidaknetralan saudara Opik selaku Kepala Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu merupakan asumsi sepihak.** Pemohon hanya mendasarkan pada persepsi tanpa didukung bukti autentik yang menunjukkan adanya instruksi atau arahan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2.
- 11) Bahwa terhadap seluruh dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Bupati, ASN, Camat, dan Kepala Desa sepengetahuan Pihak Terkait tidak ada laporan ataupun putusan BAWASLU yang menyatakan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut terbukti merupakan tindak pelanggaran dalam Pemilu;
- 12) Bahwa sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan tindakan tidak netral dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Pasangan Calon nomor urut 1, antara lain:
 - 12.1 Saudara Mista selaku Kepala Desa Cilangkap, Kec. Lengkong, Kab. Sukabumi. Berfoto mengangkat simbol 1 jari dengan Saudara Iman Adinugraha anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat yang merupakan Dewan Pengarah sesuai dengan surat keputusan nomor 1/I/Paslon-lz/VIII/2024 tentang Struktur TIM Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Sukabumi tahun 2024-2029 **(Bukti PT-17);**
 - 12.2 Saudara Sulaeman Kepala Desa Lengkong, Kec. Lengkong Kab. Sukabumi berfoto mengangkat simbol 1 jari dengan Saudara Iman Adinugraha anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat yang merupakan Dewan Pengarah sesuai dengan surat keputusan nomor 1/I/Paslon-lz/VIII/2024 tentang Struktur TIM Pemenangan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Sukabumi tahun 2024-2029 (**Bukti PT-17**)

12.3 Saudara Puad Abdulatip Kepala Desa Tegallega, Kec. Lengkong, Kab. Sukabumi, Berfoto mengangkat simbol 1 jari dengan Saudara Iman Adinugraha anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat yang merupakan Dewan Pengarah sesuai dengan surat keputusan nomor 1/I/Paslon-Iz/VIII/2024 tentang Struktur TIM Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Sukabumi tahun 2024-2029. (**Bukti PT-17**)

12.4 Saudara Jalaludin Kepala Desa Sukaesmi, Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi berfoto mengangkat simbol 1 jari di rumah Aspirasi Saudara Heri Gunawan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Lebih lanjut, Heri Gunawan merupakan Dewan Pembina dalam struktur tim kampanye Pemohon tingkat Kabupaten, sesuai surat keputusan nomor 1/I/Paslon-Iz/VIII/2024 tentang Struktur TIM Pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sukabumi tahun 2024-2029 (**Bukti PT-18**);

13) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 nomor 12 halaman 31 ketidaknetralan Kepala Desa Pulosari Kalapanunggal yang menunjukan salam dua jari**, merupakan asumsi yang sengaja dibangun untuk merugikan Pihak Terkait. Karena salam dua jari dapat dilakukan oleh siapa saja dalam pose pengambilan gambar sehingga tidak elok ketika setiap pose berfoto dengan mengangkat dua jari selalu diidentikkan dengan politik praktis. Terhadap tuduhan tersebut Pihak Terkait tidak pernah di panggil ataupun di periksa oleh Bawaslu. Artinya pada saat itu pun Pemohon tidak pernah mempersoalkan permasalahan ini dan hal ini membuktikan bahwa peristiwa ini tidak relevan terhadap Permohonan *a quo*;

14) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 nomor 13 halaman 31. ketidaknetralan Kepala Desa Cianaga Kecamatan Kabandungan yang dibuktikan dengan voice note** tertanggal 20 November 2024, sesungguhnya tidak berdasar dan bersifat spekulatif, karena *voice*

note tersebut bisa saja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena tidak pernah ada permintaan dan suruhan oleh Pihak Terkait, dan terbukti bahwasanya Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi terkait permasalahan tersebut serta Pemohon pun tidak pernah melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Logikanya bila memang saat itu Pemohon merasa dirugikan, maka seharusnya saat itu juga Pemohon sudah melaporkannya kepada Bawaslu. Tidak adanya laporan oleh Pemohon menunjukkan bahwa patut diduga tuduhan tersebut merupakan rekayasa yang sengaja dilakukan oleh Pemohon sendiri;

- 15) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 6 nomor 14 halaman 31** ketidaknetralan Kepala Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan yang dibuktikan dengan *voice note* tertanggal 18 November 2024, sesungguhnya tidak berdasar dan bersifat spekulatif. Karena *voice note* tersebut bisa saja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena tidak pernah ada permintaan dan suruhan oleh Pihak Terkait kepada orang yang di maksud, terbukti bahwasanya Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengenai permasalahan tersebut. Apalagi yang namanya bukti digital haruslah diproses terlebih dahulu melalui *digital forensic* untuk dapat membuktikan validitas dan otentisitas bukti digital tersebut;
- 16) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 6 nomor 16 halaman 31** ketidaknetralan Kepala Desa dan Staff Desa Kadununggal Kecamatan Kalapanunggal yang melakukan salam dua jari tertanggal 22 Oktober 2024, merupakan asumsi yang dibangun. Karena salam dua jari dapat dilakukan oleh siapa saja dalam pose pengambilan gambar sehingga tidak elok ketika pose berfoto dengan mengangkat dua jari selalu di identikan dengan politik praktis dan terhadap permasalahan tersebut Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Artinya memang pada saat itu Pemohon sendiri tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu karena Pemohon tidak merasa dirugikan dan memang tidak ada hal signifikan yang terjadi akibat dari peristiwa tersebut bagi diri Pemohon. Oleh karenanya hal ini tidaklah

elok bila kemudian diungkit-ungkit oleh Pemohon saat ini dengan sengaja dibumbu-bumbui untuk menjatuhkan Pihak Terkait;

- 17) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 Nomor 17 halaman 32** ketidaknetralan staff Desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda yang dibuktikan dengan *voice note* tertanggal 28 November 2024, sesungguhnya tidak berdasar dan bersifat spekulatif, karena *voice note* tersebut bisa saja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena tidak pernah ada permintaan dan suruhan oleh Pemohon terbukti bahwasanya pihak terkait tidak pernah dipanggil Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Sekali lagi yang namanya bukti digital haruslah diproses terlebih dahulu untuk dapat membuktikan otentikasinya, keaslian dan keabsahannya untuk dapat dinyatakan bernilai sebagai alat bukti. Banyaknya bukti *voice note* yang baru saat ini dimunculkan oleh Pemohon patut diduga kuat berasal dari hasil rekayasa yang disengaja dibuat oleh Pemohon demi untuk memuluskan permohonannya secara melanggar hukum. Bukti yang demikian secara pembuktian jelas tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan harus diabaikan;
- 18) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 Nomor 18 halaman 32** ketidaknetralan Kepala Desa Cidadap Kecamatan Simpenan karena adanya ucapan selamat kepada pasangan calon nomor urut 2, tidaklah berdasar dan sangat spekulatif, sebab Pihak Terkait juga tidak mengetahui jika ada ucapan selamat dan motif ucapan selamat itu untuk apa. Selain itu, selama proses penghitungan suara belum selesai pun Pemohon sendiri juga sudah banyak menerima ucapan selamat dari pihak-pihak lain. Artinya hal ini adalah suatu kewajaran yang tidak perlu dibesar-besarkan oleh Pemohon hanya dengan tujuan untuk mencoreng nama baik Pihak Terkait;
- 19) **Bahwa pada poin 6 nomor 19 halaman 32 permohonan**, Pemohon mengajukan dalil mengenai mantan Kepala Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, yang juga menjabat sebagai Ketua Relawan Rajapati. Mantan kepala desa tersebut diduga membagikan uang kepada tokoh agama di Desa Cihanjavar, Kecamatan Nagrak, tepatnya di Kampung Lemah

Neundeut. **Setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,** pembagian uang tersebut diakui sebagai pembayaran *fee* untuk pembebasan lahan terhadap perusahaan. Adapun foto yang dimaksud oleh Pemohon hanyalah dokumentasi untuk laporan kepada perusahaan bahwa *fee* tersebut telah diserahkan kepada penerima hak atas pembebasan lahan tersebut;

- 20) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 Nomor 20 halaman 32** adanya pembagian minyak goreng dan sabun cuci piring oleh Timses Pasangan Calon nomor urut 2 di Kecamatan Kalibunder tertanggal 26 November 2024. Pihak Terkait tidak mengetahui orang yang dimaksud oleh Pemohon itu siapa, sumber minyak goreng dan sabun cuci piring dari mana, dan Pihak Terkait tidak pernah menyerahkan minyak goreng dan sabun cuci piring untuk dibagi-bagikan kepada calon pemilih melalui orang tersebut dan terhadap permasalahan tersebut Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
- 21) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 Nomor 21 halaman 32** mengenai pembagian uang di Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap oleh tim sukses Pasangan Calon 02 tertanggal 26 November 2024. Tidak berdasar karena Pihak Terkait pun tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Pemohon, sumber uang dari mana, dan Pihak Terkait tidak pernah menyerahkan uang untuk di bagi-bagikan kepada calon pemilih melalui orang tersebut dan terhadap permasalahan tersebut Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
- 22) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 Nomor 22 halaman 32** ketidaknetralan Kepala Desa Gunung Guruh Kecamatan Gunung Guruh yang memakai baju kaos Pasangan Calon nomor urut 2, Pihak Terkait tidak mengetahui secara pasti namun jika hal demikian benar terjadi tentunya harus dilaporkan dan ditindak oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Karena Pemohon tidak melaporkannya kepada Bawaslu, artinya hal ini memang tidak memiliki dampak signifikan bagi Pemohon.

Namun Pihak Terkait meyakini hal tersebut tidak berhubungan dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 atau Pihak Terkait;

- 23) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 Nomor 23 halaman 32**, yang menyebutkan adanya pembagian sembako bertuliskan nama Marwan Hamami sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut 2, tidaklah benar dan bersifat spekulatif. Faktanya, Marwan Hamami bukanlah tim sukses pasangan calon nomor urut 2. **Adapun tangkapan layar yang didalilkan Pemohon tersebut adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020**, ketika Marwan Hamami mencalonkan diri sebagai Bupati dan Iyos Somantri (Pemohon) sebagai calon Wakil Bupati pada saat itu. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena hanya menggunakan video lama untuk mendiskreditkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil ini seharusnya ditolak dan dikesampingkan.
- 24) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 Nomor 24 halaman 32**, ketidaknetralan wakil Ketua BPD Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja karena melakukan kampanye bersama pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 30 November 2024, tidaklah benar sebab Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak pernah melibatkan atau memanggil yang bersangkutan untuk sama-sama mengikuti kampanye. Perlu juga Pihak terkait ingatkan kembali kepada Pemohon bahwasanya pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024, sedangkan dalil Pemohon adalah kampanye tanggal 30 November 2024. Bagaimana mungkin kampanye dilaksanakan pada tanggal setelah pencoblosan, maka jelas dan nyata bahwasanya hal itu tidak benar dan halusinasi Pemohon semata;
- 25) **Bantahan terhadap Dalil Pemohon Poin 6 Nomor 25 halaman 32** yaitu dari Pihak Terkait, tidak mengetahui atau mengenal H. Encub, Ketua IPHI Kecamatan Cidahu, yang disebut dalam dalil Pemohon. H. Encub bukanlah bagian dari tim pemenang pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana terdaftar di KPUD Kabupaten Sukabumi. Sebaliknya, **pelanggaran kampanye justru dilakukan oleh pasangan calon nomor**

urut 1. Tindakan kampanye di tempat ibadah seperti masjid dan di sekolah-sekolah melanggar ketentuan Pasal 57 Huruf i PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan kampanye yang melibatkan pasangan calon nomor urut 1 saudara Iyos Somantri (Pemohon), secara langsung di tempat ibadah dan sarana pendidikan, memperkuat dugaan pelanggaran. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh calon untuk melakukan kampanye atau pencarian dukungan (**Bukti PT-15 dan Bukti PT-16**). Setiap agenda kampanye wajib dilaporkan kepada Bawaslu dan KPUD Kabupaten Sukabumi. Namun, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku;

- 26) **Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada Poin 6 Nomor 26 halaman 33**, adanya pernyataan dukungan pada Pasangan Calon nomor urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Desa Cirendang, Kepala Desa Cimaja, Kepala Desa Cileungsir, Kepala Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak pada tanggal 7 November 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon, tidaklah berdasar dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
- 27) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 27 halaman 33 dalam Pokok Permohonan**, yang menyebutkan deklarasi Ketua DPC APDESI, tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar permohonan. Hal ini karena APDESI adalah organisasi independen di luar pemerintahan (*Non-Governmental Organization/NGO*). Jika deklarasi tersebut dianggap melanggar hukum, maka penanganannya adalah kewenangan Bawaslu dan bukan menjadi tanggung jawab pasangan calon nomor urut 2 atau Pihak Terkait. **Lebih lanjut, terkait alat bukti berupa foto dan video yang didalilkan Pemohon, faktanya foto tersebut diambil pada tanggal 3 September 2024, (Bukti PT-19) jauh sebelum Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 oleh KPU.** Pertemuan tersebut bertujuan untuk memasang bakal calon bupati dan wakil bupati.

Padahal, hal serupa juga dilakukan oleh Pemohon dengan memasang dirinya sebagai bakal calon bupati dengan Deden Deni Wahyudin sebagai bakal calon wakil bupati. Hal ini dibuktikan dengan foto dan flyer yang menunjukkan kegiatan tersebut **(Bukti PT-20)**. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak berdasar dan seharusnya dikesampingkan;

- 28) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 28 halaman 33 dalam pokok permohonan** Tuduhan ketidaknetralan Kepala Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak, yang disebut melakukan intimidasi terhadap pimpinan sebuah perusahaan swasta dengan ancaman pemecatan karyawan perusahaan peternakan ayam, tidak didukung oleh bukti konkret. **Dalil tersebut terkesan berlebihan karena memberikan asumsi bahwa seorang Kepala Desa memiliki kewenangan yang terlalu besar (*overpower*) untuk mengintervensi kebijakan internal perusahaan swasta.** Kepala Desa tidak memiliki wewenang hukum untuk mengatur atau mempengaruhi keputusan operasional perusahaan swasta, termasuk kebijakan terkait pemecatan karyawan. Tuduhan ini mengabaikan batasan kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon pada nomor 28 halaman 33 hanya berupa tuduhan spekulatif belaka yang tidak memiliki dasar hukum atau memiliki bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, dalil tersebut tidaklah benar dan tidak layak untuk dipertimbangkan;
- 29) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 29 halaman 33 Pokok Permohonan,** ketidaknetralan Kepala UPTD Pasar Palabuhanratu yang memberikan pengarahan untuk mendukung pasangan calon nomor 2, tidak didasarkan dengan sebuah fakta, dan sesungguhnya tuduhan tersebut tidak berdasar dan bersifat spekulatif, karena *voice note* tersebut bisa saja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena tidak pernah ada permintaan dan suruhan oleh Pihak Terkait, terbukti bahwasanya Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi;

- 30) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 30 halaman 33 Pokok Permohonan**, ada Whatsapp grup yang bernama “**Kades AA Well**” yang beranggotakan para Kepala Desa pendukung pasangan calon nomor urut 2, hanyalah spekulatif belaka dari Pemohon, sebab sepengetahuan Pihak Terkait grup Whatsapp seperti itu adalah hal yang lumrah bisa dibuat oleh siapa saja, dan keberadaan grup Whatsapp tersebut tidak bisa langsung dikaitkan dengan pasangan calon nomor urut 2 apalagi karena tidak jelas sejak kapan grup tersebut dibuat, dan siapa saja yang ada di grup tersebut. Hal terpenting yang patut digarisbawahi adalah grup tersebut (kalau memang ada) dibentuk bukan atas prakarsa dari Tim Pemenangan Pihak Terkait dan diluar sepengetahuan Pihak Terkait, yang bisa jadi grup tersebut sengaja dibuat setelah adanya Permohonan *a quo* demi untuk mendukung dalil Pemohon yang minim bukti;
- 31) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 31 halaman 33 Pokok Permohonan**, ketidaknetralan Kepala Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin dengan menuliskan komentar pada chat grup Whatsapp mendukung pasangan calon nomor urut 2, hanyalah spekulatif belaka dari Pemohon semata, sebab sepengetahuan Pihak Terkait grup whatsapp seperti itu adalah hal yang lumrah bisa dibuat oleh siapa saja, dan keberadaan grup whatsapp tersebut tidak bisa langsung dikaitkan dengan pasangan calon nomor urut 2 sehingga patut diduga kuat mengandung indikasi grup tersebut sengaja dibuat sebagai bentuk rekayasa dari Pemohon sendiri untuk menggiring opini untuk menjatuhkan Pihak Terkait;
- 32) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 32 halaman 33 Pokok Permohonan**, ketidaknetralan Kepala Desa Karang Tengah berserta perangkat dengan melakukan selebrasi kemenangan pada tanggal 28 November 2024, persangkaan tersebut tidak jelas dan kabur sebab tidak ada urgensinya dengan proses demokrasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi, selain itu, tidak diketahui pula motif dari selebrasi tersebut apakah ditunjukan untuk kemenangan atau kekalahan calon bupati dan wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur atau selebrasi lain diluar konteks pemilihan kepala daerah;

33) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 33 halaman 34 Pokok Permohonan**, adanya pembagian minyak goreng dan kaos Pasangan Calon nomor urut 2 di Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap kepada warga, menanggapi dalil Pemohon bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari agenda kampanye resmi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya arahan atau instruksi dari Tim Pemenangan Nomor Urut 2 terkait pembagian minyak goreng dan kaos Pasangan Calon, selain itu, kaos yang dibagikannya pun tidak diketahui bagaimana bentuk, jenisnya, dan bukan yang resmi dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Pihak terkait. Sebaliknya, fakta lapangan menunjukkan pembagian barang oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) terjadi dan dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut :

33.1 Saudari Ariana Supriatna yang merupakan menantu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Demokrat atas nama Saepulloh, S.E;

33.2 Pembagian paket telur pada awal bulan 24 November 2024 oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, atas nama Iman Adi Nugraha, SE., A.Kt;

33.3 Pembagian soundsystem di acara pengajian IPHI di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi yang dilakukan secara terang-terangan oleh pasangan calon nomor urut 1;

33.4 Pembagian kerudung di Kp. Babakan Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, yang dilakukan langsung oleh pasangan calon nomor urut 1 saudara Iyos Somantri.

Sebagaimana telah di paparkan pada poin 9 halaman 23-24 keterangan Pihak Terkait diatas;

34) **Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Nomor 34 halaman 34 Pokok Permohonan**, ketidaknetralan Kepala Desa Ciheulang Tonggoh

Kecamatan Cibadak dengan hadir di kampanye pasangan calon nomor urut 2, berfoto dan melakukan deklarasi bersama staff Kepala Desa. Menanggapi dalil Pemohon bahwa hal tersebut tidak diketahui oleh Pihak Terkait ditengah ramainya kegiatan kampanye. Setiap agenda kampanye Pihak Terkait memberitahukan terlebih dahulu kepada Bawaslu, sehingga jika terdapat oknum-oknum ASN, Kepala Desa yang hadir dalam kampanye tersebut diluar kendali Pihak Terkait, dan hal itu merupakan ranah dan kewenangan Bawaslu;

- 35) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 35 halaman 34 Pokok Permohonan** mengenai Camat Jampang Kulon mengarahkan pegawai tidak relevan. Tindakan tersebut, jika benar terjadi, bukan instruksi dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- 36) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 36 halaman 34 Pokok Permohonan**, ketidaknetralan Kepala Desa Padajaya Kecamatan Jampang Kulon yang berfoto memberikan salam 2 jari. merupakan asumsi yang dibangun. Karena salam dua jari dapat dilakukan oleh siapa saja dalam pose pengambilan gambar sehingga tidak elok ketika pose berfoto dengan mengangkat dua jari selalu di identikan dengan politik praktis;
- 37) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 37 halaman 34 Pokok Permohonan**, Ketidaknetralan pengawas Kelurahan Desa Benda Kecamatan Cicurug dengan memberikan simbol 2 jari pasca pencoblosan. Merupakan asumsi yang dibangun dan tidaklah berdasar, sebab simbol dua jari tersebut belum tentu diarahkan kepada pasangan calon, bisa saja yang bersangkutan memiliki pemaknaan yang berbeda dengan Pemohon;
- 38) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 38 halaman 34 Pokok Permohonan**, ketidaknetralan Kepala Desa Cikaret, Kepala Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes berfoto dengan Pasangan Calon nomor 2 dan Dirut Pesona Wisata, merupakan asumsi, dan tidak dapat dijadikan patokan bahwa hal tersebut merupakan bentuk dukungan dan sebagainya;
- 39) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 39 halaman 34 Pokok Permohonan**, mengenai deklarasi oleh Kepala Desa Cijengkol tidak

relevan. Pasangan calon nomor urut 2 tidak mengetahui atau terkait dengan agenda deklarasi tersebut;

- 40) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 40 halaman 34-35 Pokok Permohonan**, mengenai ucapan jargon dan isyarat dengan gerakan 2 jari oleh Kepala Desa Sukamulya dan Kepala Desa Cijengkol Kecamatan Caringin, berlokasi di Mushola Kantor Kepolisian Sektor Caringin pada tanggal 16 Oktober 2024, tidak diketahui motifnya secara pasti oleh tim pemenangan Pasangan Calon nomor 2, walaupun itu berhubungan dengan pilkada maka sudah menjadi kewajiban Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap kedua oknum Kepala Desa tersebut. Sehingga hal ini, tidak berkaitan dengan pasangan calon nomor urut 2 dan merupakan asumsi semata dari Pemohon yang terlalu sensitif dengan angka 2;
- 41) **Bahwa Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 41 halaman 35 Pokok Permohonan**, ketidaknetralan Kepala Desa Cimaja Kecamatan Cikakak dengan menghadiri kegiatan pasangan calon nomor urut 2 di rumah kediaman anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Rika Yulistiana. Menanggapi dalil Pemohon tersebut bahwasanya pada kegiatan tersebut Pihak Terkait tidak mengetahui siapa saja yang hadir, termasuk Kepala Desa yang dimaksud, dan tidak pernah ada panggilan dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap Pihak Terkait;
- 42) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 42 halaman 35 Pokok Permohonan**, mengenai deklarasi yang dilakukan di **Rumah Makan Joglo Kota Sukabumi** oleh ketua DPC APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sukabumi, Ketua Parade Nusantara tidak berhubungan dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2, sebab jika hal tersebut benar terjadi maka ranah Bawaslu lah untuk melakukan pencegahan dan atau penindakan terhadap personal masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu kemenangan pasangan calon nomor urut 2 tidak memiliki relevansi konkrit dengan deklarasi yang selenggarakan oleh **APDESI** atau organisasi yang berada diluar pemerintahan (**NGO**);

- 43) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 43 halaman 35 Pokok Permohonan**, pengumpulan warga oleh Kepala Desa Mandarajaya Kecamatan Ciemas, tidak memiliki relevansi dengan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2, dan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2, tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengenai kegiatan tersebut;
- 44) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 44 halaman 35 Pokok Permohonan**, yang menyatakan adanya pembagian sembako oleh anggota DPRD Fraksi PAN atas nama Mansurudin pada tanggal 20 November 2024 untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, tidak didukung oleh bukti yang valid mengenai motif atau keterkaitan tindakan tersebut dengan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Mansurudin bukanlah bagian dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana terdaftar resmi di KPUD Sukabumi. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Mansurudin, jika memang terjadi, merupakan tindakan pribadi yang tidak dapat dianggap mewakili atau didasari arahan dari tim pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2. Mengingat **Mansurudin** tidak termasuk dalam struktur tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterkaitannya dengan arahan atau instruksi dari tim, dalil Pemohon pada nomor 44 halaman 35 tidak memiliki dasar hukum dan patut untuk ditolak. Justru pembagian sembako dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana telah di paparkan pada halaman sebelumnya pada keterangan Pihak Terkait poin 9 halaman 23-24 diatas;
- 45) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 45 halaman 35 Pokok Permohonan**, mengenai pertemuan Kepala Desa Nagrak Selatan dengan calon Bupati Sukabumi yang diketahui Pemohon pada tanggal 3 Desember 2024, merupakan asumsi sebab jika didalilkan pertemuan artinya hal tersebut telah diagendakan, padahal tidak ada agenda pertemuan yang direncanakan oleh tim pemengan dengan Kepala Desa yang dimaksud oleh Pemohon, sedangkan pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024, maka tidak ada kaitanya pertemuan

tersebut dengan permohonan aquo karena pertemuan dilakukan setelah perhitungan suara selesai;

- 46) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 46 halaman 35 Pokok Permohonan**, mengenai pertemuan Para Kepala Desa yakni Kepala Desa Sukatani, Kepala Desa Buniwangi, Kepala Desa Cipeundeuy, Kepala Desa Warnasari, Kepala Desa Pasir Ipi Kecamatan Surade di kediaman ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, tidak memiliki relevansi dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2, sebab pertemuan tersebut diluar pengetahuan tim kemenangan pasangan calon nomor urut 2, atas permasalahan tersebut Pihak Terkait tidak pernah di panggil dan di periksa oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
- 47) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 47 halaman 35 Pokok Permohonan**, pembagian sembako minyak goreng dan sabun cuci di Desa Babakan Jaya dan Desa Pondok Kaso Landeuh ParungKuda dari tim kampanye pasangan calon nomor urut 2, tidak lah benar, sebab tidak ada instruksi dan arahan terhadap TIM dalam melakukan aktifitas pembagian sembako kepada masyarakat dan tidak pernah ada panggilan Bawaslu yang ditunjukan kepada tim kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Sehingga dalil Pemohon mengenai dibagikan oleh TIM kemenangan tidaklah benar dan tidak berdasarkan fakta. Justru pembagian sembako dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon), sebagaimana telah di paparkan pada halaman sebelumnya pada keterangan Pihak Terkait poin 9 halaman 23-24 diatas;
- 48) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 48 halaman 35-36 terkait indikasi penggelembungan suara di beberapa TPS tidak relevan**. Dalil Pemohon mengenai indikasi penggelembungan suara di TPS 8 Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, dan TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu, serta dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih oleh penyelenggara, tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pasangan calon nomor urut 2. Tuduhan tersebut tidak menunjukkan keterlibatan atau pengaruh dari tim kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Isu yang

diajukan Pemohon merupakan kewenangan penuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas untuk memproses, menindak, dan memberikan sanksi atas pelanggaran pemilu, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasar, sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan pada beberapa poin di atas. Dimana penggelembungan suara yang dimaksud oleh Pemohon adalah semata-mata tentang selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon pada nomor 48 halaman 35-36 patut dinyatakan tidak relevan dan harus ditolak;

- 49) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 49 halaman 36 Pokok Permohonan**, mengenai pesan berantai di media sosial tidak terbukti dan perlu pembuktian hukum lebih lanjut. Pesan berantai di media sosial WhatsApp yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan bukti yang sah dan valid dalam persidangan. Sebab pesan berantai bersifat anonim karena tidak ada bukti yang menunjukkan dengan jelas siapa pengirim pesan tersebut dan apakah pesan tersebut berasal dari tim pemenang pasangan calon nomor 2, bukti foto tidak memadai karena Foto yang dilampirkan hanya menunjukkan tangkapan layar pesan tanpa konfirmasi sumber asli atau hubungan langsung dengan pasangan calon nomor 2. Bukti seperti ini rawan manipulasi dan tidak memiliki validitas hukum. **Pesan yang beredar di media sosial, termasuk WhatsApp, merupakan media terbuka yang tidak dapat dikontrol oleh pasangan calon atau tim pemenangannya. Tidak ada bukti konkret bahwa pasangan calon nomor 2 secara langsung menginstruksikan atau memiliki kaitan dengan pesan tersebut.** Tanpa adanya pengesahan atau konfirmasi resmi, tuduhan ini hanya bersifat asumsi belaka. Pesan di media sosial sering kali digunakan sebagai sarana penyebaran hoaks atau fitnah dalam kompetisi politik. Mengandalkan pesan berantai tanpa klarifikasi atau verifikasi dari pihak yang berkepentingan sangat tidak dapat diterima dalam konteks hukum. Tuduhan ini cenderung bersifat spekulatif dan tidak berdasar. Dalil Pemohon terkait pesan berantai di media sosial WhatsApp tidak dapat dibuktikan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa

adanya bukti yang sah, jelas, dan relevan yang menunjukkan keterlibatan pasangan calon nomor 2, tuduhan ini patut dinyatakan tidak relevan dan harus ditolak;

- 50) Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 50 halaman 36, mengenai *money politik* di **Gg. Ajid Cimaja, 003/002 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak**, yang mengatasmakan pasangan calon nomor urut 2 kepada warga pada tanggal 27 November 2024, tidak ada relevansinya dengan pasangan calon nomor urut 2, selain itu hal ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu dan tidak ada panggilan dari Bawaslu kepada pasangan calon nomor urut 2 apabila pembagian uang tersebut benar-benar terjadi;
- 51) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 51 halaman 36 Pokok Pemohonan**, mengenai beredarnya hasil hitung cepat di media sosial versi Bawaslu tanggal 28 November 2024, yang mendahului PLENO KPU, merupakan ranah Bawaslu untuk memberikan tanggapan.
- 52) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 52 halaman 36 Pokok Permohonan**, pembagian Sabun Cuci dan Stiker, dikampung Pamatutan RT. 23, Desa Bojong Genteng Kecamatan Bojong Genteng dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 tidak berdasar dan merupakan asumsi, karena terhadap tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 tidak ada instruksi atau arahan untuk melakukan pembagian sabun cuci piring sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Justru pembagian sembako dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana telah di paparkan pada halaman sebelumnya poin 9 halaman 23-24 diatas;
- 53) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 53 halaman 36 Pokok Permohonan**, bahwa telah terjadi pembagian Sabun Cuci Piring di Desa Kartaraharja Kecamatan Cikembar dari pasangan calon nomor urut 2, tidaklah benar, sehingga perlu di dilakukan validasi secara mendetail mengenai tim yang dimaksud. Karena tidak ada sama sekali instruksi dan arahan tim pemenangan untuk melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat, Justru pembagian sembako dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana telah di paparkan pada halaman sebelumnya poin 9 halaman 23-24 diatas;

- 54) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 54 halaman 36 Pokok Permohonan**, terkait dengan foto Staff Kesekretarian Dinas PU Kabupaten Sukabumi bersama rekan-rekannya, berlatar belakang baliho gambar Pasangan Calon nomor urut 2, perlu dilakukan verifikasi kepada yang bersangkutan apakah foto tersebut benar berada di kediaman rumah Pasangan Calon nomor urut 1 ataukah bukan, serta Pemohon mesti menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan, sebab bisa jadi foto tersebut berada di tempat lain yang kebetulan pada saat berfoto membelakangi baliho pasangan calon nomor urut 2, hal demikian merupakan sesuatu yang lumrah banyak terjadi bukan hanya pada staff, pejabat dan lain sebagainya tetapi juga kepada masyarakat yang secara kebetulan berfoto mengenai baliho pasangan calon nomor urut 2;
- 55) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 55 halaman 36 Pokok Permohonan**, mengenai Staff kesekretarian Dinas PU Kabupaten Sukabumi atas nama Wahyu yang melakukan foto bersama dengan calon bupati Asep Japar pada rangkaian kegiatan turnamen sepak bola di Kecamatan Cisolok. Menanggapi dalil Pemohon Pihak Terkait tidak mengetahui maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada poin ini, karena ia tidak menjelaskan motifnya secara spesifik, hanya berdasarkan asumsi yang mana asumsi tersebut ketika masyarakat berfoto dengan calon bupati Sukabumi Asep Japar sudah menjadi bentuk dukungan;
- 56) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 56 halaman 36-37 Pokok Permohonan**, Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Sukabumi bersama rekan berfoto menggunakan kaos calon bupati Asep Japar, ialah diluar pengetahuan tim pemenang pasangan calon nomor urut 2, dan tidak ada panggilan dari Bawaslu mengenai foto yang didalilkan Pemohon;
- 57) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 57 halaman 37 Pokok Permohonan**, mengenai foto Kepala Desa Karangpapak Kecamatan Cikakak yang dilakukan bersama warga di kegiatan turnamen sepak bola menggunakan kaos Asep Japar, ialah diluar pengetahuan tim pemenang pasangan calon nomor urut 2, dan tidak ada panggilan dari Bawaslu mengenai foto yang didalilkan Pemohon;

- 58) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 58 halaman 37 Pokok Permohonan**, Kepala Desa Langensari Kecamatan Sukaraja yang diduga membuat pernyataan mendukung pada bulan Oktober 2024 terhadap pasangan calon nomor urut 2, ialah diluar pengetahuan tim pemenang pasangan calon nomor urut 2, dan tidak ada panggilan dari Bawaslu mengenai foto yang didalilkan Pemohon;
- 59) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 59 halaman 37 Pokok Permohonan**, mengenai foto salam 2 jari oleh Kepala Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, merupakan asumsi yang dibangun dan tidak berdasar. Kerena salam dua jari dapat dilakukan oleh siapa saja dalam pose pengambilan gambar sehingga tidak elok ketika pose berfoto dengan mengangkat dua jari selalu di identikan dengan politik praktis;
- 60) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 60 halaman 37 Pokok Permohonan**, mengenai ketidaknetralan Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran yang berfoto menggunakan salam 2 jari, merupakan asumsi yang dibangun dan tidak berdasar. Kerena salam dua jari dapat dilakukan oleh siapa saja dalam pose pengambilan gambar sehingga tidak elok ketika pose berfoto dengan mengangkat dua jari selalu di identikan dengan politik praktis;
- 61) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 61 halaman 37 Pokok Permohonan**, mengenai ketidaknetralan Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran berdasarkan tangkapan foto layar facebook ucapan selamat atas keterpilihan pasangan calon nomor dua, ialah diluar pengetahuan tim pemenang pasangan calon nomor urut 2, karena motif dari ucapan selamat tersebut tidak diketahui pasti maksud dan tujuannya serta tidak ada panggilan dari Bawaslu mengenai foto yang didalilkan Pemohon;
- 62) **Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 nomor 62 halaman 37 Pokok Permohonan**, mengenai persiapan pembagian sembako pasangan nomor urut 2 di aula rapat desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi, menanggapi dalil Pemohon tidak ada instruksi atau arahan untuk

melakukan persiapan pembagian sembako, dan tidak ada panggilan dari Bawaslu mengenai kejadian tersebut;

- 63) **Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan Poin 7 halaman 37** pada pokok permohonan mengenai dugaan TSM bukan tanggung Jawab Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2. Tindakan aparaturnya desa, pemerintah daerah, lembaga, atau organisasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, **tidak dapat dibebankan kepada tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2.** Adalah tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah dan menindak apabila terjadi aktivitas politik yang melanggar aturan, khususnya selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Tim pemenangan tidak memiliki otoritas untuk mengawasi atau menghentikan aktivitas politik yang dilakukan oleh aparaturnya atau pihak lain yang bersifat independen. Pemohon mengklaim adanya laporan kepada Bawaslu Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi, tetapi tidak memberikan bukti hasil keputusan resmi dari Bawaslu yang menunjukkan adanya pelanggaran TSM yang berkaitan dengan pasangan calon nomor urut 2. Pihak Terkait percaya bahwa hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukabumi, baik kemenangan maupun kekalahan pasangan calon, merupakan cerminan murni dari hati nurani masyarakat. Tuduhan mengenai adanya pengaruh yang bersifat TSM tidak memiliki relevansi langsung terhadap proses demokrasi yang terjadi. Terkait dugaan aktivitas politik aparaturnya, pemerintah daerah, atau organisasi, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, untuk memberikan klarifikasi dan penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab atas aktivitas aparaturnya sebagaimana dimaksud. Dalil Pemohon perihal dugaan pelanggaran TSM hanyalah asumsi yang bersifat spekulatif tanpa dasar bukti yang kuat dan keterangan yang relevan dari pihak terkait. Dengan demikian, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil - dalil yang didalilkan oleh Pemohon, karena tidak dapat membuktikan

adanya keterlibatan Pasangan Calon nomor urut 2 dalam dugaan pelanggaran tersebut;

- 64) **Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak didukung oleh alat bukti, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 65) **Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya, maka mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 3057 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 22:45 WIB tersebut;**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten **Sukabumi Nomor: 3057 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 22:45 WIB;

A T A U

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1781 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1782 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi tangkapan layar Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukabumi 2024 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi;
5. Bukti PT-5 : Salinan cuplikan video (panel 1 Sidang Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota) saat agenda Sidang Pendahuluan tanggal 8 Januari 2025 pembacaan Pokok Permohonan oleh Pemohon;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1/I/Paslon-Iz/VIII/2024 tentang Struktur Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 - 2029. DRS. H. IYOS SOMANTRI, M.Si – H. ZAIUNUL S, M,Si.
7. Bukti PT-7 : Salinan cuplikan Video Pada Sidang Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi pada Jum'at, 6 Desember 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-003/IN/TPK/IX/2024 Tentang Pengesahan Tim Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi DRS. H. ASEP JAPAR, M.MM. DAN H. ANDREAS, SE. PERIODE 2024-2029.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: 800.1.3.1/3750/MKPA/2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3990/SJ perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tertanggal 21 Agustus 2024.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 800.1.3.1/5997/eid.MKPA/2024 tanggal 9 Oktober 2024.

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Persetujuan dari Kemendagri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 100.2.2.6/7777/OTDA tanggal 2 Oktober 2024;
13. Bukti PT-13 : Salinan video pembagian paket Telur oleh Saudara Ariana Supriatna, di KP. Legos, Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal, pada tanggal 20 November 2024;
14. Bukti PT-14 : Salinan cuplikan video Pembagian paket telur oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, atas nama Iman Adi Nugraha, SE., A.Kt. di Posko Pemenangan Iman Adi Nugraha untuk Pemohon di Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon. Diketahui pada tanggal 24 November 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Foto Pembagian *soundsystem* di acara pengajian IPHI di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang dilakukan secara terang-terangan oleh saudara Iyos Somantri (Pemohon) pada tanggal 5 November 2024.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Foto Pembagian kerudung di Kp. Babakan Desa Cipeundeuy, Kecamatan Kabandungan, di Masjid Jami' Nurussa'aadah yang dilakukan langsung oleh pasangan calon nomor urut 1 saudara Iyos Somantri pada tanggal 5 November 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Foto saudara Mista selaku Kepala Desa Cilangkap, Saudara Sulaeman Kepala Desa Lengkong, Saudara Puad Abdulatip Kepala Desa Tegallega, Berfoto mengangkat simbol 1 jari dengan Saudara Iman Adinugraha anggota DPR RI F. Partai demokrat yang merupakan Dewan Pengarah;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Foto saudara Jalaludin Kepala Desa Sukaresmi, Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi. Berfoto mengangkat simbol 1 jari di rumah aspirasi Saudara Heri Gunawan anggota DPR RI F. Partai Gerindra;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Foto yang menunjukkan bahwa faktanya foto tersebut diambil pada tanggal 3 September 2024.

Terkait alat bukti berupa foto dan video yang didalilkan Pemohon, faktanya foto tersebut diambil pada tanggal 3 September 2024, jauh sebelum Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 oleh KPU. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjodohkan bakal calon bupati dan wakil bupati;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Foto Pemohon dengan memasang dirinya sebagai bakal calon bupati dengan saudara Deden Deni Wahyudin sebagai bakal calon wakil bupati.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Panwaslu Kecamatan Bojonggggenteng Kabupaten Sukabumi pada tanggal 4 Desember 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bojonggggenteng/13.24/XII/2024 **[Vide Bukti PK.14.2-1]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan/Tidak ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan karena tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni Pasal 178C ayat (1)

Juncto Pasal 178C ayat (2) *Junctis* Pasal 178C ayat (3) Undang-Undang Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-2]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 101/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta lampirannya pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni *“saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi”* dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut **[Vide Bukti PK.14.2-3]**:

Tabel 1
Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Sukabumi

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Iyos Somantri dan H. Zainul S	498.990
2	H. Asep Japar dan H. Andreas	564.862
Total Suara Sah		1.063.852

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojonggggenteng Kabupaten Sukabumi pada tanggal 4 Desember 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bojonggggenteng/13.24/XII/2024 yang pada pokoknya adanya peristiwa Di TPS 08 Desa Berekah Surat C.Pemberitahuan-KWK atas nama Ibu Ulan diambil kembali oleh Petugas KPPS pada tanggal 27 November 2024, sebelum diambil ibu Ulan ditanya sama petugas KPPS tentang bisa atau tidaknya datang ke TPS pada saat itu, Ibu Ulan menjawab tidak bisa datang ke TPS karena sakit kemudian surat C Pemberitahuan diambil

kembali oleh petugas sehingga pelapor menduga bahwa C. Pemberitahuan-KWK disalahgunakan oleh Petugas KPPS dan setelah dibuktikan ternyata hak suara atas nama Ibu Ulan dipergunakan oleh orang lain **[Vide Bukti PK.14.2-1]:**

- 2.1 Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng melakukan Kajian Awal Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII /2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* belum memenuhi Syarat Formil akan tetapi telah memenuhi syarat Materil. Oleh karenanya Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng memberikan kesempatan pada pelapor untuk melengkapi sayarat formil berupa identitas terlapor berupa nama dan alamat masing-masing paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Pelapor telah melakukan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan (Formulir Model A.3.1) **[Vide Bukti PK.14.2-4]**
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan/tidak dapat ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **[Vide Bukti PK.14.2-5]**
- 2.3 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi melakukan pembahasan kedua terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/ 13.24/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam hal ini saksi bukan saksi fakta yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri melainkan saksi *testimonium de auditu* merupakan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Bahwa saksi dari pelapor ini tidak mengetahui secara detail dan komprehensif berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan terutama berkaitan dengan perbuatan para Terlapor;

- Bahwa unsur-unsur “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam laporan yang disampaikan oleh Pelapor itu tidak terpenuhi karena tidak ada bukti minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menentukan subjek hukum terhadap perbuatan sebagaimana uraian dugaan pelanggaran dilakukan mengarah kepada kedua Terlapor dalam laporan ini sehingga menghindari *error in persona* (kekeliruan dalam menentukan pihak yang terlibat dalam suatu kasus);
- Dari alasan hukum *a quo* dapat ditarik kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor tidak cukup bukti yang mengarah kepada kedua Terlapor atas perbuatan berdasarkan dugaan pelanggaran sehingga dikaitkan dengan unsur pasal yang disangkakan terhadap laporan tersebut belum dapat ditindaklanjuti dan belum memenuhi unsur-unsur Pasal dugaan tindak pidana pemilihan

[Vide Bukti PK.14.2-6]

- 2.4 Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyusun Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya laporan dengan Nomor Register 02/Reg/LP/PB/Kab/ 13.24/XII/2024 dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan karena tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni Pasal 178C ayat (1) *Juncto* Pasal 178C ayat (2) *Junctis* Pasal 178C ayat (3) Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-2]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 469 TPS yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi diduga terjadi penggelembungan Suara (Angka 3 Halaman 6-27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 222/LHP/PM.01.02/W.2-14/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng mengenai keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS **[Vide Bukti PK.14.2-7]**, sebagai berikut:
 - a. Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng merekomendasikan Kepada PPK Kecamatan Bojonggenteng untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng melalui Surat Nomor: 52/PM.00.02/K.JB-16.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Desa Berekah **[Vide Bukti PK.14.2-8]**. Terhadap rekomendasi tersebut KPU melaksanakan PSU pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 3056 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.14.2-9]**.
 - b. Berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024 **[Vide Bukti PK.14.2-10]**. Bawaslu Kabupaten Sukabumi meneruskan rekomendasi Nomor: 174/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024, temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-11]**.
2. Berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec. Pabuaran/13.24/XII/2024 **[Vide Bukti PK.14.2-68]** Bawaslu Kabupaten Sukabumi kemudian menyampaikan Surat Nomor: 165 /PP.00.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024 Perihal Rekomendasi

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24/ XII/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-69]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng pada tanggal 4 Desember 2024 menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik dan telah menyampaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng Nomor: 222/LHP/PM.01.02/W.2-14/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.14.2-7]**, yang kemudian telah diregister dengan Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024 **[Vide Bukti PK.14.2-10]** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- 1.1.1 Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng terhadap keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS merupakan dugaan pelanggaran Administrasi yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) *in casu*, Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor: 52/PM.00.02/K.JB-16.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Desa Berekah **[Vide Bukti PK.14.2-8]**.

1.1.2 Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng mengawasi pelaksanaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Desa Berekah dan mendapatkan informasi mengenai tidaklanjut tersebut yang pada pokoknya:

- KPU Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Keputusan Nomor 3056 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 dengan Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, bertempat di TK Ummi Siti Hafsah Kp. Cijulang Rt. 18 Rw. 04 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng **[Vide Bukti PK.14.2-9]**.
- KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan Surat Nomor: 1402/PL.02.6-SD/3202/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan *Stakeholder* yang pada pokoknya memberitahukan pelaksanaan PSU di TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng dilaksanakan tanggal 6 Desember 2024 bertempat di TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng (TK Ummi Siti Hafsah Kp. Cijulang Rt. 18 Rw. 04) **[Vide Bukti PK.14.2-12]**.

1.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 100/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Pengawasan tersebut dilakukan pada Pemungutan Suara

Ulang di TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, berdasarkan hasil pengawasan terdapat penurunan angka partisipasi pemilih yaitu pada Pemungutan dan penghitungan Suara Tanggal 27 November 2024 sebanyak 428 Pemilih, sementara partisipasi pemilih pada saat PSU sebanyak 374 Pemilih. Selain itu terdapat Kejadian Khusus pada pemungutan dan penghitungan Suara Ulang pada TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Formulir C. Kejadian Khusus adalah sebagai berikut: 1) Daftar Hadir tidak tertandatangani oleh Pemilih Nomor.169 (Erwin Prambono) dikarenakan daftar hadir sedang dibawa ke Pemilih yang sakit untuk mencoblos; 2) Kegiatan baru dimulai pukul 07.30 karena baru hadir 1 (satu) saksi dari Pasangan Calon; 3) Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada sehingga tidak di tempel; 4) Penulisan menggunakan Balpoin hitam karena yang disediakan dalam logistik PSU adalah balpoin dengan tinta berwarna hitam; 5) Daftar pemilih yang dikunjungi ada 7 (tujuh) pemilih, diantaranya: 1) Iwan damanhuri alasannya sedang sakit; 2) Fina baru selesai melahirkan; 3) Ana Sedang Sakit; 4) lin Sedang Sakit; 5) Enen Sedang sakit; 6) Sarbini sedang sakit; 7) Entin Kartini sedang sakit. Semuanya mencoblos atas kemauannya sendiri dan di fasilitasi KPPS, diawasi PKD dan disaksikan 2 Orang Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati **[Vide Bukti PK.14.2-13]**.

2.2 Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

2.2.1. Bahwa pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran di TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Sehingga KPPS 08 Desa Berekah Kecamatan

Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c, e, f dan h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- 2.2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/ XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa tindakan *a quo* Sdri. Nanih Maryani, Sdr. Kaka Sukmawan, Sdri. Ida Widaningsih, Sdri. Alvionita Rosalia, dan Sdri. Nessa Ikhtiromah diduga telah melanggar Pasal 15 huruf (c), (e), (f), dan (h) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: *(c) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; (e) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; (f) bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; (h) tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu*”. Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui Bawaslu Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-14]**.
- 2.2.3. Bawaslu Kabupaten Sukabumi kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng Nomor: 174 /PP.01.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024 Perihal Rekomendasi

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024, temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-11]**.

2.2.4. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran kode etik dan mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten Sukabumi dengan surat jawaban Nomor: 1448/PL.02.4-SD/3202/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal Tanggapan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 174/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Pabuaran Nomor: 001/PP.00.02/K.JB-16.37/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang pada pokoknya :

- KPU Kabupaten Sukabumi tidak dapat memproses rekomendasi pelanggaran kode etik tersebut, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024, sedangkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan Panwaslu Kecamatan Pabuaran diterima tanggal 20 Desember 2024
- Pasca dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, KPU Kabupaten Sukabumi mengambil langkah tegas pada KPPS TPS 08 Desa Berekah untuk tidak

direkomendasikan menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan periode yang akan datang, dan terbukti tidak dilibatkan pada saat penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut pada tanggal 6 Desember 2024.

- KPU Kabupaten Sukabumi menjadikan catatan kejadian pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran untuk tidak terulang lagi pada pemilu/pemilihan periode yang akan datang dan akan melakukan pembinaan kepada PPS Desa Ciwalat. **[Vide Bukti PK.14.2-15]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pabuaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/TM.00.02/K.JB-16.37/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat tindakan yang dilakukan oleh Amirullah selaku Anggota KPPS TPS 006 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran yang diduga melakukan penandatanganan daftar hadir Pemilih meskipun telah mendapatkan izin dari Pemilih **[Vide Bukti PK.14.2-70]** kemudian diregister menjadi Temuan dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat Dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-68]**

2.1. Panwaslu Kecamatan Pabuaran menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24 /XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa tindakan *a quo* diduga melakukan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan yang kemudian direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui Bawaslu Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-71]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi kemudian menyampaikan Surat Nomor: 165/PP.00.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sukabumi

terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01 /Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24/XII/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-69]** dan Panwaslu Kecamatan Pabuaran menyampaikan surat rekomendasi Nomor: 001/PP.00.02/K.JB.37/12/2024 pada Tanggal 03 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-72]**

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cisolok** Nomor: 80/LHP/PM.01.02/05/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 2 dan 3 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cisolok sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-16]**

Tabel 2

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Caringin	9	197	185	12	197
	11	219	214	5	219
Cicadas	8	326	324	2	326
	9	294	289	5	294
	10	286	278	8	286
Cisolok	8	368	351	17	368
Gunungkaramat	3	287	275	12	287
	4	219	216	3	219

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Gunung Tanjung	4	279	272	7	279
Karangpapak	2	382	366	16	382
	5	370	353	17	370
	8	345	330	15	345
	9	327	312	15	327
Pasir Baru	9	249	239	10	249
	10	233	225	8	233
Sirnaresmi	5	319	315	4	319
	6	245	243	2	245
	7	412	405	7	412
	8	322	317	5	322
Sukarame	5	329	320	9	329
Wanajaya	3	264	259	5	264
Wangunsari	1	285	278	7	285

Tabel 3

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Caringin	9	20	20	165	165	185	185
	11	43	43	171	171	214	214
Cicadas	8	16	16	308	308	324	324
	9	59	59	230	230	289	289
	10	44	44	234	234	278	278
Cisolok	8	108	108	243	243	351	351
Gunungkar amat	3	114	114	161	161	275	275
	4	36	36	180	180	216	216

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Gunung Tanjung	4	76	76	196	196	272	272
Karangpapak	2	93	93	273	273	366	366
	5	94	94	259	259	353	353
	8	108	108	222	222	330	330
	9	87	87	225	225	312	312
Pasir Baru	9	63	63	176	176	239	239
	10	46	46	179	179	225	225
Simaresmi	5	56	56	259	259	315	315
	6	51	51	192	192	243	243
	7	36	36	369	369	405	405
	8	45	45	272	272	317	317
Sukarame	5	73	73	247	247	320	320
Wanajaya	3	64	64	195	195	259	259
Wangunsa ri	1	80	80	198	198	278	278

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Palabuhanratu** Nomor 35/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 4 dan 5 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Palabuhanratu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-17]**

Tabel 4

Pengguna Hak Pilih dan Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Cibodas	8	245	239	6	245
	13	277	268	9	277
Cikadu	6	300	278	22	300
Citarik	6	326	317	9	326
Pasirsuren	16	163	157	6	163
Pelabuhanratu	24	287	282	5	287
	26	314	299	15	314
Tonjong	13	196	192	4	196

Tabel 5

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibodas	8	58	58	181	181	239	239
	13	72	72	196	196	268	268
Cikadu	6	65	65	213	213	278	278
Citarik	6	96	96	221	221	317	317
Pasirsuren	16	15	15	142	142	157	157
Pelabuhanratu	24	59	59	223	223	282	282
	26	50	50	249	249	299	299
Tonjong	13	28	28	164	164	192	192

5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Simpenan** Nomor 30/LHP/PM.01.02/24/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ada kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 6 dan 7 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Simpenan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-18]**

Tabel 6

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Cidadap	12	286	270	16	286
	15	269	261	8	269
	22	228	227	1	228
	24	226	218	8	226
	26	178	172	6	178
Kertajaya	14	267	259	8	267
Loji	1	323	317	6	323
	4	332	317	15	332
	9	344	338	6	344
	10	236	227	9	236
	11	272	261	11	272
	12	264	251	13	264
Mekarasih	3	221	207	14	221

Tabel 7

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
Cidadap	12	74	74	196	196	270	270
	15	53	53	208	208	261	261
	22	48	48	179	179	227	227
	24	22	22	196	196	218	218
	26	26	26	146	146	172	172
Kertajaya	14	57	57	202	202	259	259
Loji	1	93	93	224	224	317	317
	4	81	81	236	236	317	317
	9	54	54	284	284	338	338
	10	52	52	175	175	227	227
	11	32	32	229	229	261	261
	12	16	16	235	235	251	251
Mekarasih	3	29	29	178	178	178	207

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng** Nomor: 219/LHP/PM.01.02/W.2-14/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 8 dan 9 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Bojonggenteng sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-19]**

Tabel 8

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cibodas	13	253	244	9	253
Cipanengah	1	387	348	39	387
	2	452	437	15	452
	5	296	289	7	296

Tabel 9

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibodas	13	44	44	200	200	244	244
Cipanengah	1	44	44	304	304	348	348
	2	26	26	411	411	437	437
	5	73	73	216	216	289	289

7. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cicurug** Nomor: 044/LHP/PM.01.02-06/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 10 dan 11 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cicurug sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-20]**

Tabel 10

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLA H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Benda	1	314	292	22	314
	2	341	324	17	341
	3	378	364	14	378
	4	348	327	21	348
	5	364	338	26	364
	6	326	306	20	326
	8	279	256	23	279
	10	283	271	12	283
	11	273	260	13	273
	12	304	289	15	304
	16	346	332	14	346
	17	376	353	23	376
	18	331	316	15	331
	19	314	299	15	314
	24	250	241	9	250
	25	314	307	7	314
Caringin	4	272	257	15	272
	5	283	264	19	283
	6	283	274	9	283
	8	321	307	14	321
	9	327	321	6	327
	10	315	307	8	315
Cisaat	2	343	330	13	343
	6	242	229	13	242
	14	244	240	4	244
	17	363	338	25	363
Kutajaya	3	361	345	16	361
	4	361	337	24	361
	16	267	248	19	267
	17	365	347	18	365
	19	295	225	70	295
	25	254	237	17	254
	27	308	293	15	308

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLA H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	28	343	323	20	343
Mekarsari	6	345	328	17	345
	7	284	266	18	284
Pasawah an	2	272	267	5	272
	4	331	316	15	331
	7	271	260	11	271
	9	422	413	9	422
	11	330	301	29	330
	12	302	284	18	302
	15	237	215	22	237
Purwasar i	1	312	300	12	312
	9	299	283	16	299
	10	297	283	14	297
Tenjolaya	4	289	278	11	289
	5	289	275	14	289
	11	288	266	22	288

Tabel 11

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Benda	1	34	34	258	258	292	292
	2	68	68	256	256	324	324
	3	60	60	304	304	364	364
	4	98	98	229	229	327	327
	5	99	99	239	239	338	338
	6	78	78	228	228	306	306
	8	68	68	188	188	256	256
	10	74	74	197	197	271	271

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	11	75	75	185	185	260	260
	12	82	82	207	207	289	289
	16	77	77	255	255	332	332
	17	101	101	252	252	353	353
	18	67	67	249	249	316	316
	19	73	73	226	226	299	299
	24	39	39	202	202	241	241
	25	33	33	274	274	307	307
Caringin	4	53	53	204	204	257	257
	5	72	72	192	192	264	264
	6	74	74	200	200	274	274
	8	53	53	254	254	307	307
	9	50	50	271	271	321	321
	10	92	92	215	215	307	307
Cisaat	2	97	97	233	233	330	330
	6	37	37	192	192	229	229
	14	38	38	202	202	240	240
	17	107	107	231	231	338	338
Kutajaya	3	71	71	274	274	345	345
	4	109	109	228	228	337	337
	16	64	64	184	184	248	248
	17	48	48	299	299	347	347
	19	56	56	169	169	225	225
	25	55	55	182	182	237	237
	27	68	68	225	225	293	293
	28	62	62	261	261	323	323
Mekarsari	6	100	100	228	228	328	328
	7	72	72	194	194	266	266
Pasawahan	2	46	46	221	221	267	267
	4	39	39	277	277	316	316
	7	58	58	202	202	260	260
	9	86	86	327	327	413	413
	11	84	84	217	217	301	301
	12	77	77	207	207	284	284

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	15	47	47	168	168	215	215
Purwasari	1	86	86	214	214	300	300
	9	67	67	216	216	283	283
	10	79	79	204	204	283	283
Tenjolaya	4	42	42	236	236	278	278
	5	82	82	193	193	275	275
	11	58	58	208	208	266	266

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cidahu** Nomor: 83/LHP/PM.01.02/17/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 12 dan 13 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cidahu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-21]**

Tabel 12

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Cidahu	2	227	219	8	227
	4	314	302	12	314
	5	293	282	11	293

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	6	308	293	15	308
	7	276	263	13	276
	8	256	235	21	256
	10	254	238	16	254
	11	306	289	17	306
	12	247	239	8	247
	14	303	293	10	303
	15	277	261	16	277
	16	213	202	11	213
	17	235	228	7	235
Girijaya	2	298	283	15	298
	4	166	161	5	166
	5	239	232	7	239
	6	284	269	15	284
	7	264	251	13	264
	8	350	338	12	350
	9	212	203	9	212
	12	315	292	23	315
	15	318	306	12	318
Jayabakti	1	347	338	9	347
	2	337	323	14	337
	4	301	291	10	301
	5	355	345	10	355
	7	306	296	10	306
	8	353	338	15	353
	9	341	319	22	341
	11	300	288	12	300
	14	379	362	17	379
	16	325	292	33	325
	17	314	296	18	314
Pasirdoton	1	255	241	14	255
	2	288	278	10	288
	3	239	224	15	239
	4	266	246	20	266
	5	238	226	12	238
	6	297	276	21	297

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	10	222	194	28	222
Pondokaso Tengah	3	322	313	9	322
	4	226	214	12	226
	5	296	282	14	296
	6	331	320	11	331
	7	212	204	8	212
	9	312	304	8	312
	12	298	288	10	298
Pondok Kaso Tonggoh	1	313	299	14	313
	3	269	254	15	269
	4	317	297	20	317
	5	382	352	30	382
	6	350	302	48	350
	7	210	190	20	210
	11	328	311	17	328
Tangkil	1	519	503	16	519
	3	180	163	17	180
	6	351	347	4	351
	7	365	350	15	365
	8	353	338	15	353
	9	322	305	17	322
	11	316	302	14	316
	12	301	292	9	301
	14	335	311	24	335

Tabel 13
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TP S	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salina n	Hasil Kec	Hasil Salina n	Hasil Kec	Hasil Salina n	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cidahu	2	54	54	165	165	219	219
	4	50	50	252	252	302	302
	5	62	62	220	220	282	282
	6	71	71	222	222	293	293
	7	25	25	238	238	263	263
	8	59	59	176	176	235	235
	10	40	40	198	198	238	238
	11	73	73	216	216	289	289
	12	57	57	182	182	239	239
	14	60	60	233	233	293	293
	15	49	49	212	212	261	261
	16	37	37	165	165	202	202
	17	41	41	187	187	228	228
Girijaya	2	57	57	226	226	283	283
	4	23	23	138	138	161	161
	5	39	39	193	193	232	232
	6	50	50	219	219	269	269
	7	42	42	209	209	251	251
	8	90	90	248	248	338	338
	9	39	39	164	164	203	203
	12	50	50	242	242	292	292
	15	83	83	223	223	306	306
Jayabakti	1	75	75	263	263	338	338
	2	48	48	275	275	323	323
	4	67	67	224	224	291	291
	5	105	105	240	240	345	345
	7	80	80	216	216	296	296
	8	45	45	293	293	338	338
	9	74	74	245	245	319	319
	11	68	68	220	220	288	288
	14	72	72	290	290	362	362
	16	69	69	223	223	292	292
	17	53	53	243	243	296	296

DESA	TP S	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salina n	Hasil Kec	Hasil Salina n	Hasil Kec	Hasil Salina n	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Pasirdoto n	1	57	57	184	184	241	241
	2	71	71	207	207	278	278
	3	52	52	172	172	224	224
	4	38	38	208	208	246	246
	5	55	55	171	171	226	226
	6	47	47	229	229	276	276
	10	16	16	178	178	194	194
Pondoka so Tengah	3	66	66	247	247	313	313
	4	37	37	177	177	214	214
	5	55	55	227	227	282	282
	6	85	85	235	235	320	320
	7	43	43	161	161	204	204
	9	88	88	216	216	304	304
	12	77	77	211	211	288	288
Pondok Kaso Tonggoh	1	62	62	237	237	299	299
	3	35	35	219	219	254	254
	4	72	72	225	225	297	297
	5	77	77	275	275	352	352
	6	89	89	213	213	302	302
	7	37	37	153	153	190	190
	11	95	95	216	216	311	311
Tangkil	1	122	122	381	381	503	503
	3	25	25	138	138	163	163
	6	41	41	306	306	347	347
	7	98	98	252	252	350	350
	8	72	72	266	266	338	338
	9	88	88	217	217	305	305
	11	42	42	260	260	302	302
	12	86	86	206	206	292	292
	14	55	55	256	256	311	311

9. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kabandungan** Nomor: 584/LHP/PM.01.02/19/12/2024 Tanggal 01

Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 14 dan 15 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Kabandungan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-22]**

Tabel 14

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TP S	JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cianaga	1	204	191	13	204
	2	267	247	20	267
	3	209	189	20	209
Cipetey	11	230	219	11	230
Tugubandung	6	257	247	10	257

Tabel 15

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cianaga	1	32	32	159	159	191	191
	2	34	34	213	213	247	247
	3	18	18	171	171	189	189
Cipetey	11	51	51	168	168	219	219
Tugubandung	6	42	42	205	205	247	247

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kalapanunggal** Nomor: 059/LHP/PM.01.02/18/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 16 dan 17 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Kalapanunggal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-23]**

Tabel 16

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Palasari Girang	2	273	264	9	273
	3	254	244	10	254
	6	334	322	12	334
	10	370	360	10	370
Pulosari	9	272	264	8	272
	12	339	335	4	339

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Walangsari	13	263	253	10	263
	14	355	347	8	355
	2	290	278	12	290
	7	275	268	7	275
Walangsari	8	231	226	5	231
	10	200	192	8	200

Tabel 17

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salina n	Hasil Kec	Hasil Salina n	Hasil Kec	Hasil Salina n	Hasil I Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Palasari Girang	2	52	52	212	212	264	264
	3	50	50	194	194	244	244
	6	102	102	220	220	322	322
	10	80	80	280	280	360	360
Pulosari	9	60	60	204	204	264	264
	12	55	55	280	280	335	335
	13	47	47	206	206	253	253
	14	90	90	257	257	347	347
Walangsari	2	78	78	200	200	278	278
	7	56	56	212	212	268	268
	8	58	58	168	168	226	226
	10	27	27	165	165	192	192

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Parakansalak** Nomor: 390/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November

2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 18 dan 19 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Parakansalak sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-24]**

Tabel 18

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Bojongasih	3	331	317	14	331
	4	352	335	17	352
	6	403	384	19	403
	7	380	372	8	380
Bojonglongok	1	266	247	19	266
Lebaksari	7	306	296	10	306
Parakansalak	8	296	287	9	296
	10	256	242	14	256
	11	185	177	8	185
Sukakersa	1	392	372	20	392
	2	340	332	8	340
	3	309	293	16	309
	4	395	368	27	395
	5	266	262	4	266
	6	317	309	8	317
	7	315	300	15	315
	8	291	282	9	291
	9	328	327	1	328
	11	349	340	9	349
	12	342	329	13	342

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Sukatani	1	316	306	10	316
	2	389	370	19	389
	3	347	340	7	347
	4	419	403	16	419
	5	276	268	8	276
	6	312	299	13	312
	7	296	279	17	296
	8	283	270	13	283
	9	341	336	5	341
	10	358	345	13	358

Tabel 19

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Bojongasih	3	84	84	233	233	317	317
	4	83	83	252	252	335	335
	6	107	107	277	277	384	384
	7	73	73	299	299	372	372
Bojonglongok	1	65	65	182	182	247	247
Lebaksari	7	60	60	236	236	296	296
Parakansalak	8	59	59	228	228	287	287
	10	64	64	178	178	242	242
	11	28	28	149	149	177	177
Sukakersa	1	70	70	303	302	372	372
	2	90	90	242	242	332	332
	3	53	53	240	240	293	293
	4	84	84	284	284	368	368

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	5	66	66	196	196	262	262
	6	50	50	259	259	309	309
	7	62	62	238	238	300	300
	8	71	71	211	211	282	282
	9	70	70	257	257	327	327
	11	71	71	269	269	340	340
	12	107	107	222	222	329	329
Sukatani	1	17	17	289	289	306	306
	2	80	80	290	290	370	370
	3	82	82	258	258	340	340
	4	93	93	310	310	403	403
	5	31	31	237	237	268	268
	6	78	78	221	221	299	299
	7	38	38	241	241	279	279
	8	68	68	202	202	270	270
	9	73	73	263	263	336	336
	10	80	80	265	265	345	345

12. Berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Parungkuda** Nomor: 211/LHP/PM.01.02/13/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 20 dan 21 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Parungkuda sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-25]**

Tabel 20

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Langensari	1	348	337	11	348
Pondokkaso Landeuh	2	289	280	9	289
	11	271	252	19	271

Tabel 21

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TP S	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salina n	Hasil Kec	Hasil Salina n	Hasi l Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Langensari	1	97	97	240	240	337	337
Pondokkas o Landeuh	2	82	82	198	198	280	280
	11	71	71	181	181	252	252

13. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Caringin** Nomor: 044/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan

sebagaimana tabel 22 dan 23 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Caringin sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-26]**

Tabel 22

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Caringin Wetan	4	270	251	19	270
	8	201	190	11	201
Cijengkol	1	309	298	11	309
	2	223	195	28	223
	10	326	304	22	326
Pasir Datar Indah	1	134	130	4	134
Seuseupan	2	388	373	15	388
	3	287	275	12	287
	4	234	222	12	234
	9	272	265	7	272
Sukamulya	10	265	251	14	265
Talaga	4	295	275	20	295
	10	302	298	4	302

Tabel 23

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Caringin Wetan	4	70	70	181	181	251	251
	8	37	37	153	153	190	190

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cijengkol	1	61	61	237	237	298	298
	2	23	23	172	172	195	195
	10	52	52	252	252	304	304
Pasir Datar Indah	1	13	13	117	117	130	130
Seuseupan	2	43	43	330	330	373	373
	3	73	73	202	202	275	275
	4	47	47	175	175	222	222
	9	40	40	225	225	265	265
Sukamulya	10	82	82	169	169	251	251
Talaga	4	70	70	205	205	275	275
	10	89	89	209	209	298	298

14. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cibadak** Nomor: 059/LHP/PM.01.02/11/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 24 dan 25 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cibadak sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-27]**

15.

Tabel 24

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Sukasirna	01	281	270	11	281
	14	290	276	14	290
Cibadak	13	346	335	11	346
Warnajati	04	352	335	17	352
Karangtengah	02	307	287	20	307
	03	308	295	13	308
	11	352	334	18	352
	16	281	275	6	281
Tenjojaya	08	229	219	10	229
	09	277	269	8	277
Ciheulang Tonggoh	12	295	286	9	295
	13	302	284	18	302
	14	292	276	16	292

Tabel 25

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Sukasirna	01	56	56	214	214	270	270
	14	78	78	198	198	276	276
Cibadak	13	104	104	231	231	335	335
Warnajati	04	112	112	223	223	335	335
Karangtengah	02	44	44	243	243	287	287
	03	82	82	213	213	295	295
	11	116	116	218	218	334	334
	16	32	32	243	243	275	275
Tenjojaya	08	54	54	165	165	219	219
	09	78	78	191	191	269	269
Ciheulang Tonggoh	12	57	57	229	229	286	286
	13	35	35	249	249	284	284

	14	71	71	205	205	276	276
--	----	----	----	-----	-----	-----	-----

16. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cikembar** Nomor: 1289/LHP/PM.01.02/10/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 26 dan 27 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cikembar sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-28]**

Tabel 26

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Bojong kembar	1	354	343	11	354
	15	339	320	19	339
Bojong raharja	12	347	317	30	347
Cibatu	4	322	311	11	322
Cikem bar	12	288	275	13	288
Ciman ggung	17	368	352	16	368
Kertar aharja	7	268	265	3	268
Paraka nlima	1	311	301	10	311
	3	313	298	15	313
	6	304	287	17	304
	7	325	315	10	325
	9	211	199	12	211

	12	291	275	16	291
Sukamulya	17	324	319	5	324

Tabel 27
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Bojongkembar	1	80	80	263	263	343	343
	15	93	93	227	227	320	320
Bojongraharja	12	58	58	259	259	317	317
Cibatu	4	77	77	234	234	311	311
Cikembar	12	80	80	195	195	275	275
Cimanggu	17	113	113	239	239	352	352
Kertaraharja	7	61	61	204	204	265	265
Parakanlima	1	92	92	209	209	301	301
	3	78	78	220	220	298	298
	6	63	63	224	224	287	287
	7	37	37	278	278	315	315
	9	43	43	156	156	199	199
	12	74	74	201	201	275	275
Sukamulya	17	78	78	241	241	319	319

17. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Nagrak** Nomor: 1124/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan

sebagaimana tabel 28 dan 29 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Nagrak sebagai berikut:

[Vide Bukti PK.14.2-29]

Tabel 28

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Babakan Panjang	6	314	293	21	314
	7	289	285	4	289
Cihanjavar	5	434	414	20	434
	6	297	284	13	297
Darmareja	12	289	272	17	289
Girijaya	3	298	284	14	298
	5	323	303	20	323
	6	280	268	12	280
	8	386	371	15	386
	9	310	284	26	310
	10	241	230	11	241
	11	254	248	6	254
	12	299	284	15	299
	14	264	249	15	264
	15	302	277	25	302
	17	366	354	12	366
Kalaparea	2	357	327	30	357
	3	251	219	32	251
	4	228	206	22	228
	5	320	302	18	320
	6	340	313	27	340
	8	283	270	13	283
	10	299	287	12	299
	12	329	312	17	329
Nagrak Selatan	3	310	300	10	310
	9	348	334	14	348
	11	337	325	12	337

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Nagrak Utara	12	316	309	7	316
	22	341	324	17	341
	23	335	330	5	335
	24	196	192	4	196
	27	330	323	7	330
Pawenang	1	334	321	13	334
	2	305	295	10	305
	3	369	353	16	369
	4	329	320	9	329
	5	359	325	34	359
	6	425	410	15	425
	7	348	336	12	348
	8	426	405	21	426
	9	456	432	24	456

Tabel 29

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Babakan Panjang	6	80	80	213	213	293	293
	7	24	24	261	261	285	285
Cihanjawar	5	150	150	264	264	414	414
	6	52	52	232	232	284	284
Darmareja	12	78	78	194	194	272	272
Girijaya	3	87	87	197	197	284	284
	5	73	73	230	230	303	303
	6	57	57	211	211	268	268
	8	24	24	347	347	371	371

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	9	85	85	199	199	284	284
	10	57	57	173	173	230	230
	11	42	42	206	206	248	248
	12	83	83	201	201	284	284
	14	67	67	182	182	249	249
	15	59	59	218	218	277	277
	17	34	34	320	320	354	354
Kalaparea	2	42	42	285	285	327	327
	3	49	49	170	170	219	219
	4	37	37	169	169	206	206
	5	87	87	215	215	302	302
	6	129	129	184	184	313	313
	8	70	70	200	200	270	270
	10	67	67	220	220	287	287
	12	60	60	252	252	312	312
Nagrak Selatan	3	79	79	221	221	300	300
	9	110	110	224	224	334	334
	11	95	95	230	230	325	325
Nagrak Utara	12	82	82	227	227	309	309
	22	69	69	255	255	324	324
	23	55	55	275	275	330	330
	24	26	26	166	166	192	192
	27	30	30	293	293	323	323
Pawenang	1	93	93	228	228	321	321
	2	47	47	248	248	295	295
	3	57	57	296	296	353	353
	4	40	40	280	280	320	320
	5	65	65	260	260	325	325
	6	48	48	362	362	410	410
	7	72	72	264	264	336	336
	8	110	110	295	295	405	405
	9	93	93	339	339	432	432

18. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cisaat** Nomor: 1086/LHP/PM.01.02/16.29/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 tidak mau menandatangani Model D Hasil Kecamatan. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 30 dan 31 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cisaat sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-30]**

Tabel 30

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Babakan	6	407	390	17	407
Cibatu	11	291	275	16	291
Cibolang Kaler	1	382	367	15	382
Cisaat	1	335	327	8	335
	4	342	317	25	342
Gunungjaya	4	278	261	17	278
Kutasirna	1	313	295	18	313
Padaasih	1	322	303	19	322
	2	352	342	10	352
	6	351	336	15	351
	7	374	356	18	374
	15	311	299	12	311
Selajambe	9	344	318	26	344
Sukamanah	16	350	335	15	350
Sukaesmi	10	360	338	22	360
Sukasari	9	412	377	35	412

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	13	323	275	48	323

Tabel 31

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Babakan	6	126	126	264	264	390	390
Cibatu	11	130	130	145	145	275	275
Cibolang Kaler	1	119	119	248	248	367	367
Cisaat	1	92	92	235	235	327	327
	4	89	89	228	228	317	317
Gunungjaya	4	73	73	188	188	261	261
Kutasirna	1	84	84	211	211	295	295
Padaasih	1	66	66	237	237	303	303
	2	70	70	272	272	342	342
	6	112	112	224	224	336	336
	7	115	115	241	241	356	356
	15	74	74	225	225	299	299
Selajambe	9	58	58	260	260	318	318
Sukamanah	16	92	92	243	243	335	335
Sukaresmi	10	110	110	228	228	338	338
Sukasari	9	125	125	252	252	377	377
	13	74	174	201	201	275	275

19. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Gunungguruh** Nomor: 89/LHP/PM.01.02/27/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus

terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 32 dan 33 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Gunungguruh sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-31]**

Tabel 32

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cibentang	6	278	245	33	278
Cibolang	1	272	257	15	272
Cikujang	15	357	342	15	357
Gunungguruh	10	295	275	20	295
	11	314	295	19	314
	15	256	237	19	256
Mangkalaya	4	294	277	17	294
	10	280	263	17	280
	11	226	217	9	226

Tabel 33

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibentang	6	67	67	178	178	245	245
Cibolang	1	17	17	240	240	257	257

Cikujang	15	91	91	251	251	342	342
Gunungguruh	10	89	89	186	186	275	275
	11	96	96	199	199	295	295
	15	75	75	162	162	237	237
Mangkalaya	4	82	82	195	195	277	277
	10	38	38	225	225	263	263
	11	30	30	187	187	217	217

20. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kebonpedes** Nomor: 407/LHP/PM.01.02/34/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 34 dan 35 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Kebonpedes sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-32]**

Tabel 34

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Cikaret	1	348	328	20	348
	3	311	284	27	311
Jambenenggang	7	288	263	25	288
	9	257	250	7	257

Tabel 35

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cikaret	1	90	90	238	238	328	328
	3	83	83	201	201	284	284
Jambenenggang	7	59	59	204	204	263	263
	9	32	32	218	218	250	250

21. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Sukabumi** Nomor: 68/LHP/PM.01.02/16.32/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 36 dan 37 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Sukabumi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-33]**

Tabel 36

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Parungseah	1	347	338	9	347
	2	331	316	15	331
	16	328	296	32	328
Perbawati	2	386	366	20	386
	4	342	325	17	342
	5	303	294	9	303

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	11	400	381	19	400
Sudajaya Girang	7	339	320	19	339
Sukajaya	1	300	287	13	300
	6	299	276	23	299
Warnasari	9	336	321	15	336
	10	289	267	22	289

Tabel 37

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Parungseah	1	71	71	267	267	338	338
	2	39	39	277	277	316	316
	16	82	82	214	214	296	296
Perbawati	2	114	114	252	252	366	366
	4	47	47	278	278	325	325
	5	59	59	235	235	294	294
	11	280	280	101	101	381	381
Sudajaya Girang	7	107	107	213	213	320	320
Sukajaya	1	87	87	200	200	287	287
	6	76	76	200	200	276	276
Warnasari	9	110	110	211	211	321	321
	10	82	82	185	185	267	267

22. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Sukaraja**

Nomor: 078/LHP/PM.01.02/33/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang

pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 tidak mau menandatangani model D Hasil Kecamatan, dikarenakan yang bersangkutan mendapatkan intruksi oleh tim pemenangan Kabupaten. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 38 dan 39 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Sukaraja sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-34]**

Tabel 38

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Langensari	11	212	203	9	212
	12	198	185	13	198
	15	342	271	71	342
Limbangan	3	325	299	26	325
	17	251	238	13	251
Margaluyu	3	382	309	73	382
Pasirhalang	12	220	212	8	220
	21	303	275	28	303
Selaawi	13	376	334	42	376
Selawangi	11	396	376	20	396
Sukaraja	28	370	354	16	370

Tabel 39

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Langensari	11	39	39	164	164	203	203
	12	19	19	166	166	185	185
	15	71	71	200	200	271	271
Limbangan	3	86	86	213	213	299	299
	17	101	101	137	137	238	238
Margaluyu	3	64	64	245	245	309	309
Pasirhalang	12	38	38	174	174	212	212
	21	74	74	201	201	275	275
Selaawi	13	105	105	229	229	334	334
Selawangi	11	108	108	268	268	376	376
Sukaraja	28	105	105	249	249	354	354

23. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Pabuaran** Nomor: 073/LHP/PM.01.02/16.37/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 tidak mau menandatangani model D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 40 dan 41 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Pabuaran sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-35]**

Tabel 40

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cibadak	12	335	325	10	335
Ciwalat	1	299	294	5	299
	4	316	308	8	316
	6	480	476	4	480
	7	415	396	19	415
Pabuaran	2	282	276	6	282
Sirnasari	7	271	257	14	271
Sukajaya	1	237	221	16	237
	2	309	303	6	309
	3	353	338	15	353
	4	229	225	4	229
	5	217	203	14	217
	6	193	186	7	193
	7	229	222	7	229

Tabel 41

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibadak	12	66	66	259	259	325	325
Ciwalat	1	70	70	224	224	294	294
	4	60	60	248	248	308	308
	6	47	47	429	429	476	476
	7	41	41	355	355	396	396
Pabuaran	2	72	72	204	204	276	276
Sirnasari	7	68	68	189	189	257	257
Sukajaya	1	50	50	171	171	221	221
	2	32	32	271	271	303	303

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	3	55	55	283	283	338	338
	4	47	47	178	178	225	225
	5	11	11	192	192	203	203
	6	30	30	156	156	186	186
	7	43	43	179	179	222	222

24. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Ciemas** Nomor: 14/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 42 dan 43 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Ciemas sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-36]**

Tabel 42

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Cibenda	1	345	341	4	345
	2	274	270	4	274
	4	292	285	7	292
	6	283	265	18	283
	7	306	298	8	306

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	8	242	237	5	242
	9	292	288	4	292
Ciemas	1	145	142	3	145
	2	214	207	7	214
	4	283	275	8	283
	11	185	175	10	185
Ciwaru	1	266	259	7	266
	2	254	248	6	254
	3	282	277	5	282
	4	240	230	10	240
	5	273	267	6	273
	6	273	259	14	273
	7	343	325	18	343
	8	280	268	12	280
	9	263	248	15	263
	10	261	248	13	261
	11	256	248	8	256
	12	263	256	7	263
	15	248	239	9	248
Mandrajaya	1	316	314	2	316
	2	252	249	3	252
	3	323	319	4	323
	5	291	283	8	291
	6	293	291	2	293
	7	269	258	11	269
	8	221	219	2	221
Mekarjaya	1	252	244	8	252
	2	206	200	6	206
	3	269	254	15	269
	4	145	137	8	145
	5	188	184	4	188
	7	247	230	17	247
	9	256	252	4	256
	10	217	208	9	217
	12	290	277	13	290

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Tamanjaya	1	303	298	5	303
	10	262	255	7	262
	11	239	228	11	239

Tabel 43

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibenda	1	45	45	296	296	341	341
	2	22	22	248	248	270	270
	4	62	62	223	223	285	285
	6	48	48	217	217	265	265
	7	66	66	232	232	298	298
	8	14	14	223	223	237	237
	9	26	26	262	262	288	288
Ciemas	1	13	13	129	129	142	142
	2	30	30	177	177	207	207
	4	69	69	206	206	275	275
	11	30	30	145	145	175	175
Ciwaru	1	44	44	215	215	259	259
	2	31	31	217	217	248	248
	3	17	17	260	260	277	277
	4	30	30	200	200	230	230
	5	62	62	205	205	267	267
	6	45	45	214	214	259	259
	7	51	51	274	274	325	325
	8	48	48	220	220	268	268
	9	25	25	223	223	248	248
	10	44	44	204	204	248	248

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	11	65	65	183	183	248	248
	12	33	33	223	223	256	256
	15	30	30	209	209	239	239
Mandrajaya	1	65	65	249	249	314	314
	2	26	26	223	223	249	249
	3	87	87	232	232	319	319
	5	72	72	211	211	283	283
	6	17	17	274	274	291	291
	7	19	19	239	239	258	258
	8	19	19	200	200	219	219
Mekarjaya	1	74	74	170	170	244	244
	2	58	58	142	142	200	200
	3	88	88	166	166	254	254
	4	48	48	89	89	137	137
	5	73	73	111	111	184	184
	7	141	141	89	89	230	230
	9	68	68	184	184	252	252
	10	71	71	137	137	208	208
	12	45	45	232	232	277	277
Tamanjaya	1	77	77	221	221	298	298
	10	27	27	228	228	255	255
	11	53	53	175	175	228	228

25. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Ciracap** Nomor: 027/LHP/PM.01.02/26/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 tidak mau menandatangani model D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil

Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 44 dan 45 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Ciracap sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-37]**

Tabel 44

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Cikangkung	7	283	280	3	283
Gunungbatu	1	269	261	8	269
Mekarsari	8	232	226	6	232
Pasirpanjang	3	222	214	8	222
	8	337	332	5	337
Purwasedar	7	246	241	5	246

Tabel 45

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cikangkung	7	79	79	201	201	280	280
Gunungbatu	1	52	52	209	209	261	261
Mekarsari	8	26	26	200	200	226	226
Pasirpanjang	3	49	49	165	165	214	214
	8	105	105	227	227	332	332
Purwasedar	7	63	63	178	178	241	241

26. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Jampang Kulon** Nomor: 021/LHP/PM.01.02/21/11/2024 Tanggal 30 November 2024

yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 46 dan 47 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Jampang Kulon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-38]**

Tabel 46

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Bojong Sari	5	275	272	3	275
	8	280	277	3	280
Bojonggenteng	2	317	303	14	317
Cikarang	2	213	208	5	213
	3	285	270	15	285
Cikaranggeusan	1	304	292	12	304
	2	268	259	9	268
Ciparay	1	268	255	13	268
	3	265	260	5	265
	6	297	292	5	297
	8	283	281	2	283
Karanganyar	4	208	205	3	208
Mekarjaya	5	308	293	15	308
	6	271	265	6	271
Nagraksari	7	308	302	6	308
	11	268	261	7	268
Padajaya	5	217	211	6	217
Tanjung	6	255	248	7	255

Tabel 47

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARAH SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Bojongsari	5	56	56	216	216	272	272
	8	69	69	208	208	277	277
Bojonggenteng	2	63	63	240	240	303	303
Cikarang	2	45	45	163	163	208	208
	3	71	71	199	199	270	270
Cikaranggeusan	1	59	59	233	233	292	292
	2	71	71	188	188	259	259
Ciparay	1	56	56	199	199	255	255
	3	58	58	202	202	260	260
	6	59	59	233	233	292	292
	8	85	85	196	196	281	281
Karanganyar	4	42	42	163	163	205	205
Mekarjaya	5	28	28	265	265	293	293
	6	41	41	224	224	265	265
Nagraksari	7	81	81	221	221	302	302
	11	38	38	223	223	261	261
Padajaya	5	47	47	164	164	211	211
Tanjung	6	37	37	211	211	248	248

27. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kalibunder** Nomor: 018/LHP/PM.01.02/23/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 48 dan 49 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Kalibunder sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-39]**

Tabel 48

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Balekambang	8	219	209	10	219
Sekarsari	4	234	216	18	234
	5	198	195	3	198
	7	196	188	8	196
Sukaluyu	5	228	222	6	228
	7	225	222	3	225
	8	301	293	8	301

Tabel 49

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Balekambang	8	20	20	189	189	209	209
Sekarsari	4	47	47	169	169	216	216
	5	11	11	184	184	195	195
	7	25	25	163	163	188	188
Sukaluyu	5	49	49	173	173	222	222
	7	47	47	175	175	222	222
	8	48	48	245	245	293	293

28. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Surade** Nomor: 2348/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 50 dan 51 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Surade sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-40]**

Tabel 50

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cipeundeuy	2	209	202	7	209
	5	279	272	7	279
	7	235	232	3	235
Citanglar	2	280	269	11	280
	3	298	287	11	298
	4	250	242	8	250
	5	260	254	6	260
	6	252	245	7	252
	11	240	233	7	240
	13	178	178	0	178
Jagamukti	9	371	360	11	371
Kadaleman	2	292	275	17	292
	4	298	292	6	298
	5	240	204	36	240
	6	239	231	8	239
	7	137	131	6	137
	8	333	329	4	333
Pasir Ipis	5	353	347	6	353
	12	293	285	8	293
	15	255	249	6	255
	17	231	231	0	231
Surade	8	308	300	8	308
Wanasari	2	259	253	6	259
	5	284	277	7	284
	7	195	188	7	195

Tabel 51
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cipeundeuy	2	43	43	159	159	202	202
	5	43	43	229	229	272	272
	7	35	35	197	197	232	232
Citanglar	2	33	33	236	236	269	269
	3	65	65	222	222	287	287
	4	41	41	201	201	242	242
	5	72	72	182	182	254	254
	6	62	62	183	183	245	245
	11	27	27	206	206	233	233
	13	20	20	158	158	178	178
Jagamukti	9	118	118	242	242	360	360
Kadaleman	2	131	131	144	144	275	275
	4	91	91	201	201	292	292
	5	68	68	136	136	204	204
	6	100	100	131	131	231	231
	7	34	34	97	97	131	131
	8	105	105	224	224	329	329
Pasir Ipis	5	82	82	265	265	347	347
	12	78	78	207	207	285	285
	15	32	32	217	217	249	249
	17	53	53	178	178	231	231
Surade	8	91	91	209	209	300	300
Wanasari	2	57	57	196	196	253	253
	5	37	37	240	240	277	277
	7	24	24	164	164	188	188

29. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Bantargadung** Nomor: 417/LHP/PM.01.02/04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni “TPS 9 Desa Limusnunggal perbedaan penulisan angka perolehan suara calon

nomor urut 2 (H. Asep Japar – H. Andreas) pada Formulir C. Hasil – KWK-BUPATI berbeda dengan Model C. Hasil Salinan-KWK BUPATI. Pada Formulir Model C. Hasil-KWK-BUPATI tertulis 160 sedangkan pada Formulir Model C. Hasil Salinan–KWK-BUPATI ditulis oleh KPPS 106”. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 52 dan 53 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Bantargadung sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-41]**

Tabel 52

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Bantargadung	1	320	313	7	320
	2	280	277	3	280
	4	194	191	3	194
	5	168	162	6	168
Limusnunggal	6	234	224	10	234
	8	242	235	7	242
	9	201	197	4	201
	10	171	169	2	171

Tabel 53

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Bantargadung	1	20	20	293	293	313	313
	2	9	9	268	268	277	277
	4	8	8	183	183	191	191
	5	19	19	143	143	162	162
Limusnunggal	6	42	42	182	182	224	224
	8	48	48	187	187	235	235
	9	37	37	106	160	143	197
	10	18	18	151	151	169	169

30. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cikakak** Nomor: 025/LHP/PM.01.02/03/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 tidak mau menandatangani model D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 54 dan 55 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cikakak sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-42]**

Tabel 54

Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Cikakak	2	270	262	8	270
Cimaja	10	194	187	7	194
Margalaksana	1	241	239	2	241
	2	266	265	1	266

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	6	206	192	14	206

Tabel 55

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cikakak	2	79	79	183	183	262	262
Cimaja	10	52	52	135	135	187	187
Margalaksana	1	52	52	187	187	239	239
	2	35	35	230	230	265	265
	6	72	72	120	120	192	192

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan masif (TSM) dan menyampaikan Laporan TSM kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Angka 2 Halaman 6, Angka 6 Halaman 28 s.d 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerima Surat Tanggal 3 Desember 2024 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM [**Vide Bukti PK.14.2-43**] Bawaslu Kabupaten Sukabumi meneruskan laporan pelanggaran *a quo* berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-5 Nomor: 164/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa

Barat **[Vide Bukti PK.14.2-44]** Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.14.2- 45]**

2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 02/PL/PB/13.24/XI/2024 tanggal 13 November 2024 **[Vide Bukti PK.14.2-46]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.14.2-47]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerima Surat Tanggal 3 Desember 2024 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM **[Vide Bukti PK.14.2-43]** yang pada pokoknya terdapat pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam rangka mempengaruhi pemilih agar memilih Terlapor.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Sukabumi meneruskan laporan pelanggaran *a quo* berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-5 Nomor: 164/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal penerusan laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **[Vide Bukti PK.14.2-44]**
 - 1.2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Tanda Bukti Penerusan Laporan TSM Nomor: 004/PL/TSM-PB/13.00/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan dinyatakan belum lengkap, kemudian pelapor melengkapi laporan. **[Vide Bukti PK.14.2-48]**
 - 1.3. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 11 Desember

2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.14.2- 45]**

2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 02/PL/PB/ 13.24/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya pelapor menduga adanya penggunaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang digunakan untuk kampanye pasangan Calon Nomor Urut 02. **[Vide Bukti PK.14.2-46]**

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Sukabumi melakukan kajian awal Nomor: 02/PL/PB/13.24/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan perbaikan yaitu melengkapi syarat materiel **[Vide Bukti PK.14.2-49]**

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan yang selanjutnya dihentikan/tidak dapat ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **[Vide Bukti PK.14.2-50]**

- 2.3. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi melakukan pembahasan kedua terhadap laporan dugaan pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XI/2024 Tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya bahwa dalam kegiatan *Geopark Ciletuh Spektakuler* Pelapor dan Para saksi tidak mengetahui adanya kegiatan kampanye seperti ajakan, penyampaian visi-misi maupun program dan pembagian alat peraga kampanye maupun penyebaran bahan kampanye. Selain itu, kegiatan tersebut bersifat umum serta tidak ada undangan yang terbukti mengundang paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 atau Nomor Urut 2, berikut dengan *rundown* kegiatan tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut memuat kampanye yang menguntungkan salah satu calon. Sehingga Laporan *a quo* dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi semua unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni Pasal 69 huruf h *Juncto* Pasal 187 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1) *Juncto* Pasal 188 UU Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-51]**

2.4. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan/tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni Pasal 69 huruf h *Juncto* Pasal 187 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1) *Juncto* Pasal 188 UU Pemilihan [Vide Bukti PK.14.2-47]

No	Kecamatan	Kepala Desa	Temuan / Laporan / LHP	Tindaklanjut Surat dan Tanggal surat	Vide Bukti
1.	Cisaat	Padaasih	Laporan Nomor: 01/ PL/PB/13.24/I X/2024 Tanggal 6 September 2024	Surat Nomor: 125 /PP.01.02/K.J B-16/0 9/2024 Tanggal 6 September 2024	[Vide Bukti PK.14.2- 52]
2.	Parakan salak	Sukakersa			
3.	Cidahu	Jayabakti	LHP Nomor: 87/LHP /PM.01.02/17/ 12/2024 Tanggal 2 Desember 2024	Surat Nomor: 179/ PP.00.02/K.J B-16/12 /2024 Tanggal 18 Desember 2024	[Vide Bukti PK.14.2-53]
4.	Kalapan ungal	Pulosari	LHP Nomor: 049/ LHP/PM.01.02 /18/10/2024 Tanggal 27 Oktober 2024	Surat Nomor: 135 /PP.00.02/K.J B-16/ 11/2024 Tanggal 4 November 2024	[Vide Bukti PK.14.2-54]
5.	Jampan gkulon	Padajaya	LHP Nomor: 001/ LHP/PM.01.02 /10/2024 Tanggal 3 Oktober 2024	Surat Nomor: 133/ PP.00.02/K.J B16/11/2024 Tanggal 4 November 2024	[Vide Bukti PK.14.2-55]
6.	Caringin	Cijengkol	LHP Nomor: 87/LHP/ PM.01.02/11/2 024 Tanggal	Surat Nomor: 161 /PP.00.02/K.J B-16/	[Vide Bukti PK.14.2-56]

			15 November 2024	12/2024 Tanggal 15 November 2024	
--	--	--	------------------	---	--

3. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai telah terjadi pelanggaran netralitas Kepala Desa, terdapat 6 (Enam) penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya kepada Bupati Sukabumi antara lain sebagai berikut:
4. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai telah terjadi pelanggaran netralitas Kepala Desa, terdapat 10 (Sepuluh) Kepala Desa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan masing-masing Panwaslu Kecamatan yang pada pokoknya menyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau perundang-undangan lain diantaranya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-57]**

NO	KECAMATAN	KEPALA DESA	LHP DAN TANGGAL LHP
1.	Kabandungan	Desa Cianaga	LHP Nomor: 412.A/LHP/PM.01 .02/19/11/2024 Tanggal 26 November 2024
2.		Tugu Bandung	
3.	Caringin	Pasir Datar	LHP Nomor: 033/LHP/PM 01.02/11/2024 Tanggal 4 November 2024
4.		Sukamulya	
5.	Surade	Sukatani	LHP Nomor: 1234/LHP/PM.01.02/24/08/2024 Tanggal 21 Agustus 2024
6.		Buniwangi	
7.		Gunung Sungging	
8.		Cipeundeuy	
9.		Warnasari	
10.		Pasir Ipis	

5. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 121/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 tanggal 10 September 2024 Perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa dan Surat Nomor: 191/PM.00.02/K.JB-16/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam

Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan
[Vide Bukti PK.14.2-58]

6. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat tindakan Bupati Sukabumi yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang diduga membantu Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Asep Japar dan H. Andreas melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat imbauan diantaranya sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan Surat Nomor: 120/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 10 September 2024 Perihal Imbauan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta pengusulan Pjs Bupati kepada Bupati Sukabumi yang pada pokoknya dalam melaksanakan kampanye, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Vide Bukti PK.14.2-59]

- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan Surat Nomor: 131/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang pada pokoknya Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar melaksanakan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Vide Bukti PK.14.2-60]

7. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat pidato Bupati Sukabumi dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bersikap Netral. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan sebagai berikut:

- 7.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Palabuhanratu Nomor: 26/LHP/PM.01.02/K.JB-16.01/11/2024 Tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya kegiatan HKN di hadiri langsung oleh Bupati Sukabumi Bpk. Marwan Hamami, dengan jumlah peserta sekitar 200 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan se-dapil 1. Dalam

kegiatan *a quo* berdasarkan LHP tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-73]**

7.2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah menerima Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Nomor: 800.1/10570/Dinkes /2024 tertanggal 13 November 2024 perihal Permohonan Ijin Kegiatan Peringatan HKN Ke-60 **[Vide Bukti PK.14.2-74]**. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan surat Nomor: 197 /PM.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Perihal Imbauan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya bahwa bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Pejabat Daerah Kabupaten Sukabumi yang hadir diimbau untuk tidak memanfaatkan kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 60 Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sukabumi sebagai kegiatan Kampanye, misalnya dengan meyakinkan konstituen/ peserta kegiatan untuk memilih dan/atau menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.2-75]**.

8. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat rotasi mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Sukabumi juga sebagai tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 2. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan sebagai berikut:

8.1. Berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 40a/LHP/PM.01.02/08/2024 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya terhadap Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800.1.3.2/Kep687/BKPSDM/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Setingkat Eselon II.b dilingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia **[Vide Bukti.14.2-61]**

8.2. Berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 64/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800.1.2.3/Kep. 783/BKPSDM/2024 tanggal 08 Oktober 2024 tentang pengangkatan pejabat administrator (camat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sukabumi telah mendapatkan izin dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia **[Vide Bukti.14.2-61]**

8.3. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan surat Nomor: 080/PM.00.02/K.JB-16/04/2024 Tanggal 03 April 2024 Perihal Imbauan kepada Bupati Sukabumi yang pada pokoknya Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi agar tidak melakukan penggantian Pejabat mulai tanggal 22 Maret sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kecuali mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian tanggal 29 Maret 2024 **[Vide Bukti.14.2-62]**

9. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai beredarnya hasil hitung cepat versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang mendahului penetapan KPU Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 39/PM.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal 20 November 2024 dengan agenda pembahasan Persiapan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti.14.2-63]** yang pada pokoknya:

- 9.1. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan upaya tindakan *preventif*/pencegahan serta untuk mengantisipasi *error/down system* dari Alat Kerja SIWASLIH yang disiapkan oleh Bawaslu RI diperlukan untuk membuat alat kerja yang terintegrasi dan tersistematis berbasis *Google Spreadsheet* untuk menginput elemen data dari dokumen C Hasil dan dokumen primer lainnya di setiap TPS kedalam *Google Drive* Putungsurra Pilkada 2024;
- 9.2. Bahwa alat kerja yang akan disiapkan tersebut harus dikunci dan hanya dapat diakses oleh operator Kabupaten serta operator Kecamatan hanya

- diberi akses kecamatan yang bersangkutan untuk dapat membuka dan melihat kecamatannya masing-masing;
- 9.3. Bahwa alat kerja pembantu yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi hanya untuk menghimpun data/dokumen proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai keperluan pengawasan yang bersifat internal dari Bawaslu;
- 9.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan agar dapat mengintruksikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk memastikan PTPS berada di lokasi TPS dan mengumpulkan data/dokumen primer hasil pengawasan dari PTPS untuk disampaikan ke Panwaslu Kecamatan dan dilakukan penelitian terhadap dokumen tersebut;
- 9.5. Bahwa perlakuan/pengelolaan terhadap dokumen *primer* dari PTPS dikumpulkan secara berjenjang setelah dilakukan penelitian dan analisa terhadap semua dokumen tersebut untuk kebutuhan rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten;
- 9.6. Bahwa dalam hal rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, agar mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan menginput D. Hasil Kecamatan berbasis TPS ke dalam alat kerja yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi.
10. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat tindakan netralitas Pengawas Kelurahan/Desa Benda. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Cicurug Nomor: 046/LHP/PM.01.02-16/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Cicurug melakukan penelusuran terhadap informasi Awal yang pada pokoknya terdapat tindakan perangkat Desa Benda (Mantan PKD Desa Benda Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024) yang diduga melanggar Pasal 51 huruf b dan j Undang-undang 06 Tahun 2014 tentang Desa *junto* pasal 82 huruf b dan j Perda Kabupaten Sukabumi nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa [**Vide Bukti PK.14.2-64**] Kemudian Panwaslu Kecamatan menyampaikan surat Nomor: 01/PP.00.02/K.JB-16-16/12/2024 Tanggal 8 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya kepada Kepala Desa Benda yang pada Pokok Berdasarkan keputusan rapat pleno terhadap LHP Nomor:

046/LHP/PM.01.02-16/12/2024 dimaksud terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa Benda diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Juncto* Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa Benda **[Vide Bukti PK.14.2-64]**.

11. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat tindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan Surat imbauan Nomor: 123/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 10 September 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara kepada Sekda Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Sukabumi agar menjaga integritas dan profesionalisme **[Vide Bukti PK.14.2-65]**
12. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat tindakan politik uang secara yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat imbauan diantaranya sebagai berikut:
 - 12.1. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan Surat Nomor: 131/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang pada pokoknya Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar melaksanakan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.14.2-60]**
 - 12.2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan Surat Nomor: 170/PM.00.02/K.JB-16/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024 Perihal Imbauan Pemberian Hadiah dalam kampanye Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang pada pokoknya Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar tidak melakukan praktik politik uang (*money politic*) baik itu kepada penyelenggara maupun pemilih **[Vide Bukti PK.14.2-66]**

13. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat persiapan pembagian sembako pasangan calon Nomor urut 2 di aula rapat Desa Sudajaya Girang. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Sukabumi Nomor: 59/LHP/PM.01.02/ 16.32/11/2024 tanggal 18 November 2024 pada pokoknya bahwa pengemasan sayuran itu dilakukan oleh kelompok Tani Bagja Sutra mendapat orderan/pesanan dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi atas nama Budi Azhar Mutawali dari Fraksi Partai Golkar. Dalam pengemasan sayuran tersebut dilakukan di Aula Kantor Desa Sudajaya Girang, berdasarkan pengakuan Kepala Desa tidak mengetahui ada bahan kampanye berupa stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor urut 02 yang dimasukan/diselipkan dalam pengemasan sayuran karena izin penggunaan tempat tersebut untuk digunakan sedekah bumi dari kelompok Tani Bagja Sutra sehingga Kepala Desa mengizinkan penggunaan Aula Kantor Desa Sudajaya Girang tersebut. Bahwa setelah dilakukan analisa oleh Panwaslu Kecamatan Sukabumi terhadap peristiwa tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye karena bahan kampanye berupa stiker tersebut yang terdapat dalam paket sayuran belum terjadi tindakan dalam penyebaran atau pembagiannya sehingga bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-67]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.14.2-1 sampai dengan bukti PK.14.2-75, sebagai berikut.

1. Bukti PK.14.2-1 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 beserta lampirannya berupa:
 - Salinan Formulir Model A.3;
 - Salinan Formulir Model A.1 (Perbaikan);
 - Salinan Formulir Model A.3.1;

2. Bukti PK.14.2-2 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/ 13.24/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024;
3. Bukti PK.14.2-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 101/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta lampirannya:
 - Salinan Model D. Hasil KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota;
 - Salinan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (Bupati dan Wakil Bupati);
 - Salinan Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Iyos Somantri – Zainul Nomor: Urut 1 Nomor: 010/Ex./Bid.SaksilZ/XI/2024 Tanggal 3 Desember 2024;
4. Bukti PK.14.2-4 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/PL/PB/Kec.Bojonggenteng/ 13.24/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
5. Bukti PK.14.2-5 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PB/ Kab/13.24/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024;
6. Bukti PK.14.2-6 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XII /2024 Tanggal 15 Desember 2024;
7. Bukti PK.14.2-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng Nomor: 222/LHP/PM.01.02/W.2-14/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024;

8. Bukti PK.14.2-8 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng Nomor: 52/PM.00.02/K.JB-16.14/ 12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
9. Bukti PK.14.2-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 3056 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 008 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng tanggal 4 Desember 2024;
10. Bukti PK.14.2-10 : Fotokopi Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Bojonggenteng/13.24/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024;
11. Bukti PK.14.2-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 174/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 pada Tanggal 18 Desember 2024;
12. Bukti PK.14.2-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 1402/PL.02.6-SD/3202/2024 Tanggal 5 Desember 2024;
13. Bukti PK.14.2-13 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 100/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 beserta lampiran sebagai berikut:
 - Salinan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Iyos Somantri – Zainul Nomor Urut 1 Nomor: 007/Ex./Bid.Saksi.IZ/XI/2024 Tanggal 18 Desember 2024;
 - Salinan Model C. Hasil-KWK Bupati;
14. Bukti PK.14.2-14 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;

15. Bukti PK.14.2-15 : Salinan Surat KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 1448/PL.02.4-SD/3202/2024 Tanggal 27 Desember 2024;
16. Bukti PK.14.2-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cisolok Nomor: 80/LHP/PM.01.02/05/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
 - Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
17. Bukti PK.14.2-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pelabuhanratu Nomor: 35/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dengan lampiran berupa:
 - Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
18. Bukti PK.14.2-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpenan Nomor: 30/LHP/PM.01.02 /24/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 dengan lampiran berupa:
 - Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
19. Bukti PK.14.2-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng Nomor: 219/LHP/PM.01.02/W.2-14/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
 - Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;

- Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
20. Bukti PK.14.2-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cicurug Nomor: 044/LHP/PM.01.0206/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
21. Bukti PK.14.2-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cidahu Nomor: 83/LHP/PM.01.02 /17/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
22. Bukti PK.14.2-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kabandungan Nomor: 584/LHP/PM.01.02/19/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
23. Bukti PK.14.2-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalapanunggal Nomor: 059/LHP/PM.01.02/18/ 11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;

- Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
24. Bukti PK.14.2-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parakansalak Nomor: 390/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
25. Bukti PK.14.2-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parungkuda Nomor: 211/LHP/PM.01.02/13/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan Bupati;
26. Bukti PK.14.2-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Caringin Nomor: 044/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
27. Bukti PK.14.2-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibadak Nomor: 059/LHP/PM.01.02/11/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:

- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota

- Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;

28. Bukti PK.14.2-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikembar Nomor: 1289/LHP/PM.01.02/10/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dengan lampiran berupa:

- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;

- Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;

- Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;

29. Bukti PK.14.2-29 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nagrak Nomor: 1124/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:

- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;

- Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;

- Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;

30. Bukti PK.14.2-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cisaat Nomor: 1086/LHP/PM.01.02/16.29/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 dengan lampiran berupa:

- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;

- Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;

- Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;

31. Bukti PK.14.2-31 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunungguruh Nomor: 89/LHP/PM.01.02/27/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
32. Bukti PK.14.2-32 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kebonpedes Nomor: 407/LHP/PM.01.02/34/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
33. Bukti PK.14.2-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukabumi Nomor: 68/LHP/PM.01.02/16.32/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
34. Bukti PK.14.2-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor: 078/LHP/PM.01.02/33/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;

35. Bukti PK.14.2-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pabuaran Nomor: 073/LHP/PM.01.02/16.37/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
36. Bukti PK.14.2-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciemas Nomor: 14/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
37. Bukti PK.14.2-37 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciracap Nomor: 027/LHP/PM.01.02/26/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
38. Bukti PK.14.2-38 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jampangkulon Nomor: 021/LHP/PM.01. 02/21/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;

- Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
39. Bukti PK.14.2-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalibunder Nomor: 018/LHP/PM.01.02/23/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
40. Bukti PK.14.2-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Surade Nomor: 2348/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
41. Bukti PK.14.2-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bantargadung Nomor: 417/LHP/PM.01.02/04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;
 - Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
42. Bukti PK.14.2-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikakak Nomor: 025/LHP /PM.01.02/03/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota;

- Salinan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 - Salinan C. Hasil Salinan-KWK Bupati;
43. Bukti PK.14.2-43 : - Fotokopi Surat Tanggal 3 Desember 2024 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;
- Fotokopi Surat Tanggal 9 Desember 2024 Perihal Perbaikan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;
44. Bukti PK.14.2-44 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-5 Nomor: 164/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024;
45. Bukti PK.14.2-45 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
46. Bukti PK.14.2-46 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/13.24/XI/2024 tanggal 13 November 2024 dengan lampiran berupa:
- Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
 - Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/13.24/XI/2024 tanggal 13 November 2024 (Perbaikan);
 - Salinan Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan tanggal 17 November 2024;
47. Bukti PK.14.2-47 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/13.24/ XI/2024 tanggal 23 November 2024;

48. Bukti PK.14.2-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 004/PL/TSM-PB/13.00/XI/2024 Tanggal 4 Desember 2024;
49. Bukti PK.14.2-49 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/PL/PB/13.24/XI/2024 tanggal 14 November 2024;
50. Bukti PK.14.2-50 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
51. Bukti PK.14.2-51 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XI/2024 Tanggal 22 November 2024;
52. Bukti PK.14.2-52 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 01/PL/PB/13.24/IX/2024 Tanggal 4 September 2024;
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/PL/PB/13.24/IX/2024 Tanggal 6 September 2024;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 125/PP.01.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 6 September 2024;
53. Bukti PK.14.2-53 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cidahu Nomor: 87/LHP/PM.01.02/17/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 179/PP.00.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024;
54. Bukti PK.14.2-54 : - Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan

Kalapanunggal Nomor: 049/LHP/PM.01.02
/18/10/2024 Tanggal 27 Oktober 2024;

- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi
Nomor: 135/PP.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal
4 November 2024;

55. Bukti PK.14.2-55 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Panwaslu Kecamatan
Jampangkulon Nomor: 001/LHP/PM.01.02/10
/2024 Tanggal 3 Oktober 2024;

- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi
Nomor: 133/PP.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal 4
November 2024;

56. Bukti PK.14.2-56 : - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor:
87/LHP/PM.01.02/11 /2024 Tanggal 15 November
2024;

- Fotokopi Fotokopi Surat Penerusan Bawaslu
Kabupaten Sukabumi Nomor: 161/PP.00.02/K.JB-
16/12/2024 Tanggal 15 November 2024;

57. Bukti PK.14.2-57 : - Salinan Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kabandungan
Nomor: 412.A/LHP/PM.01. 02/19/11/2024
Tanggal 26 November 2024;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Panwaslu Kecamatan Caringin
Nomor: 033/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 4
November 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Panwaslu Kecamatan Surade
Nomor: 1234/LHP/PM.01.02/24/08/2024 Tanggal
21 Agustus 2024;

58. Bukti PK.14.2-58 : - Fotokopi Surat Nomor: 121/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 tanggal 10 September 2024;
- Fotokopi Surat Nomor: 191/PM.00.02/K.JB-16/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
59. Bukti PK.14.2-59 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 120/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 10 September 2024;
60. Bukti PK.14.2-60 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 131/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 23 September 2024;
61. Bukti PK.14.2-61 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 40a/LHP/PM.01.02/08/2024 27 Agustus 2024 beserta lampirannya berupa:
- a. Salinan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800.1.3.2/Kep.687/BKPSDM/2024 Tanggal 27 Agustus 2024;
 - b. Salinan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.6/3990/SJ Tanggal 2024;
 - c. Salinan Surat BKPSDM Kabupaten Sukabumi Nomor: 800.1.3.1/3750/MKPA/2024 Tanggal 28 Agustus 2024;
- Fotokopi LHP Nomor: 64/LHP/PM.01.02/10 /2024 Tanggal 9 Oktober 2024 beserta lampirannya berupa:
- a. Salinan Surat Sekda Provinsi Jawa Barat Nomor: 8973/KPG.07/BKD Tanggal 2 September 2024
 - b. Salinan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:

100.2.2.6/7777/OTDA Tanggal 2 Oktober 2024

- c. Salinan Surat BKPSDM Kabupaten Sukabumi Nomor: 800.1.3.1/5997/Bid.MKPA/2024 Tanggal 9 Oktober 2024
- d. Salinan Press Release Lampiran Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800.1.3.1/KEP. 783/BKPSDM/2024 Tanggal 8 Oktober 2024
- e. Salinan Draf Sambutan dan Arahan Bupati Sukabumi.

- 62. Bukti PK.14.2-62 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 080/PM.00.02/KJB-16/04/2024 Tanggal 03 April 2024;
- 63. Bukti PK.14.2-63 : Fotokopi Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 39/PM.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal 20 November 2024;
- 64. Bukti PK.14.2-64 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cicurug Nomor: 046/LHP/PM.01.02-16/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024;
- Fotokopi Surat Penerusan Panwaslu Kecamatan Cicurug Nomor: 01/PP.00.02/K.JB-16-16/12/2024 Tanggal 8 Desember 2024;
- 65. Bukti PK.14.2-65 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 123/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 10 September 2024;
- 66. Bukti PK.14.2-66 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 170/PM.00.02/K.JB-16/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024;
- 67. Bukti PK.14.2-67 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Sukabumi Nomor:

59/LHP/PM.01.02/16.32/11/2024 tanggal 18 November 2024 beserta lampirannya berupa:

- Salinan Surat Perkumpulan Petani Penggarap BAGJA SUTRA Nomor: 0141/SK-BJS/XI/2024 tanggal 12 November 2024;
- Salinan Keputusan Kepala Desa Sudajaya Girang Nomor: 141.1/26/XI/2020 tanggal 19 November 2020;

68. Bukti PK.14.2-68 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024;
69. Bukti PK.14.2-69 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 165 /PP.00.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024;
70. Bukti PK.14.2-70 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Pabuaran Nomor: 001/LHP/TM.00.02/K.JB-16.37/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;
71. Bukti PK.14.2-71 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran /13.24/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024;
72. Bukti PK.14.2-72 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Pabuaran Nomor: 001/PP.00.02/K.JB.37/12/2024 pada Tanggal 03 Desember 2024;
73. Bukti PK.14.2-73 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Palabuhanratu Nomor: 26/LHP/PM.01.02/K.JB-16.01/11/2024 Tanggal 20 November 2024;

74. Bukti PK.14.2-74 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Nomor: 800.1/10570/Dinkes/2024 tertanggal 13 November 2024;
75. Bukti PK.14.2-75 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 197/PM.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal 14 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih melainkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi 3057/2024) [vide Bukti P-64 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum

terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi 3057/2024 [vide Bukti P-64 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB ada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi 3057/2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.45 WIB [vide Bukti P-64 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 237/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak jelas (kabur) dengan alasan sebagai berikut.

1. pada uraian kedudukan hukum, Pemohon salah menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku yakni PMK 6/2020 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 66 PMK 3/2024.
2. Pemohon salah melakukan penghitungan pada posita angka 5 terkait jumlah TPS yang berada di Kabupaten Sukabumi, seharusnya yang benar adalah 3.849 TPS bukan 3.882 TPS, di mana angka 3.849 TPS berasal dari hasil pengurangan 4.318 TPS dikurangi 469 TPS.
3. Pemohon tidak jelas dalam menentukan penggelembungan suara. Seharusnya, apabila Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan, maka Pemohon wajib membuktikan secara keseluruhan pada semua TPS, yaitu pada 469 TPS di 27 Kecamatan.
4. Pada posita angka 3 Pemohon menguraikan bahwa pada pokoknya perolehan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan terjadi karena adanya penggelembungan suara yang merugikan pihak Pemohon. Sementara pada posita angka 4, Pemohon menguraikan perolehan suara pada 469 TPS di 27 Kecamatan diduga telah terpengaruh oleh adanya pelanggaran secara TSM oleh Paslon 2;
5. Pemohon salah dalam menguraikan total suara sah dan suara tidak sah dalam Permohonan.
6. Pemohon salah menguraikan total pemilih, sebab tabulasi yang disajikan oleh Pemohon memuat banyak kesalahan angka pada kolom "Total Pemilih", dimana dalam tabulasi tersebut Pemohon mencantumkan data pemilih laki-laki dalam DPT pada kolom "Total Pemilih", seharusnya kolom "Total Pemilih" yang dimaksud adalah penjumlahan dari kolom "Suara Sah" ditambah "Suara Tidak Sah.
7. permohonan Pemohon tidak jelas karena antara posita dan petitum bertentangan satu sama lain.

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur. Menurut Pihak terkait, dalil-dalil yang diajukan Pemohon disampaikan secara melompat-lompat, tidak berurutan, dan tidak memberikan alur argumentasi yang logis, sehingga sulit dipahami. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan fakta tentang dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, melainkan Pemohon hanya menjabarkan setiap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait pada kurang lebih 469 TPS, yang oleh Pemohon disimpulkan selisih tersebut merupakan hasil dari penggelembungan suara bagi Pihak Terkait. Lebih tegasnya Pemohon tidak menguraikan secara detail bagaimana proses penggelembungan itu dilakukan dan siapa yang melakukan, yang menurut Pemohon ini adalah tindakan TSM. Selanjutnya, klaim Pemohon yang hanya mendalilkan adanya penggelembungan suara dari pihak Termohon untuk Pasangan Calon nomor urut 2 tanpa menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon dalam posita maupun petitum, tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya perselisihan hasil pemilihan. Dalil Pemohon yang demikian hanya bersifat asumsi yang tidak memenuhi standar pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah mempersoalkan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan dari aparaturnegara serta *money politics* yang melibatkan kepala desa yang kesemuanya berkaitan dengan kejadian yang diakibatkan karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak

beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi adanya penggelembungan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada 469 TPS di 27 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi serta adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Menurut Pemohon, terdapat penggelembungan suara pada 469 TPS yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa menurut Pemohon, ada keterlibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat tindakan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan/ketidaknetralan Bupati Sukabumi atas nama Marwan Hamami yang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi (partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang diduga tidak melakukan cuti ketika masa kampanye pilkada 2024 berlangsung;
5. Bahwa menurut Pemohon, ada kegiatan Geopark Ciletuh Spektakuler di desa Mandrajaya pada tanggal 9 november 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang diduga penuh kepentingan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibuktikan dengan memberikan simbol salam dua jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pengangkatan pejabat administrasi (camat) pada masa tahapan pilkada;
7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat ketidaknetralan para kepala desa dan aparat desa serta Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kegiatan bagi-bagi sembako yang sarat akan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penghitungan hasil cepat di media sosial versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU.

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-73.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-506), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20), Keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.14.2-1 sampai dengan Bukti PK.14.2-75), dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa terkait dalil penggelembungan suara pada 469 TPS yang tersebar di 27 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Pemohon mengajukan Bukti P-68. Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon hanya menggunakan sampling indikasi di 3 TPS, yaitu TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran, dan TPS 17 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu. Metode sampling indikasi demikian tidak representatif untuk menggeneralisir terjadinya keadaan yang sama pada 469 TPS di 27 Kecamatan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat dan bersifat spekulatif, sebab Pemohon tidak memberikan detail bagaimana dugaan penggelembungan suara terjadi. Apakah dilakukan dengan menambahkan suara palsu, memindahkan suara, atau metode lainnya, namun Pemohon hanya berasumsi dengan menggunakan bukti berdasarkan “sampling” dari segelintir TPS untuk menggeneralisasi penggelembungan suara di 469 TPS. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa hasil pengawasan Panwascam di 27 kecamatan tidak menemukan adanya kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan terkait adanya selisih suara sebagaimana di dalilkan Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni Bukti P-68 dan bukti yang diajukan Termohon yakni Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-471 berupa Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada 469 TPS yang tersebar di 27 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Mahkamah tidak menemukan adanya penggelembungan suara maupun selisih suara. Terlebih, hasil pengawasan Panwascam di 27 kecamatan tersebut menunjukkan tidak ditemukan adanya kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan terkait adanya selisih suara sebagaimana di dalilkan Pemohon [vide Bukti PK.14.2-7 sampai dengan Bukti PK.14.2-42]. Selanjutnya, dari 27 Kecamatan tersebut, Mahkamah menemukan adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti T-501 dan Bukti PK.12.2-9]. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait penggelembungan suara pada 469 TPS yang tersebar di 27 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa terkait dalil adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara terstruktur, sistematis dan masif (“TSM”) dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2, Termohon dalam jawabannya menyatakan dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagai pelanggaran yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024. Terlebih, dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang hingga tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik kepada DKPP, KPU, Bawaslu, maupun Sentra Gakkumdu. Sementara itu, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bahwa Pemohon mencoba mempermasalahkan peristiwa yang terjadi setelah hari pencoblosan tanpa memberikan argumen yang kuat tentang bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi hasil pemilu, seharusnya setiap dugaan pelanggaran yang dipersoalkan seharusnya secara langsung terkait dengan pelaksanaan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, atau rekapitulasi yang berlangsung pada hari pencoblosan tersebut. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa laporan-laporan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tidak dapat ditindaklanjuti.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati Jawaban dan keterangan dan bukti yang diajukan oleh para pihak dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata Pemohon sudah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sukabumi, dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah meneruskan laporan-laporan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu provinsi Jawa Barat yang selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti [vide Bukti P-9 dan Bukti P-69, Bukti T-500, dan Bukti PK.12.2-43 sampai dengan bukti PK.12.2-47]. Dengan demikian, dalil adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa mengenai dalil Pemohon adanya tindakan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon mengajukan Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-33, Bukti P-53, dan Bukti P-62 berupa salinan video dan foto pembagian minyak goreng, kaos, sembako, sabun cuci piring, dan pembagian uang sebesar Rp20.000 oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut sebab dugaan pelanggaran tersebut baru dilaporkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten, sehingga dugaan pelanggaran tersebut hanya akal-akalan dan/atau siasat buruk untuk menghalang-halangi dilaksanakannya Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak memiliki keyakinan berkenaan dengan adanya tindakan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon tersebut oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak

dapat ditindaklanjuti [vide Bukti PK.14.2-25]. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4] Bahwa mengenai dalil Pemohon adanya keterlibatan/ketidaknetralan Bupati Sukabumi atas nama Marwan Hamami yang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi (partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang diduga tidak melakukan cuti ketika masa kampanye pilkada 2024 berlangsung, Pemohon mengajukan Bukti P-2. Terhadap hal tersebut, Termohon dalam persidangan menjelaskan tidak ada informasi bahwa Bupati Sukabumi adalah tim sukses Paslon Pihak Terkait. Selain itu, tidak ada regulasi yang melarang kepala daerah menjadi tim sukses kecuali mengajukan cuti [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 17 Januari 2025, hlm. 171-172]. Selanjutnya, Pihak terkait menerangkan bahwa tuduhan Pemohon hanya bersifat asumsi tanpa didukung fakta atau dokumen sah yang membuktikan keterlibatan Saudara Marwan Hamami, sebab yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai bagian dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terdaftar secara resmi di KPU Kabupaten Sukabumi [vide Bukti PT-8]. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan pada pokoknya laporan-laporan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tidak dapat ditindaklanjuti.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukan bukti yang meyakinkan bahwa Bupati Sukabumi atas nama Marwan Hamami merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Adapun Bukti P-2 berupa salinan SK Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tangkapan layar berita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah. Selanjutnya, berkenaan dengan dugaan Bupati Sukabumi berpidato dan mengajak ASN untuk bersikap tidak netral dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Palabuhanratu telah mengeluarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 26/LHP/PM.01.02/K.JB-16.01/11/2024 bertanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.14.2-73]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.5] Bahwa terkait dalil adanya kegiatan Geopark Ciletuh Spektakuler di desa Mandrajaya pada tanggal 9 November 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang diduga penuh kepentingan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibuktikan dengan memberikan simbol salam dua jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-5], Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang hingga tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik kepada DKPP, KPU, Bawaslu, maupun Sentra Gakkumdu. Pemohon baru melapor pada tanggal 10 Desember 2024 setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten. Sementara itu, Pihak Terkait dalam keterangannya membantah tuduhan tersebut dengan alasan penggunaan simbol dua jari tersebut belum tentu ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi, karena simbol serupa juga bisa merujuk pada konteks lain, seperti Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang memiliki empat pasangan calon, simbol tersebut juga lazim digunakan untuk menyimbolkan *victory* atau *peace*. Terlebih, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, yaitu keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap kegiatan tersebut, Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi telah melakukan pembahasan laporan dugaan pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* dihentikan atau tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi semua unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.14.2-51]. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah pula mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.14.2-47]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.6] Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pengangkatan pejabat administrator (camat) pada masa tahapan pilkada, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pengangkatan pejabat *a quo* telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat

Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3990/SJ perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tertanggal 21 Agustus 2024 [Bukti PT-10 dan Bukti PK.14.2-61] dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7777/OTDA tanggal 2 Oktober 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi [vide Bukti PT-10 dan Bukti PK.14.2-61]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.7] Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan adanya ketidaknetralan para kepala desa dan aparat desa serta Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut sebab dugaan pelanggaran tersebut baru dilaporkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten, sehingga dugaan pelanggaran tersebut hanya akal-akalan dan/atau siasat buruk untuk menghalang-halangi dilaksanakannya Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Pihak Terkait dalam ketereangannya menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara personal dan tidak dapat dihubungkan dengan arahan atau instruksi dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih, jika terjadi pelanggaran oleh aparatur, maka menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Apalagi Pihak Terkait bukanlah petahana dan tidak memiliki akses apapun kepada aparatur pemerintahan, justru Pemohon sebagai Petahana dan birokrat yang berpeluang lebih besar dalam melakukan pelanggaran tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa mengenai pelanggaran netralitas Kepala Desa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan masing-masing Panwaslu Kecamatan pada pokoknya menyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.14.2-52 sampai dengan Bukti PK.14.2-57]. Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang ada, dugaan pelanggaran netralitas para kepala desa sebagaimana di dalilkan Pemohon tersebut telah diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.8] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya kegiatan bagi-bagi sembako yang sarat akan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut sebab dugaan pelanggaran tersebut baru dilaporkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten, sehingga dugaan pelanggaran tersebut hanya akal-akalan dan/atau siasat buruk untuk menghalang-halangi dilaksanakannya Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Pihak Terkait menerangkan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari agenda kampanye resmi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya arahan atau instruksi dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait pembagian sembako. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukabumi Nomor 59/LHP/PM.01.02/16.32/11/2024 tanggal 18 November 2024, pengemasan sayuran dilakukan oleh kelompok Tani Bagja Sutra setelah mendapat pesanan dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi atas nama Budi Azhar Mutawali dari Fraksi Partai Golkar. Pengemasan tersebut dilakukan di Aula Kantor Desa Sudajaya Girang, dan berdasarkan pengakuan Kepala Desa tidak mengetahui ada bahan kampanye berupa stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor urut 2 yang dimasukan/diselipkan dalam pengemasan sayuran karena izin penggunaan tempat tersebut untuk digunakan sedekah bumi dari kelompok Tani Bagja Sutra. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan analisis Panwaslu Kecamatan Sukabumi, terhadap peristiwa tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye karena bahan kampanye berupa stiker tersebut yang terdapat dalam paket sayuran belum terjadi tindakan dalam penyebaran atau pembagiannya sehingga bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.14.2-67]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon adanya kegiatan bagi-bagi sembako yang sarat akan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.9] Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penghitungan hasil cepat di media sosial versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU, Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam keterangannya menerangkan bahwa kegiatan tersebut adalah tindakan pencegahan serta untuk mengantisipasi *error/down system* dari Alat Kerja

SIWASLIH yang disiapkan oleh Bawaslu RI yang diperlukan untuk membuat alat kerja yang terintegrasi dan tersistematis berbasis *Google Spreadsheet* guna menginput elemen data dari dokumen C Hasil dan dokumen primer lainnya di setiap TPS ke dalam *Google Drive* Putungsura Pilkada 2024. Terlebih, alat kerja tersebut hanya dapat diakses oleh operator Kabupaten, serta operator Kecamatan hanya diberi akses membuka dan melihat kecamatannya masing-masing. Menurut Mahkamah, penghitungan hasil cepat versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi tersebut tidak mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU sebagaimana didalilkan Pemohon, sebab tidak digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu melainkan digunakan untuk kepentingan internal Bawaslu Kabupaten Sukabumi guna menghimpun data/dokumen proses pemungutan dan penghitungan suara untuk keperluan pengawasan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, Pemohon tidak dapat menunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sehingga dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ...”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...”

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1781 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Drs. H. Iyos Somantri, M.Si. dan Zainul S., S.E., M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 [vide Bukti P-63 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1782 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Drs. H. Iyos Somantri, M.Si. dan Zainul S., S.E., M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti PT-3];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi adalah 2.821.619 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.063.852$ suara (total suara sah) = 5.319 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 498.990 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 564.862 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $564.862 \text{ suara} - 498.990 \text{ suara} = 65.872 \text{ suara}$ (6,19 %) atau lebih dari 5.319 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **22.18 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Zaka Firma Aditya



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.